



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta izin-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tuban yaitu *'Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan'*. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pembangunan Tuban yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dasar Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tuban Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tuban tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni

masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tuban, 26 Maret 2026

An. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. BUDI WIYANA, MSi

Pembina Utama Madya

NIP.19671005 199202 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupatenTuban Nomor 05 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 tertuang sasaran strategis Kabupaten Tuban berjumlah 13 (tiga belas) sasaran dengan indikator kinerja sasaran berjumlah 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- ❖ Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja :
Capaian kinerja indikator tujuan sebesar 100,39% (istimewa) dan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 102,99% dengan kategori capaian istimewa.
- ❖ Misi II terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 10 indikator kinerja :
Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan sebesar 95,64% (cukup) dan Rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 113,66% dengan kategori capaian istimewa.
- ❖ Misi III terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja :
Capaian kinerja indikator tujuan sebesar 100,81% (istimewa) dan Rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 96,12 % dengan katagori capaian cukup.
- ❖ Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :
Capaian kinerja indikator tujuan sebesar 97,93% (cukup) dan Rata-rata capaian 9 indikator sasaran sebesar 97,94% dengan kategori capaian cukup.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Daerah	2
1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	24
1.4 Jumlah ASN (PNS/PPPK).....	26
1.5 Permasalahan Isu Strategis Pemerintah Daerah	27
1.6 Dasar Hukum	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 RPJMD Kabupaten	30
2.2 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026	30
2.3 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029	34
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	41
2.5 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029)	48
2.6 Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	60
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	60
3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD Tahun 2021-2026)	60
3.2 Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD Tahun 2025-2029).....	96
BAB IV PENUTUP	222

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keterangan Nilai Tier Pada Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban

Tabel 3.2 Nilai Indeks Layak Huni Menurut Kelas/Tier Per Kecamatan

Tabel 3.3 Nilai Tier Indeks Layak Huni Berdasarkan Kategori

Tabel 3.4 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel 3.5 Perbandingan IKLH Kabupaten Tuban dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Tabel 3.6 Perbandingan Indeks Kethanan Pangan Kabupaten Tuban dengan Nasional Tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Tabel 3.8 Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Tabel 3.9 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dengan

Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Tabel 3.10 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

Tabel 3.12 Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Tuban dari tahun 2024 dan 2025

Tabel 3.13 Perbandingan Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional

Tabel 3.14 Perbandingan Skor IPP Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban

Grafik 1.2 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

Grafik 1.3 Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2019 – 2023

Grafik 1.4 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Grafik 1.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Grafik 1.6 Persentase Penduduk Miskin Daerah Tahun 2024

Grafik 1.7 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2024

Grafik 1.8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabuapten Tuban Tahun 2020 – 2024

Grafik 1.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024

Grafik 1.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban, Tahun 2020-2024

Grafik 3.1 Perbandingan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
beberapa Tahun Terakhir

Grafik 3.2 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Grafik 3.3 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Grafik 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Tahun 2009-2025

Grafik 3.5 Perbandingan Rasio Gini
Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Gambar 3.6 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tuban dengan
Kabupaten sekitar Tahun 2025

Grafik 3.7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban dari tahun 2021 hingga 2025

Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025 dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Grafik 3.9 Perbandingan Rasio Kewirausahaan

Kabupaten Tuban dengan target tahun 2025

Grafik 3.10 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.11 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.12 Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos) Kabupaten Tuban dengan target tahun 2025

Grafik 3.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.14 Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.15 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.17 Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.18 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025

Grafik 3.19 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025

Grafik 3.19 Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.20 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.21 Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.22 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik 3.23 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tuban terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penyusunan LKjIP ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana target-target strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban telah tercapai, khususnya dalam semangat "**Mbangun Deso Noto Kutho**".

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tuban adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan: Data pencapaian kinerja dalam LKjIP menjadi dasar bagi Bupati dan jajaran pimpinan untuk menentukan program prioritas dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran di tahun mendatang.

- b. Penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berjalan secara harmonis di setiap Perangkat Daerah.
- c. Budaya Kerja Berbasis Kinerja: Mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk lebih berorientasi pada hasil (result-oriented) daripada sekadar penyerapan anggaran secara prosedural.
- d. Identifikasi Kendala: Memudahkan identifikasi hambatan-hambatan teknis maupun administratif yang menghalangi pencapaian target pembangunan daerah.
- e. Transparansi Publik: Masyarakat Tuban dapat mengetahui secara nyata apa saja hasil pembangunan yang telah dicapai dan sejauh mana janji-janji politik dalam RPJMD telah direalisasikan.
- f. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan pelaporan yang jujur dan terukur, kredibilitas Pemerintah Kabupaten Tuban di mata masyarakat, pemerintah pusat, maupun investor akan meningkat.
- g. Bahan Evaluasi Pemerintah Pusat: Memberikan gambaran kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tuban untuk dasar pemberian insentif atau penghargaan.

1.2 Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Aspek Geografi

Aspek geografis perlu dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Adapun hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Tuban, Tahun 2025

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tuban merupakan kabupaten yang memiliki wilayah cukup strategis di ujung barat perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Timur dari arah barat. Adapun batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora Provinsi Jawa Tengah

Tata letak Kabupaten Tuban dapat dilihat lebih jelas pada gambar peta Provinsi Jawa Timur dibawah ini.

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah daratan seluas 1.972,17 km² dan panjang pantai sepanjang 65 km yang membentang dari arah timur sampai barat yang melewati 5 (lima) kecamatan yaitu dari Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Kecamatan Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 km².

Secara administratif wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan, 328 Desa/Kelurahan, serta 1.734 RW dan 6.796 RT. Kecamatan dengan masing-masing jumlah desa di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban

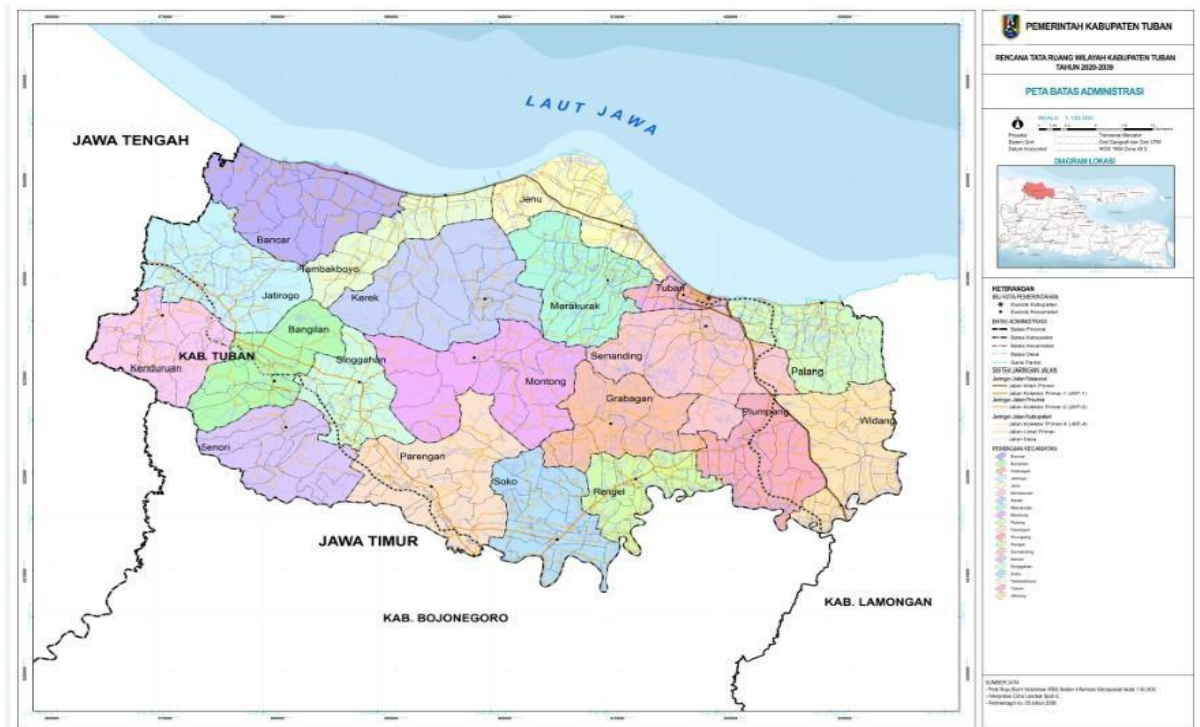
No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kenduruan	90,49	9	45	192
2	Bangilan	90,72	14	110	310
3	Senori	97,52	12	71	251
4	Singgahan	68,90	12	64	187
5	Montong	149,03	13	68	257
6	Parengan	133,27	18	78	276
7	Soko	92,25	23	119	603
8	Rengel	64.69	16	76	377

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Grabagan	91,48	11	46	232
10	Plumpang	87,83	18	115	502
11	Widang	100,10	16	72	368
12	Palang	87.04	19	116	463
13	Semanding	135,02	17	155	590
14	Tuban	21.09	17	27	370
15	Jenu	85.75	17	72	231
16	Merakurak	103,94	19	100	384
17	Kerek	154,27	17	98	341
18	Tambakboyo	72,31	18	64	218
19	Jatirogo	119,73	18	104	362
20	Bancar	126,73	24	84	291
Jumlah		1.972,17	328	1.684	6.804

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2025

Adapun wilayah Administratif Kabupaten Tuban sebagaimana pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Peta Administrasi Kabupaten Tuban



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, 2025

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara umum Kabupaten Tuban merupakan wilayah yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 06°40' sampai dengan 07°18' Lintang Selatan dan 111°30' sampai dengan 112°35' Bujur Timur. Jarak dari ibu kota Provinsi Jawa Timur sekitar 103 km ke arah barat.

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km yang membentang dari arah timur sampai barat yang melewati 5 (lima) kecamatan yaitu dari Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Kecamatan Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 km².

C. Kondisi Topografi

Kabupaten Tuban memiliki ketinggian berbeda-beda yang dapat ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 8-182 meter di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0–15 meter di atas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5–500 meter. Daerah yang berketinggian 0–25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo. Sedangkan daerah yang berketinggian di atas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan, dan Grabagan. Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 2.4.

D. Kondisi Klimatologis

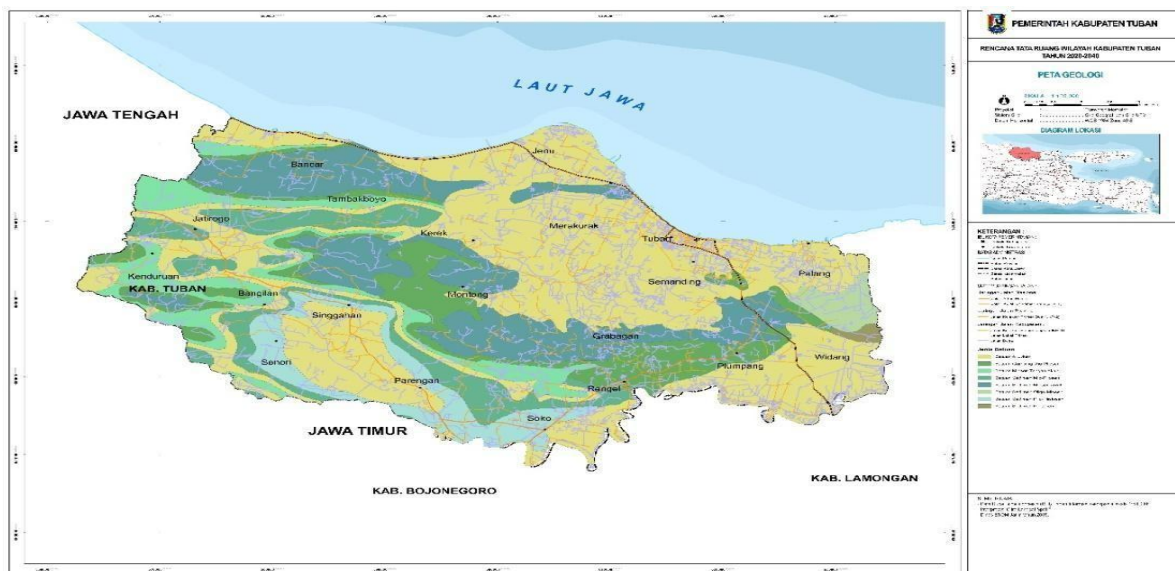
7

E. Kondisi Geologi

Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari *Miocene Sedimentary Facies*, *Miocene Limenston Facies*, *Pleistocene Limenstone Facies*, *Alluvium*, *Pleistocene Sedimentary Facies*, *Piocene Sedimentary Facies*. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan *Miocene lomenstone Facies* yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial. Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 2.5 peta geologi Kabupaten Tuban berikut ini.

Gambar 1.5 Peta Geologi Kabupaten Tuban, Tahun 2025



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, 2025

Secara geologi jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu:

- Alluvial: jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyoy dan Bancar. Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial adalah Kecamatan Kenduruan, Jatirogo, Bangilan, Senori, Singgahan, Kerek, Montong, dan Grabagan.
- Regosol: jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 35.629,942 Ha. Yang tersebar di Kecamatan Bancar, Tambakboyoy, dan Jenu. Kecamatan yang tidak memiliki jenis tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Merakurak, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, dan Jatirogo.
- Grumosol: jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyoy, Jatirogo, Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Kecamatan Tuban dan Merakurak.
- Komplek Mediteran Litosol: jenis tanah ini tersebar di kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, Tambakboyoy, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha.
- Komplek Mediteran Litosol/Renzina: dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

F. Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut

didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya Sungai Kening. Sungai- sungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

1.2.2 Aspek Demografi

Aspek demografi di Kabupaten Tuban digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Secara terperinci perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir serta komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2019	650.788	647.514	1.298.302
2	2020	598.339	599.673	1.198.012

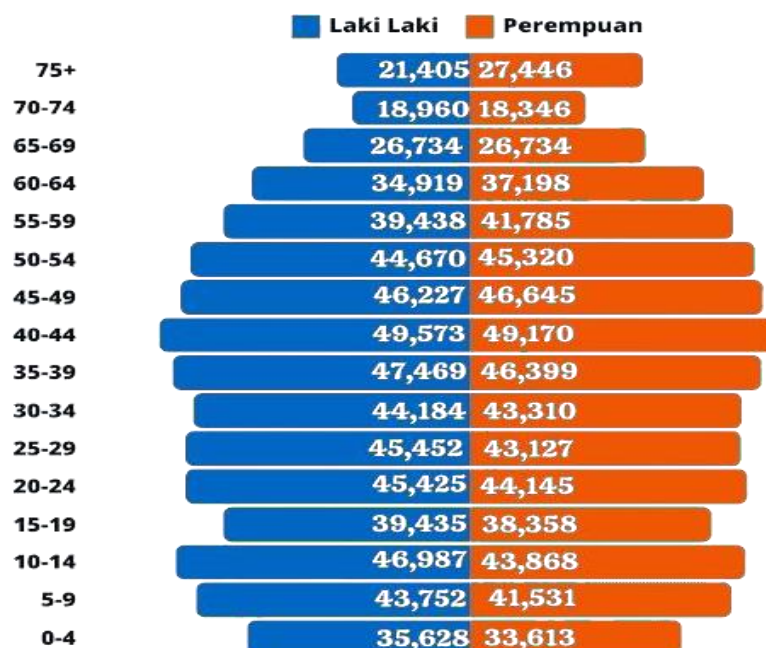
No.	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
3	2021	600.785	602.342	1.203.127
4	2022	603.875	605.668	1.209.543
5	2023	630.258	628.110	1.258.368

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2024

Kondisi demografis Kabupaten Tuban berdasarkan penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2019 sebesar 1.298.302 jiwa. Tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 1.198.012 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 598.339 jiwa dan perempuan sebesar 599.673 jiwa. Dari jumlah tersebut angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,77. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Di tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebesar 1.203.127 jiwa, dan pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 605.688 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 605.668 jiwa. Di tahun 2024 jumlah penduduk Tuban meningkat menjadi 1.258.368.

Gambar 1.6 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tuban

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2025



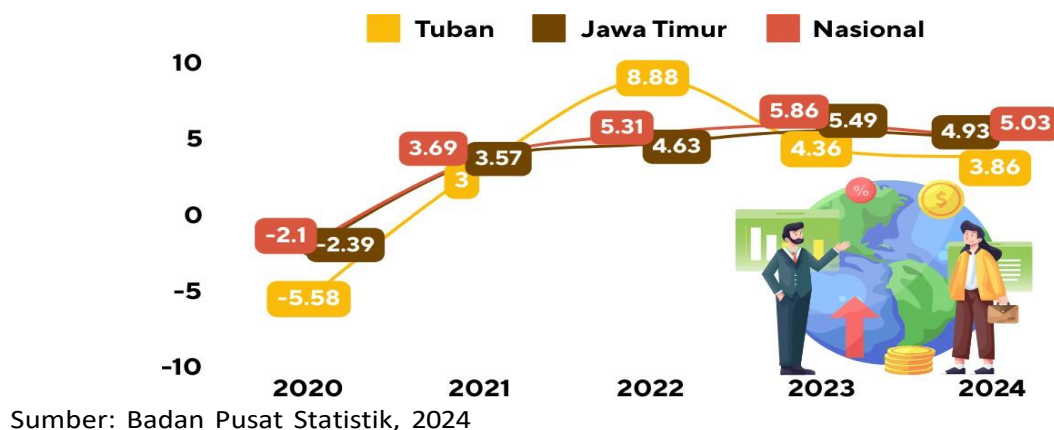
Dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tuban, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Tuban didominasi oleh penduduk usia muda atau dewasa, yakni mengelompok pada usia 15-49 tahun. Namun jika diamati pada piramida penduduk, penduduk berusia di bawah 15 tahun masih terlihat membesar, terutama pada kelompok usia 5-14 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berusia 0-4. Hal tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja yang besar.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, termasuk kondisi seni budaya dan olah raga yang ada di Kabupaten Tuban. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tuban.

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi, sehingga PDRB Kabupaten Tuban dapat menggambarkan ukuran ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban mengalami fluktuatif selama tahun 2020-2024.

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban

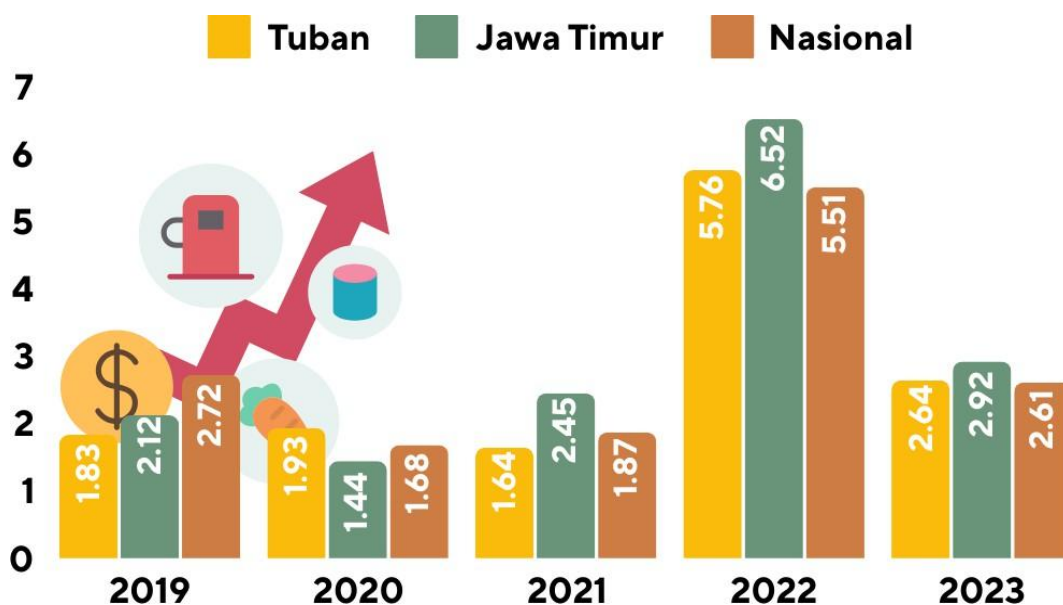


Pada 2020 laju pertumbuhan baik Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional mengalami penurunan, di Tuban laju pertumbuhan PDRB menurun sebesar -5,58. Kemudian di tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tuban mengalami peningkatan Kembali sebesar 3%. Pada tahun 2022 Kabupaten Tuban melesat pada angka 8,88% tertinggi di Provinsi Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2023 mencatatkan angka 4,36%. Tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban turun menjadi 3,86%, penurunan ini juga terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

B. Laju Inflasi

Perubahan indeks harga implisit adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian. Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa.

Grafik 1.2 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Selama beberapa tahun terakhir, angka tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2019, angkanya 2,12%, kemudian lebih lanjut berkurang menjadi 1,44% pada tahun 2020, dan mencapai 2,45% pada tahun 2021. Tahun 2022 naik mengalami kenaikan yang signifikan, yakni sebesar 6,52% di Provinsi Jawa Timur. Lebih tinggi di bandingkan nasional yang masih di 5,51%, kenaikan ini cukup baik di banding tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah angka nasional. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,92% walaupun masih di atas nasional.

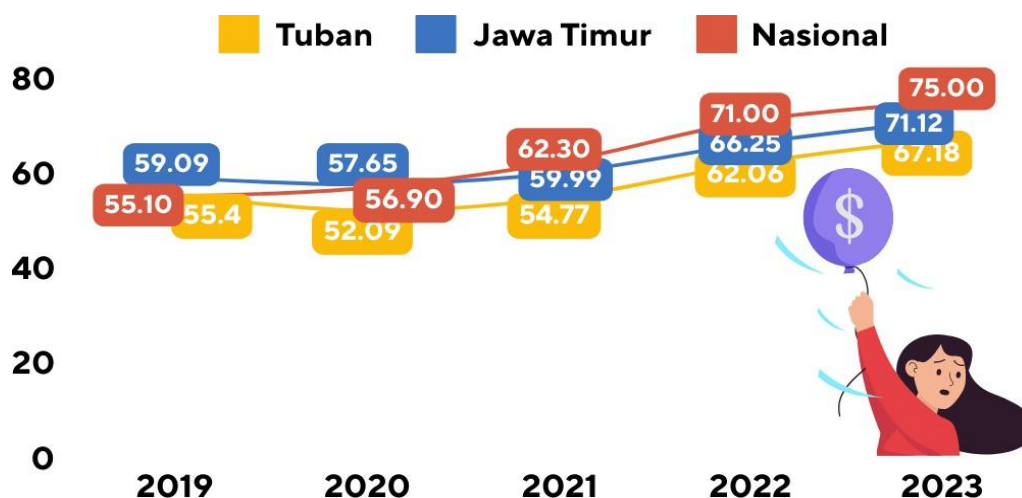
Penurunan tingkat inflasi tersebut dapat di distribusikan kepada berbagai faktor yang mempengaruhi perekonomian. Diantara faktor-faktor tersebut adalah peningkatan permintaan, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, dan kendala produksi yang terbatas. Perubahan ini mencerminkan dinamika kompleks yang memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan barang konsumsi di wilayah tersebut.

C. PDRB Per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang mencerminkan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita ini menggambarkan nilai ekonomi per individu atau per penduduk dalam suatu daerah dan diukur berdasarkan harga yang berlaku. Analisis perkembangan data lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk memperlihatkan tren positif dalam PDRB per Kapita Kabupaten Tuban selama periode 2019-2023.

Selama tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Tuban mencapai Rp 52,09 juta (dalam JutaRupiah), menunjukkan adanya penurunan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi dan sosial. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021, dengan PDRB per kapita sebesar 54,77 juta Rupiah, namun pada tahun 2022 tercatat adanya peningkatan kembali menjadi 62,06 juta Rupiah. Sudah melebihi level tahun 2019, peningkatan PDRB pada tahun 2022 memberikan indikasi positif terhadap pemulihan perekonomian setelah dampak pandemi. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 67,18 juta. Apabila dibandingkan dengan tingkat PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, PDRB per Kapita Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika.

Grafik 1.3 Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2024

D. Indeks Gini

Koefisien Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Ratio, merupakan salah satu metrik yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu populasi. Koefisien Gini mendasarkan diri pada konsep kurva Lorenz, yang merupakan sebuah grafik pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu, seperti pendapatan, dengan distribusi uniform yang mencerminkan persentase kumulatif penduduk.

Indeks Gini diukur dalam rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks Gini mencerminkan tingkat pemerataan yang sempurna, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi dengan sangat merata di antara seluruh populasi. Sebaliknya, semakin besar nilai Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Dengan kata lain, nilai Gini yang mendekati 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Jadi, Indeks Gini yang berada pada rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu) memberikan gambaran sejauh mana distribusi pendapatan di suatu masyarakat dapat dianggap merata atau tidak merata. Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang sempurna.

Penilaian terhadap tingkat ketimpangan menggunakan Gini Rasio mengacu pada

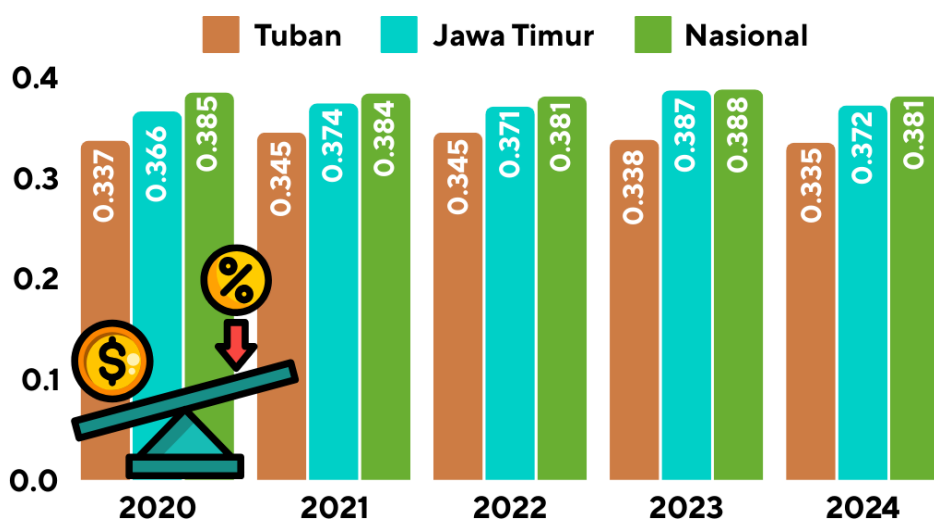
standar tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam kriteria yang dikemukakan oleh Hera Susanti dan rekan-rekannya dalam buku "Indikator-Indikator Makro Ekonomi" (LPEM-FEUI, 1995). Menurut standar ini, Gini Rasio (GR) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai yang diperoleh:

- Jika nilai GR < 0.3 , maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.
- Apabila nilai GR $0.3-0.5$, maka tingkat ketimpangan tersebut masuk dalam kategori sedang atau moderat.
- GR > 0.5 mengindikasikan ketimpangan tinggi.

Dengan pendekatan ini, setiap nilai Gini Rasio dapat dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketimpangan yang terkait. Standar penilaian ini memberikan pedoman untuk menginterpretasikan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu populasi dianggap memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, sedang, atau tinggi.

Perbandingan Indeks Gini atau Gini Ratio antara tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Tuban dengan pencapaian yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan secara keseluruhan tingkat nasional pada periode tahun 2020-2024 dapat divisualisasikan melalui ilustrasi grafik berikut ini:

Grafik 1.4 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Grafik diatas memberikan gambaran perbandingan indeks Gini, yang mencerminkan sejauh mana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban bersaing dengan Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional selama periode yang

disebutkan. Analisis perbandingan ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai distribusi pendapatan di tingkat lokal Kabupaten Tuban dalam konteks lebih luas dari tingkat regional dan nasional.

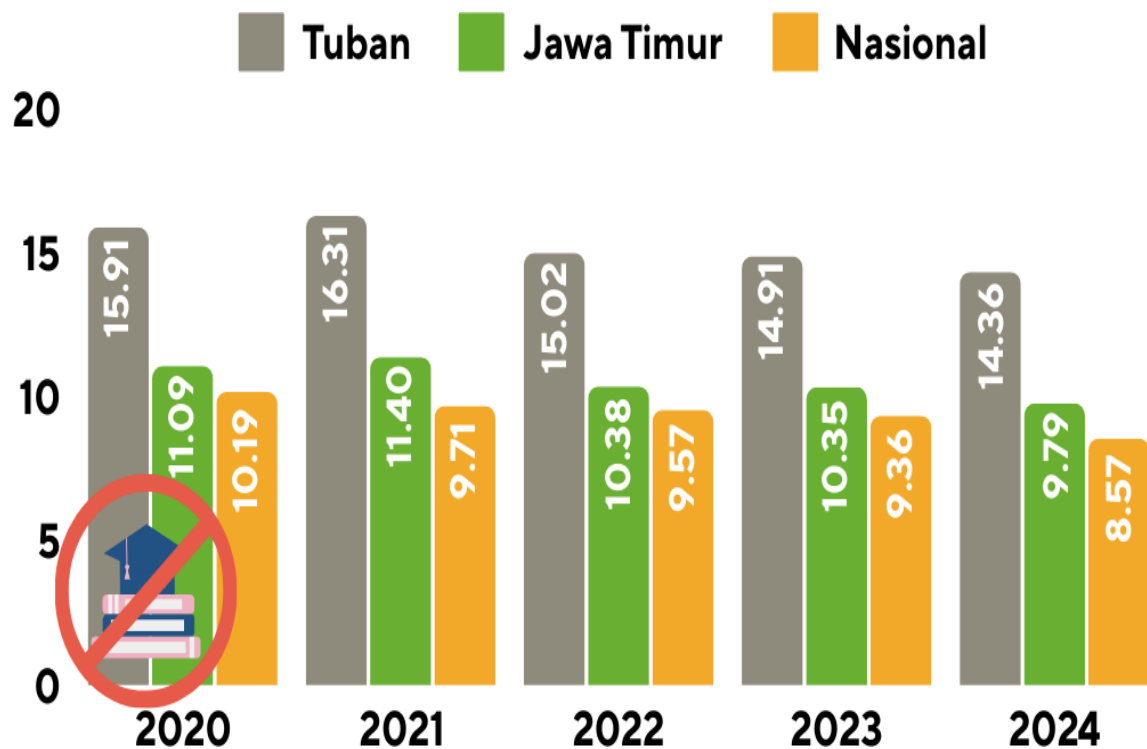
Berdasarkan data yang tertera, dapat disimpulkan bahwa Gini Ratio Kabupaten Tuban menunjukkan kestabilan pada kisaran 0,3. Perlu ditekankan bahwa prestasi Gini Ratio Kabupaten Tuban secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional. Hal ini menandakan upaya yang berhasil dilakukan oleh Kabupaten Tuban dalam mengelola ketimpangan distribusi pendapatan dengan lebih baik.

E. Persentase Penduduk Kemiskinan

Garis kemiskinan berperan sebagai suatu ambang batas yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok miskin atau tidak miskin. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri mencerminkan biaya yang harus dibayar oleh kelompok referensi untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, serta kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Perlu diingat bahwa nilai garis kemiskinan tidak selalu konstan setiap tahunnya, mengingat kebutuhan hidup manusia yang cenderung berubah seiring waktu dan meningkat sejalan dengan kenaikan harga barang serta inflasi.

Berdasarkan data dari BPS, selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban berkurang sekitar 6,01 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 3,51 persen, yaitu dari 177,25 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 171,24 ribu jiwa pada Maret 2024. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,55% poin, yaitu dari 14,91% pada Maret 2023 menjadi 14,36% pada Maret 2024. Untuk gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat pada grafik berikut.

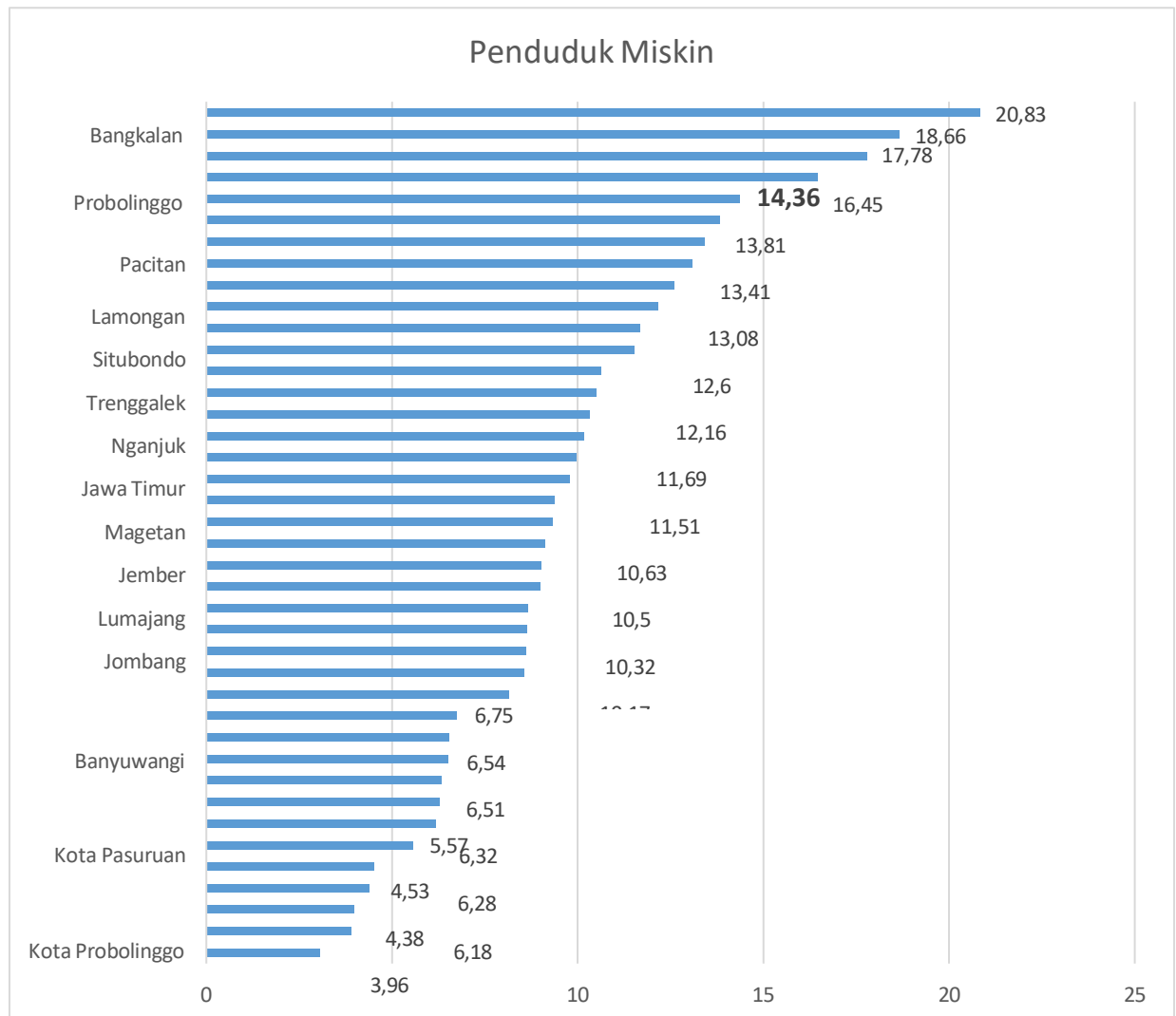
Grafik 1.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban dapat dianggap relatif tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada di peringkat 5 terbawah dalam hal persentase penduduk miskin jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi tersebut. Pada perbandingan ini, data menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban menghadapi tantangan signifikan dalam menangani masalah kemiskinan dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur. Perlu dicatat bahwa peringkat ini dapat memberikan gambaran mengenai urgensi dan prioritas dalam pengembangan kebijakan dan program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Grafik 1.6 Persentase Penduduk Miskin Daerah Tahun 2024



Sumber: BPS Jawa Timur, BPS Tuban, Tahun 2024

Keadaan seperti yang telah diuraikan di atas memberikan catatan yang signifikan bagi Kabupaten Tuban. Ini mengindikasikan perlunya komitmen dan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan. Adanya peringkat yang menunjukkan tingkat penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur menegaskan perlunya fokus dan intensifikasi program serta kegiatan yang dapat efektif mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Pemerintah Daerah diharapkan dapat merancang dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang lebih kuat, sehingga dapat mencapai dampak positif yang berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mewakili suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Meskipun pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor krusial dalam perkembangan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan secara otomatis akan berdampak positif terhadap peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam konteks ini, terdapat tiga komponen utama yang dianggap sangat berperan dalam proses pembangunan, yakni umur panjang dan sehat, perolehan serta pengembangan pengetahuan, dan peningkatan akses menuju kehidupan yang lebih baik. IPM dihasilkan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, mencakup indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara pengembangan manusia dan peningkatan kapabilitas individu. Perkembangan IPM di Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 1.7 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2024

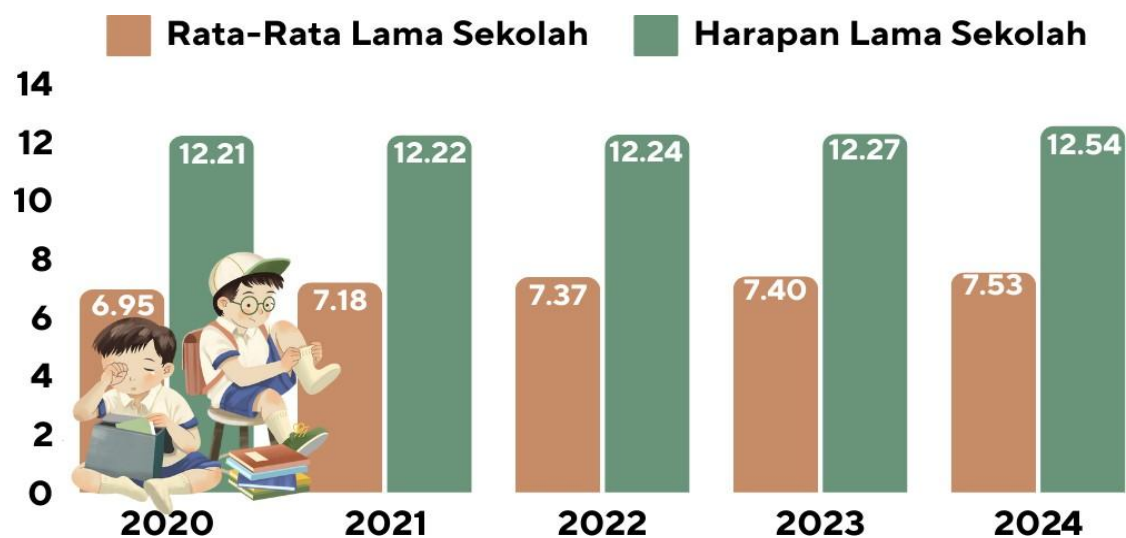


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Tuban rata-rata meningkat sebesar 0,96 persen per tahun, dari 69,6 pada tahun 2020 menjadi 72,31 pada tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan IPM, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Tuban. Pembangunan manusia diukur melalui komponen pembangunan manusia, termasuk dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi daya beli. Peningkatan dimensi pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Grafik 1.8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabuapten Tuban Tahun 2020 – 2024

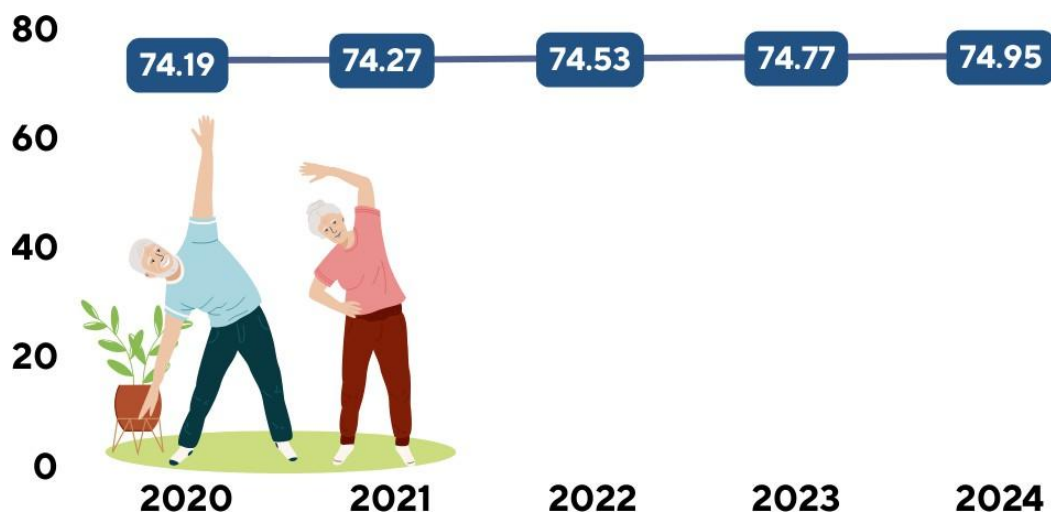


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tuban memiliki tren kenaikan untuk beberapa tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, HLS Kabupaten Tuban rata-rata meningkat 0,67 persen per tahun, sementara RLS meningkat 2,03 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,13 tahun (2,20 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (2,12 persen). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hingga tahun 2024, penduduk dengan usia 25 tahun ke atas, secara rata-rata, telah menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Peningkatan dimensi pendidikan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban. Seiring dengan itu, dimensi kesehatan juga menjadi fokus dengan mengamati angka harapan hidup, dengan harapan dapat meningkatkan pendekatan promotif dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tuban.

Grafik 1.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Tahun 2025

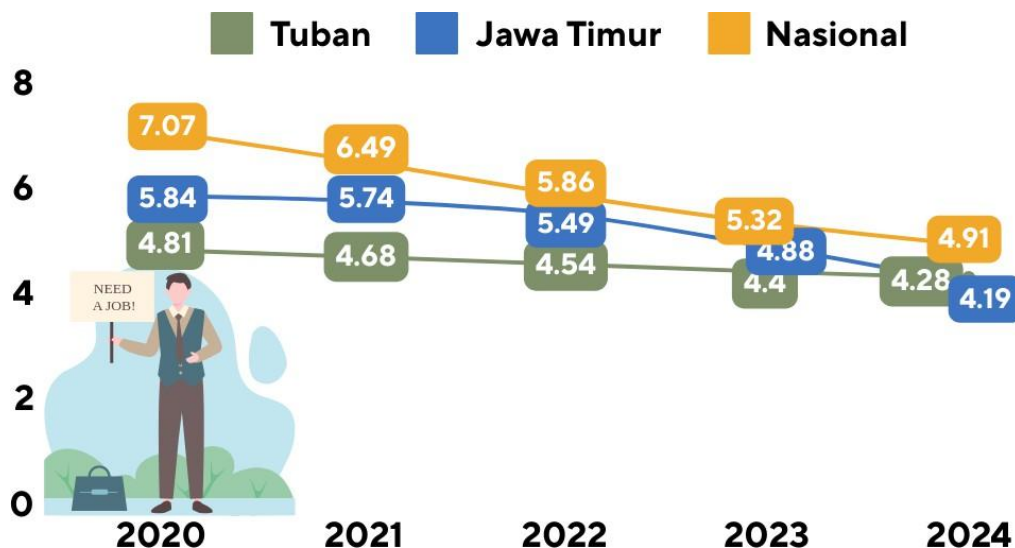
Usia harapan hidup di Kabupaten Tuban dapat dikategorikan sebagai tingkat yang cukup baik. Dari data yang tergambar sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Selama periode 2021 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,76 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Tuban adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,95 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,18 tahun (0,24 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (0,26 persen per tahun). Hal ini mencerminkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Tuban memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Upaya peningkatan dimensi kesehatan dengan meningkatkan angka harapan hidup sejalan dengan langkah-langkah dalam mengembangkan iklim pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melalui peningkatan daya beli masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Tuban.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Rasio persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja merupakan indikator kritis dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kabupaten Tuban mencapai tingkat pengangguran terbuka yang lebih baik daripada capaian tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi maupun Nasional, menunjukkan performa yang positif. Meskipun tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, permasalahan pengangguran tetap merupakan isu signifikan yang perlu

mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengatasi permasalahan pengangguran menjadi prioritas utama untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan lapangan kerja.

Grafik 1.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan nilai TPT sebesar 4,28 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai, atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. Nilai TPT Tuban pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Pola penganggur di Kabupaten Tuban menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, yaitu 4,36 persen berbanding 4,16 persen. TPT lakilaki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2023 sebesar 0,20 persen poin. Demikian pula dengan TPT perempuan pada Agustus 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2022 sebesar 1,18 persen poin.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam Pemerintahan, sumber daya manusia lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif (agile) sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat di Kabupaten Tuban.

Kelembagaan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dibentuk dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam tahun 2025 struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut: :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan bidang lingkungan hidup, serta bidang kehutanan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
12. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
14. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan paling banyak 4 (empat) bidang melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Penanggulangan Bencana.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Kenduruan, dengan tipe A;
2. Kecamatan Jatirogo, dengan tipe A;

3. Kecamatan Bangilan, dengan tipe A;
4. Kecamatan Bancar, dengan tipe A;
5. Kecamatan Senori, dengan tipe A;
6. Kecamatan Tambakboyo, dengan tipe A;
7. Kecamatan Singgahan, dengan tipe A;
8. Kecamatan Kerek, dengan tipe A;
9. Kecamatan Parengan, dengan tipe A;
10. Kecamatan Montong, dengan tipe A;
11. Kecamatan Soko, dengan tipe A;
12. Kecamatan Jenu, dengan tipe A;
13. Kecamatan Merakurak, dengan tipe A;
14. Kecamatan Rengel, dengan tipe A;
15. Kecamatan Semanding, dengan tipe A;
16. Kecamatan Tuban, dengan tipe A;
17. Kecamatan Plumpang, dengan tipe A;
18. Kecamatan Palang, dengan tipe A;
19. Kecamatan Widang, dengan tipe A; dan
20. Kecamatan Grabagan, dengan tipe A.

1.4 Jumlah ASN (PNS/PPPK)

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pada Tahun 2025, pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tercatat sejumlah 10.904 orang, yang terdiri dari 5.563 orang PNS, PPPK sebanyak 4648 orang dan 692 orang PPPK Paruh Waktu. Adapun data Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Golongan

Golongan PNS		Laki-laki	Perempuan
IVa-IVe	:	519	639
IIIa-IIIId	:	1315	2314
IIa-IIId	:	515	250
Ia-Id	:	11	0

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Golongan

Golongan PPPK		Laki-laki	Perempuan
V	:	229	80
VII	:	119	449
IX	:	1251	2284
X	:	104	127
XI	:	2	3

Tabel 1.5 Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Golongan

Berdasarkan Pendidikan		Laki-laki	Perempuan
S3	:	3	2
S2	:	307	279
S1/DIV	:	2738	4776
DI-DIII	:	294	1018
SMA	:	1064	337
SMP	:	40	7
SD	:	37	2

Tabel 1. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan Golongan

Berdasarkan Jabatan		Laki-laki	Perempuan
JPT	:	17	4
Administrator	:	79	31
Pengawas	:	131	96
Fungsional Guru	:	1888	3720
Fungsional Kesehatan	:	376	1303
Fungsional Teknis	:	462	486
Pelaksana	:	1530	781

1.5 Permasalahan Isu Strategis Pemerintah Daerah

Berbagai masalah pembangunan daerah serta isu-isu eksternal, baik internasional, nasional, maupun regional, yang memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di masa depan, selanjutnya akan diangkat sebagai isu pembangunan daerah. Suatu

isu akan dikategorikan sebagai isu strategis pembangunan daerah jika memiliki tingkat prioritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sedang direncanakan. Bab ini membahas berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Tuban, analisis isu-isu internasional, nasional, dan regional yang berdampak pada Pembangunan daerah, serta merumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban untuk periode 2025-2029.

A. Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Permasalahan pembangunan daerah secara makro merujuk pada tantangan fundamental yang bersifat menyeluruh dan saling berkaitan, yang menghambat kemajuan suatu wilayah dalam skala besar. Di Indonesia, masalah ini biasanya berakar pada struktur ekonomi, geografi, dan tata kelola. Berikut adalah beberapa permasalahan utama pembangunan daerah secara makro :

- 1) Pendapatan per kapita masih berada dibawah Jawa Timur dan Nasional;
- 2) Adanya ketimpangan pendapatan dan kesenjangan Pembangunan infrastruktur antar wilayah;
- 3) Kesejahteraan petani masih relatif rendah, padahal Kabupaten Tuban merupakan lumbung pangan yang berkontribusi besar pada ketahanan pangan regional maupun Nasional;
- 4) Meningkatnya angka pengangguran;
- 5) Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi diatas Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
- 6) Kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan;
- 7) Masih adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan, anak dan perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya serta implementasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 8) Ancaman risiko bencana yang relatif tinggi;
- 9) Ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup seiring peningkatan aktivitas ekonomi Masyarakat;
- 10) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta pelayanan public;dan
- 11) Belum optimalnya pengelolaan keuangan Daerah dan kemandirian fiskal Daerah.

B. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;dan
- 2) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

1.6 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
- 2) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- 4) Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Kabupaten

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Tahun 2025 merupakan masa transisi karena di tahun ini ada 2 (dua) RPJMD yang dipergunakan. Awal tahun 2025 menggunakan RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan akhir tahun menggunakan RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga dokumen perencanaannyapun menggunakan dua RPJMD tersebut.

2.2 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai visi : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan dengan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
1	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	Sub Kategori Perumusan ILH: 1. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup : Kebencanaan, Pencemaran Lingkungan Hidup 2. Sarana Kawasan : Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Peribadatan, Fasilitas Perdagangan & Jasa, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik, Sarana Rekreasi & Pariwisata, Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sarana Olahraga, Sarana Kesenian dan Kebudayaan 3. Prasarana Kawasan: Prasarana Kebersihan, Prasarana Air Bersih, Prasarana Air Kotor/Limbah, Prasarana Energi, Prasarana Penanganan Banjir 4. Transportasi: Angkutan Publik, Jalan, Fasilitas Kelalulintasan Rumus : ILH = (Skor ketahanan bangunan x 0,35) + (Skor Luas per kapita x 0,35) + (Skor air minum x 0,15) + (Skor sanitasi x 0,15)	BPS
1,1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran Bapperida dengan komponen Variabel pengukuran : a. Transportasi b. Prasarana Sumber Daya Air c. Prasarana Sanitasi d. Prasarana Energi dan Telekomunikasi e. Prasarana Sosial Perumahan dan Pemukiman	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
1,2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. Formulasi : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
1,3	Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota, sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard). Formulasi : $R = H \times V/C$ R = Resiko Bencana H = Hazard Threat (Ancaman) V = Vulnerability (Kerentanan) C = Capacity (Kapasitas)	BNPB
1,4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	Indeks dibentuk dari toleransi, kesetaraan dan kerjasama, merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedapkan superioritas. Komponen Variabel pengukuran sebagai berikut : - Toleransi Sosial - Toleransi Politik - Toleransi Agama - Toleransi Budaya/Kultur	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatkan daya saing dan daya sanded (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$(PDRB \text{ Tahun } N - PDRB \text{ Tahun } N-1) / PDRB \text{ Tahun } N-1 \times 100\%$	BPS
		Tingkat Kemiskinan	$P(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,...,q), yi < z q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan	BPS

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
			n = jumlah penduduk	
		Gini Ratio	$\text{Gini Ratio} = 1 - \sum_{i=1}^K \frac{P1(Q1-Q1-1)}{10.000}$ P1 = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i Q1 = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i K = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk	BPS
		Indeks Williamson	$VW = \frac{\sqrt{\sum(Yi-Y)^2 \cdot \frac{fi}{n}}}{Y}$ VW : Indeks Williamson Yi : Pendapatan per kapita wilayah ke-i (misal: PDRB per kapita Kabupaten A) Y : Rata-rata pendapatan per kapita seluruh wilayah (rata-rata nasional/provinsi) f : Jumlah penduduk wilayah ke-i n : Total jumlah penduduk seluruh wilayah	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka = Jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100%	BPS
2,1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	BPS
		PDRB Sektor Industri Pengolahan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri Pengolahan	BPS
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	BPS
2,2	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan	
		PDRB Per kapita	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	BPS
2,3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota/ (jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota) X 100%	DPMPSTP
3	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia : merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. $IPM = \sqrt{Ik+Ip+I_{peng}} \times 100$ Keterangan : Ik = Indeks Pendidikan dari RLS dan HLS Ip = Indeks pendidikan dari UHH Ipeng = Indeks pengeluaran dari rata-rata pengeluaran per kapita	BPS
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan	BPS
3,1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang menggambarkan tingkat literasi suatu daerah	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)
		Indeks Pendidikan	Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah	BPS
3,2	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir/ derajat Kesehatan suatu masyarakat	BPS
3,3	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	Indeks Ketahanan Pangan	Akumulasi nilai 7 prioritas: 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Bobot : 6%)	Badan Pangan Nasional (Bapanas)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
			2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (Bobot : 6%) 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (Bobot : 7,5%) 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (Bobot : 10,5%) 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (Bobot : 21%) 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (Bobot : 35%) 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (Bobot : 14%) IKP terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	
3,4	Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{Indeks\ Partisipasi\ Politik + Indeks\ Partisipasi\ Ekonomi + Indeks\ Pendapa}{3}$ Indeks Partisipasi Politik = Persentase kursi yang diduduki perempuan di legislatif (DPR/DPRD) Indeks Partisipasi Ekonomi = Persentase perempuan yang bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, dan teknisi Indeks Pendapa = Estimasi proporsi pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki	BPS
4	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilainya = Nilai RB general + Nilai RB tematik Keterangan: 1. RB General (100%) - Strategi Pelaksanaan RB General (10%) - Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40%) - Capaian Sasaran Strategis RB (50%) 2. RB Tematik (10%)	Kemenpan-RB
4,1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	$IKF = \frac{(Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD))}{Total\ Pendapatan\ daerah - PAD}$	BPK
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	$IPKD = \sum_{i=1}^6 (Skor\ Dimensi - i \times Bobot - i)$ Dimensi Utama IPKD: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran: Mengukur sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD: Melihat proporsi belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Ketersediaan dokumen anggaran di situs resmi (website) pemerintah daerah. Penyerapan Anggaran: Rasio antara realisasi belanja dengan anggaran yang tersedia. Kondisi Keuangan Daerah: Mengukur rasio kemandirian fiskal dan pertumbuhan pendapatan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan (WTP, WDP, dll).	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
		Indeks Kapasitas Fiskal	$KF = (PAD + TKD + Lain-lain\ Pendapatan\ sah) - (Belanja\ Pegawai + Belanja\ Terikat)$ - Pendapatan Daerah : Total semua pemasukan (PAD + Dana Transfer dari Pusat). - Belanja Terikat : Pengeluaran yang "sudah dikunci" atau wajib dikeluarkan (Gaji Pegawai/ASN, bagi hasil ke desa, dan kewajiban bunga hutang)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi/Keterangan	Sumber Data
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Penilaian Akuntabilitas kinerja Daerah dari Kemenpan RB Komponen SAKIP: 1. Perencanaan kinerja bobot 30% 2. Pengukuran kinerja bobot 30% 3. Pelaporan kinerja bobot 15% 4. Evaluasi internal bobot 10% 5. Capaian Kinerja bobot 20%	Kemenpan-RB
4,2	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kearsipan Daerah	Hasil penilaian terhadap Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Arsip Nasional Republik Indonesia
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain	Kemenpan-RB
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	BKN
		Indeks Inovasi	Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Kemendagri
4,3	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah	Kemenpan-RB

2.3 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanggal 20 Pebruari 2025, maka disusunlah RPJMD baru yang kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Nommor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yang mempunyai misi : “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Mewujudkan Kabupaten Tuban layak huni	1 Indeks Layak Huni (ILH) (Angka)	Sub Kategori Perumusan ILH: 1. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup : Kebencanaan, Pencemaran Lingkungan Hidup 2. Sarana Kawasan : Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Peribadatan, Fasilitas Perdagangan & Jasa, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik, Sarana Rekreasi & Pariwisata, Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sarana Olahraga, Sarana Kesenian dan Kebudayaan	BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			3. Prasarana Kawasan: Prasarana Kebersihan, Prasarana Air Bersih, Prasarana Air Kotor/Limbah, Prasarana Energi, Prasarana Penanganan Banjir 4. Transportasi: Angkutan Publik, Jalan, Fasilitas Kelalulintasan Rumus : $ILH = (\text{Skor ketahanan bangunan} \times 0,35) + (\text{Skor Luas per kapita} \times 0,35) + (\text{Skor air minum} \times 0,15) + (\text{Skor sanitasi} \times 0,15)$	
1	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (angka)	$IKLI = \frac{KK\ IKLI + KF\ IKLI + KL\ IKLI}{3}$ Keterangan : IKLI : Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur KK IKLI : Nilai Kualitas Ketersediaan Infrastruktur KF IKLI : Nilai Kualitas Fisik Infrastruktur KL IKLI : Nilai Kualitas Layanan Infrastruktur	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	Penghitungan IKLH dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan/atau IKL) yang dikalikan dengan masing-masing bobot indeks sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Nasional. Perhitungan IKLH Nasional dilakukan dengan cara menghitung masing-masing komponen indeks secara nasional (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan dengan bobot (koefisien) masing-masing provinsi dan penjumlahan proporsi masing-masing komponen indeks di semua provinsi Formulasi : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		3. Penurunan Emisi GRK kumulatif (Ton CO2-eq)	Nilai total penurunan emisi GRK sampai dengan tahun n	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah serta percepatan pengentasan kemiskinan	2 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu	BPS
		3 Tingkat kemiskinan (%)	$P(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,..., q),	BPS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan		$y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	
		4 Laju pertumbuhan ekonomi (%)	(PDRB Tahun N – PDRB Tahun N-1) / PDRB Tahun N-1 x 100%	BPS
		5 Rasio Gini (Indeks)	$\text{Gini Rasio} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P1(Q1+QI-1)}{10.000}$ P1 = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i Q1 = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i K = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk Nilai rasio gini, merupakan ukuran ketimpangan menurut kelompok pendapatan, yang direflesikan dengan nilai antara 0 sampai dengan 1 Nilai indeks gini yang mendekati 0 menunjukkan penyebaran pendapatan merata sementara indeks gini yang mendekati 1 menunjukan penyebaran pendapatan yang tidak merata/ketimpangan pendapatan semakin besar.	BPS
		6 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi (%)	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi = Nilai PDRB ADHB Kabupaten / Nilai PDRB ADHB Provinsi X 100%	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kemandirian desa dan ketahanan pangan	7 Persentase Desa mandiri (%)	Jumlah Desa Mandiri Pada Kabupaten / Jumlah Seluruh Desa Pada Kabupaten x 100%	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT)
		8 Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Akumulasi nilai 7 prioritas: 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Bobot : 6%) 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (Bobot : 6%) 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (Bobot : 7,5%) 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (Bobot : 10,5%) 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (Bobot : 21%)	Badan Pangan Nasional

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (Bobot : 35%) 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (Bobot : 14%) IKP terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	
	3 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	9 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka = Jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100%	BPS
		10 Rasio Kewirausahaan (%)	(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan
		11 Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ Keterangan : NTP = Nilai Tukar Petani It = Indeks harga yang diterima petani Ib = Indeks harga yang dibayar petani	BPS
	4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	12 Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Pembobotan IKESOS: 1. Dimensi Kebutuhan Dasar (27%) : Pangan, Kesehatan, Jaminan Sosial, Tempat Tinggal, Pendidikan, Physical Mobility, Rasa Aman 2. Dimensi Peranan Sosial (31%): Partisipasi Kohesi Sosial, Kelembagaan Inklusif 3. Dimensi Keberdayaan Ekonomi (42%): Partisipasi Ekonomi, Utilitas/Daya Guna, Ketahanan Ekonomi	Kementerian Sosial
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia : merupakan indikator keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia $IPM = \sqrt[3]{I_k + I_p + I_{peng}} \times 100$ Keterangan : Ik = Indeks Pendidikan dari RLS dan HLS Ip = Indeks pendidikan dari UHH Ipeng = Indeks pengeluaran dari rata-rata pengeluaran per kapita	BPS
	1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	13 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (RLS) (Tahun)	$Rata - rata Lama Sekolah 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P ₁₅₊ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x _i = Lama sekolah penduduk ke- i	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
		14 Harapan lama sekolah (HLS) (Tahun)	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Dinas Pendidikan
		15 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PerpusnasRI
		16 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi = (Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki Ijazah, STTB Perguruan Tinggi / Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun T) x 100%	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
10	2 Terwujudnya kesehatan berkualitas yang merata	17 Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	UHH = Jumlah umur orang meninggal (tahun n) / Jumlah orang meninggal (tahun n)	BPS
11	3 Meningkatnya Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	18 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	Perbandingan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan	BPS
12	4 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	19 Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	IHA ini menggunakan WELLBEING Metodologi, yg melihat dari aspek - PERSEPSI – PARTISIPASI - AKSEPTABILITAS. Variabel Dimensi & INDIKATOR 1. HARMONI EKONOMI (30%) : Ketersediaan dan aksesibilitas pangan, Keadilan dan Kesejahteraan 2. HARMONI SOSIAL (23%): Pluralisme, Pendidikan, Kewarganegaraan 3. HARMONI BUDAYA / CULTURAL (22%): Akulturasi, Keberagaman, Kearifan Lokal 4. HARMONI RELIGIUS (25%): Toleransi, Kerjasama, Kesetaraan	Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama (Balitbangdiklat Kemenag)
4	Mewujudkan Pemerintahan Yang Adaptif Dan Melayani	5 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Nilainya = Nilai RB general + Nilai RB tematik Keterangan: 1. RB General (100%) - Strategi Pelaksanaan RB General (10%)	Kemenpan-RB

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel		- Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40%) - Capaian Sasaran Strategis RB (50%) 2. RB Tematik (10%)	
		20 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Daerah (Poin)	Penilaian Akuntabilitas kinerja Daerah dari Kemenpan RB Komponen SAKIP: 1. Perencanaan kinerja bobot 30% 2. Pengukuran kinerja bobot 30% 3. Pelaporan kinerja bobot 15% 4. Evaluasi internal bobot 25%	Kemenpan-RB
		21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Opini Laporan Keuangan	Penilaian BPK
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	22 Survei Penilaian Integritas (SPI)	Variabel yang digunakan : 1. Indeks Penilaian Internal 2. Indeks penilaian Eksternal 3. Indeks Penilaian Ekspert 4. Prevalensi Korupsi 5. Integritas Pelaksanaan SPI	Penilaian KPK
		23 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Angka)	RKFD = Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) / Belanja Pegawai	Penilaian Kementerian Keuangan
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	24 Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	(Realisasi PAD Tahun N – Realisasi PAD Tahun N-1) / Realisasi PAD Tahun N-1 x 100%	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		25 Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, dengan instrumen meliputi : - Kebijakan Pelayanan - Profesionalisme SDM - Sarana dan Prasarana - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) - Konsultasi dan Pengaduan - Inovasi Pelayanan	Penilaian Kemenpan-RB
		26 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	9 Unsur Penilaian IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifik Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana	Hasil Survei Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
			8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana	
		27 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	Indeks Pemdi terdapat 9 aspek penilaian: 1. Strategi dan Rencana (5%) 2. Tata Kelola dan Manajemen (5%) 3. Teknologi Digital (20%) 4. Audit Teknologi Digital (6%) 5. Keamanan Siber (9%) 6. Kapabilitas dan Budaya Digital (10%) 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (10%) 8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (15%) 9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (20%)	Penilaian Kemenpan-RB

Terdapat beberapa perubahan sasaran dan indikator jika dibandingkan antara RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa penyesuaian dengan visi dan misi Bupati pada periode tahun 2025-2029. Akan tetapi secara garis besar misi dari kedua RPJMD adalah sama, yaitu misi I : terkait infrastruktur, misi II : terkait perekonomian, misi III : terkait sumberdaya sedangkan misi IV : terkait pemerintahan.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

Pada awal tahun Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan penetapan kinerja dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Penilaian ini untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	78,85
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,75
3	Berkurangnya resiko bencana	3. Indeks Resiko Bencana	121
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,81
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85
		6. PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,91
		7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12
6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8. Tingkat Inflasi Daerah	1-2
		9. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8272
		10. PDRB Per Kapita	58.310 .000
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3,5
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12. Indeks Pendidikan	0,62
		13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,85
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	0,845
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15. Indeks Ketahanan Pangan	90

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,47
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2580
		18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,75
		19. Indeks Kapasitas Fiskal	1,8
		20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	80,5
13	Birokrasi yang kapabel	21. Indeks Kearsipan Daerah	88,31
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,25
		23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	82,00
		24. Indeks Inovasi	68
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	4,47

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.662.163.288.478	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	186.920.229.821,84	APBD/DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	688.445.100	APBD
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	128.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.584.690	APBD
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.813.186.131	APBD/DAK/ DBHCHT
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	717.997.000	APBD/DAK
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	187.963.000	APBD/DAK
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	790.489.634	APBD/DAK
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	65.348.100.000	APBD/DAK
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.513.908.500	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
12	Program Penataan Bangunan Gedung	3.291.570.000	APBD
13	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	500.000.000	APBD
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.700.190.000	APBD/DAK
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	39.900.000.000	APBD
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	118.509.369.932,02	APBD
17	Program Penyelenggaraan Jalan	208.688.780.000	APBD/DAK
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.472.918.800	APBD
19	Program Pengembangan Perumahan	30.000.000	APBD
20	Program Kawasan Permukiman	4.982.500.000	APBD
21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	21.000.000.000	APBD
22	Program Penanggulangan Bencana	4.551.889.321	APBD
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	874.741.910	APBD
24	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.327.088.210	APBD/DBHCHT
25	Program Pemberdayaan Sosial	647.608.824	APBD
26	Program Rehabilitasi Sosial	10.973.896.128	APBD
27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	20.854.597.862	APBD
28	Program Penanganan Bencana	241.215.623	APBD
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.377.260	APBD
30	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.623.000.680	APBD/DBHCHT
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.059.409.108	APBD/DBHCHT
32	Program Hubungan Industrial	2.646.175.800	APBD
33	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	393.818.670	APBD
34	Program Perlindungan Perempuan	173.673.424	APBD
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	206.496.300	APBD
36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	376.206.920	APBD
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	125.515.000	APBD
38	Program Perlindungan Khusus Anak	213.919.372	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
39	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.290.500.000	APBD
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan	130.000.000	APBD
41	Program Pengawasan Keamanan Pangan	120.000.000	APBD
42	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.722.474.149	APBD
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	396.719.000	APBD
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	35.000.000	APBD
45	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	176.656.952	APBD
46	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	795.000.000	APBD
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	73.600.000	APBD
48	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	111.300.000	APBD
49	Program Pengelolaan Persampahan	27.465.000.000	APBD
50	Program Pendaftaran Penduduk	1.706.784.920	APBD
51	Program Pencatatan Sipil	205.757.966	APBD
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	756.881.930	APBD
53	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	76.231.580	APBD
54	Program Penataan Desa	182.274.600	APBD
55	Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa	94.050.000	APBD
56	Program Administrasi Pemerintah Desa	8.040.551.815	APBD
57	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.299.066.637	APBD
58	Program Pengendalian Penduduk	459.400.000	APBD/DAK
59	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.658.255.000	APBD/DAK
60	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.288.300.000	APBD/DAK

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	76.930.947.760	APBD
62	Program Pengelolaan Pelayaran	49.000.000	APBD
63	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.655.320.852	APBD
64	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.348.201.616	APBD
65	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.700	APBD
66	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.199.591.808	APBD
67	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	209.199.000	APBD
68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.131.036.150	APBD
69	Program Pengembangan UMKM	830.000.000	APBD
70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	466.350.000	APBD
71	Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	APBD
72	Program Pelayanan Penanaman Modal	432.486.800	APBD
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	327.258.000	APBD
74	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	195.867.000	APBD
75	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.518.000.000	APBD
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.457.902.109	APBD
77	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	APBD
78	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	272.910.640	APBD
79	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	235.107.903	APBD
80	Program Pengembangan Kebudayaan	1.416.155.000	APBD
81	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	430.000.000	APBD
82	Program Pembinaan Sejarah	130.000.00	APBD
83	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	APBD
84	Program Pengelolaan Permuseuman	1.032.875.922	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
85	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	75.080.174	APBD
86	Program Pembinaan Perpustakaan	2.126.293.159	APBD
87	Program Pengelolaan Arsip	594.389.702	APBD
88	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	179.043.488	APBD
89	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.316.849.300	APBD
90	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	541.514.250	APBD
91	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	25.000.000	APBD
92	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	430.000.000	APBD
93	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	975.000.000	APBD
94	Program Pemasaran Pariwisata	400.000.000	APBD
95	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	320.000.000	APBD
96	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.591.938.000	APBD
97	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.225.800.000	APBD/DAK/DBHCH T
98	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.536.850.600	APBD/DAK/DBHCH T
99	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.802.100.000	APBD/DAK
100	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	270.000.000	APBD
101	Program Perizinan Usaha Pertanian	37.000.000	APBD
102	Program Penyuluhan Pertanian	3.413.779.500	APBD
103	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.196.949.106,56	APBD
104	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	593.554.162	APBD
105	Program Pengembangan Ekspor	309.424.790	APBD
106	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	268.758.600	APBD
107	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	410.832.730	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
108	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.610.379.676	APBD/DBHCHT
109	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	189.058.920	APBD
110	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	166.554.800	APBD
111	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	39.866.332.920	APBD
112	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.587.105.830	APBD
113	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	52.180.950.669	APBD
114	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.443.430.306	APBD
115	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.772.328.912	APBD
116	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	535.497.936.944	APBD
117	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.646.121.824	APBD
118	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.872.205.710	APBD
119	Program Kepegawaian Daerah	3.935.849.724	APBD
120	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.409.046.000	APBD
121	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.008.854.600	APBD
122	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.861.460.318	APBD
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4.823.484.731	APBD
124	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.323.360.166	APBD
125	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.625.026.155	APBD
126	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	576.213.283	APBD
127	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	552.353.315	APBD
128	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.901.884.191	APBD
129	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.692.468.264	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
130	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.721.811.236	APBD
131	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	165.483.656	APBD
132	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	259.879.076	APBD
	J U M L A H	3.434.337.355.095	

2.5 Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029)

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, maka Review Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	85,35
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85
		3. Penurunan Emisi GRK Kumulatif	46.974,67
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian desa	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,30 - 4,13
		5. Rasio Gini	0,356 - 0,335
		6. Persentase Desa Mandiri	46,95
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja	7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,68 – 4,12
5	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	8. Indeks Ketahanan Pangan	86,41
6	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dan meningkatnya prestasi pemuda	9. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49
		10. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64
		11. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34
7	Terwujudnya kesehatan berkualitas yang merata	12. Usia Harapan Hidup (UHH)	75,2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31
9	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	14. Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	75
10	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	15. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13
		16. Indeks Kapasitas Fiskal	1,433
		17. Opini BPK	WTP
11	Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	18. Indeks Pelayanan Publik	4,47

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.680.804.738.827	PAPBD/ BLUD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	199.243.327.098	PAPBD/ DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	449.183.275	PAPBD
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	67.973.500	PAPBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	22.337.115	PAPBD
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	144.036.834.061	PAPBD/ DBHCHT/ PAJAK ROKOK/ DAK
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	826.771.967	PAPBD/ BK/ DAK
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	169.680.076	PAPBD/DAK
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	794.630.584	BK/ PAJAK ROKOK/ DAK
10	Program Pengendalian Penduduk	444.711.150	PAPBD/ DAK
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.844.955.000	PAPBD/ DAK
12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.102.681.689	PAPBD/ DAK
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	94.972.501.620	PAPBD
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	14.462.210.680	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	Minum		
15	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.834.750.000	PAPBD/ DAK
16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.610.409.300	PAPBD/ DAK
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	73.087.468.000	PAPBD
18	Program Penataan Bangunan Gedung	12.924.635.900	PAPBD
19	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	53.408.376.170	PAPBD
20	Program Penyelenggaraan Jalan	325.993.149.162	PAPBD/ PAJAK ROKOK
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.503.116.930	PAPBD
22	Program Pengembangan Perumahan	104.100.000	PAPBD
23	Program Kawasan Permukiman	4.121.365.153	PAPBD
24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	21.826.775.964	PAPBD/ DBHCHT
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.301.279.378	PAPBD
26	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	826.927.910	PAPBD
27	Program Penanggulangan Bencana	3.943.599.694	PAPBD
28	Program Pemberdayaan Sosial	285.599.186	PAPBD
29	Program Rehabilitasi Sosial	6.077.748.335	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	17.008.704.955	PAPBD/ DBHCHT
31	Program Penanganan Bencana	160.774.901	PAPBD
32	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	107.377.260	PAPBD
33	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	187.273.300	PAPBD
34	Program Perlindungan Perempuan	131.013.352	PAPBD
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	114.021.000	PAPBD
36	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	296.161.478	PAPBD
37	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80.235.944	PAPBD
38	Program Perlindungan Khusus Anak	140.927.078	PAPBD
39	Program Penataan Desa	115.054.800	PAPBD
40	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50.896.030	PAPBD
41	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.146.427.524	PAPBD
42	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.205.341.787	PAPBD
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.720.913.406	PAPBD
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	105.986.242	PAPBD
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	85.587.857	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
46	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.315.818.989	PAPBD
47	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.179.779.175	PAPBD
48	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	11.586.975	PAPBD
49	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	203.334.076	PAPBD
50	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.353.614.911	PAPBD
51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.998.476.583	PAPBD
52	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.641.421.931	PAPBD
53	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	204.231.314	PAPBD
54	Program Perizinan Usaha Pertanian	7.937.500	PAPBD
55	Program Penyuluhan Pertanian	5.305.873.512	PAPBD
56	Program Pendaftaran Penduduk	1.500.427.964	PAPBD
57	Program Pencatatan Sipil	151.003.498	PAPBD
58	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	486.320.183	PAPBD
59	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	56.427.480	PAPBD
60	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.310.704.360	PAPBD
61	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	127.551.600	PAPBD
62	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23.095.027	PAPBD
63	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	113.198.158	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
64	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.706.250	PAPBD
65	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	702.324.165	PAPBD
66	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	44.227.910	PAPBD
67	Program Pengelolaan Persampahan	27.968.193.600	PAPBD
68	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	78.876.483.840	PAPBD
69	Program Pengelolaan Pelayaran	35.619.000	PAPBD
70	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.007.904.317	PAPBD/ DBHCHT
71	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.912.822.799	PAPBD
72	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	192.516.570	PAPBD
73	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61.117.612	PAPBD
74	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	42.424.610	PAPBD
75	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	979.245.258	PAPBD/ DAK
76	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	52.100.500	PAPBD
77	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.390.578.997	PAPBD/ DAK
78	Program Pengembangan UMKM	61.254.923	PAPBD
79	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.183.520.610	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
80	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	540.532.745	PAPBD
81	Program Pengembangan Ekspor	240.948.420	PAPBD
82	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	167.572.800	PAPBD
83	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	346.067.940	PAPBD
84	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	420.515.603	PAPBD
85	Program Promosi Penanaman Modal	473.145.000	PAPBD
86	Program Pelayanan Penanaman Modal	337.413.880	PAPBD
87	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	195.479.956	PAPBD
88	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	159.604.500	PAPBD
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	918.689.640	PAPBD
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.778.928.763	PAPBD
91	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	PAPBD
92	Program Pengembangan Kebudayaan	802.165.853	PAPBD
93	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	231.002.800	PAPBD
94	Program Pembinaan Sejarah	69.217.154	PAPBD
95	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	40.081.420	PAPBD
96	Program Pengelolaan Permuseuman	999.166.832	PAPBD/ DAK
97	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	941.393.165	PAPBD
98	Program Pemasaran Pariwisata	396.415.260	PAPBD
99	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan	177.326.100	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	Hak Kekayaan Intelektual		
100	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.058.149.850	PAPBD
101	Program Pembinaan Perpustakaan	3.218.478.329	PAPBD/ DAKNF
102	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	35.661.759	PAPBD/ DAKNF
103	Program Pengelolaan Arsip	431.006.371	PAPBD
104	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	83.031.344	PAPBD
105	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.732.874.490	PAPBD/ DBHCHT
106	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.605.305.764	PAPBD
107	Program Hubungan Industrial	2.352.234.474	PAPBD/ DBHCHT
108	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.838.866.297	PAPBD/ DBHCHT
109	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	332.478.808	PAPBD
110	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	97.575.835	PAPBD
111	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	38.467.447.515	PAPBD
112	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.242.722.417	PAPBD
113	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	41.609.955.064	PAPBD
114	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.599.929.423	PAPBD
115	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.860.132.832	PAPBD
116	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.784.706.757	PAPBD
118	Program Riset dan Inovasi Daerah	69.274.600	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
119	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	522.091.045.691	PAPBD
120	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.666.039.669	PAPBD
121	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.675.731.508	PAPBD
122	Program Kepegawaian Daerah	3.464.684.868	PAPBD
123	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.141.224.500	PAPBD
124	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.026.903.392	PAPBD
125	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.567.462.150	PAPBD
126	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.241.665.383	PAPBD
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.436.210.524	PAPBD
128	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	442.679.071	PAPBD
129	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	300.699.805	PAPBD
130	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.356.167.822	PAPBD
131	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.576.597.578	PAPBD
132	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.559.624.124	PAPBD
133	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	88.488.176	PAPBD
134	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik	183.798.924	PAPBD

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	Sosial		
	TOTAL	3.552.123.901.780	

2.6 Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Ringkasan Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	78,85	1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	84,85	Ada perubahan sasaran, sekarang lebih mengedepankan terhadap kemudahan akses
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,75	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	Sasaran sama, akan tetapi ada penambahan indikator pada penurunan emisi GRK Kumulatif
						3. Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623.550	
3	Berkurangnya resiko bencana	3. Indeks Resiko Bencana	121					Sasaran dan indikator dihapus, turun pada level tujuan/sasaran dinas
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,81					Sasaran dan indikator dihapus, diganti pada indikator Indeks harmonisasi (Ihai)
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85	3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan Berkelanjutan	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,06	Sasaran berubah dan indikator berubah
		6. PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,91			5. Rasio Gini	0,334	
		7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12			6. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	
6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8. Tingkat Inflasi Daerah	01-Feb	4	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	7. Persentase Desa Mandiri	46,95	Sasaran dan indikator berubah
		9. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8272			8. Indeks Ketahanan Pangan	86,41	
		10. PDRB Per Kapita	58.310 .000	5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	Sasaran dan indikator bertambah

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3,5			10. Rasio Kewirausahaan	7,47	Sasaran dan indikator bertambah
						11. Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	
				6	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	12. Indeks Kesejahteraan Sosial	62,50	
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12. Indeks Pendidikan	0,62	7	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	13. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49	Sasaran berubah dan indikator bertambah
		13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,85			14. Harapan Lama Sekolah	12,64	
						15. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	
						16. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkaulifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	0,845	8	Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	17. Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	Sasaran lebih ditekankan pada pemerataan, indikator berubah
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15. Indeks Ketahanan Pangan	90					
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,47	9	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31	Sasaran sama, indikator berubah
				10	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	19. Indeks Harmoni Indonesia	7,01	Sasaran dan Indikator ditambah
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,258	11	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	Sasaran sama, indikator ada yang sama dan ada yang berubah
		18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,75			21. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	
		19. Indeks Kapasitas Fiskal	1,8			22. Survei penilaian Integritas (SPI)	77,99	
		20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	80,5	12	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	23. Rasio kapasitas Fiskal daerah	1,433	Sasaran dan Indikator ditambah
						24. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	
13	Birokrasi yang kapabel	21. Indeks Kearsipan Daerah	88,31	13	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	25. Indeks Pelayanan Publik	4,47	Sasaran dititik beratkan pada pelayanan berbasis digital, indikator bertambah

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026)				PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029)				KETERANGAN
		22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,25			26. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	
		23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	82			27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemdi (pemerintah Digital)	4,29	
		24. Indeks Inovasi	68					
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	4,47					Sudah masuk dalam sasaran diatasnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK). Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actualizing dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan lama/sebelum perubahan RPJMD Tahun 2021-2026)

Berikut adalah capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2025 beserta dengan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja Tahun 2025 (sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026) sebagai berikut :

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
I.	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal	a	Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	75,80		Belum Rilis			
	Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur								
	terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras								
	aktivitas sosial ekonomi								
	1 Meningkatkan kualitas Layanan infrastruktur	1	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	82	208.688.780.000	Belum rilis	69.187.196.793	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan (Pembangunan TPT), pemeliharaan berkala dan rutin jalan, rehabilitasi dan penggantian jembatan, survey kondisi jalan/jembatan serta penyusunan dokumen perencanaan teknis kegiatan
					65.348.100.000		17.869.684.960	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Revitalisasi danau, normalisasi/restorasi Sungai, pembangunan bangunan perkuatan tebing, OP Sungai,
									Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta OP jaringan irigasi permukaan.
					2.472.918.800		642.511.660	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peninjauan Kembali (PK) RTRW, koordinasi pelaksanaan penataan ruang, Penyusunan peta dasar, Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
					3.291.570.000		890.086.900	Program Penataan Bangunan Gedung	RDTR, koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
									Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pembangunan, Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung yang bersifat hibah

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						118.509.369.932		1.431.376.374	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan bangunan dan lingkungan seperti penataan fasum dan Pembangunan RTH
						500.000.000		252.421.000	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jasa konsultan DED TPA Jatirogo
						14.513.908.500		6.210.681.650	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, yang dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan, perluasan dan sumur uji SPAM Jaringan Perpipaan
						9.700.190.000		1.434.223.950	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan
						39.900.000.000		21.255.411.600	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan, peningkatan dan OP saluran drainase
						21.000.000.000		11.306.276.750	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan jalan lingkungan kelurahan dan jalan antar desa
						30.000.000		0	Program Pengembangan Perumahan	0

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						4.982.500.000		824.260.949	Program Kawasan Permukiman	Jasa konsultansi perencanaan dan verifikasi Pembangunan RTLH
						76.979.947.760		29.937.821.695	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Telah dilakukan penyusunan Kajian Kelembagaan Angkutan Umum
										Pemeliharaan prasarana jalan sebanyak 16 Unit dan perlengkapan jalan sebanyak 5300 unit
										Rekonsiliasi perparkiran, penataan parkir wilayah kota tuban
										Pengujian kendaraan bermotor sebanyak 6153 Unit, evaluasi dan monitoring kegiatan sebanyak 9 dokumen, penyediaan dan pemeliharaan sarpras pengujian berkala sebanyak 18 unit
										Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten 9 kali, Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) 2 Unit, Pelaksanaan Forum Lalu Lintas sebanyak 29 kali
										Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin sebanyak 13 Laporan
										Penyediaan Angkutan Umum Gratis sebanyak 84 Unit
						6.003.000		0	Program Pengelolaan Pelayaran	Fasilitasi penerbitan pas kapal sebanyak 49 dokumen
	2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,93	11260055	Belum rilis	2252011	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Verifikasi terhadap rincian teknis Penyimpanan LB3 sebanyak 16 usaha / kegiatan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
									Beracun (Limbah B3)	
						4.553.137.044		682.970.557	Program Pengelolaan Persampahan	pembinaan, monitoring dan evaluasi dilapangan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan sebanyak 54 kelompok, penyediaan sarpras persampahan sebanyak 181 unit, dan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sebanyak 53871 ton
						894.037.920		134.105.688	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen IKPLHD, Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara pada 78 titik
										Persiapan Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 14.5 Ha di Wilayah desa Ngrejeng kecamatan Grabagan, desa Maibit kecamatan Rengel, dan desa Kepohagung kecamatan Plumpang.
						36.731.100		3.673.110	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sebanyak 17 Dokumen, Penagawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan sebanyak 36 Badan Usaha
						169.023.465		25.353.520	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persiapan penilaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten
						8.912.000		1.336.800	Program Penanganan	Penanganan pengaduan lingkungan hidup sebanyak 12 Aduan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
									Pengaduan Lingkungan Hidup	
						67.982.250		10.197.338	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pem binaan dan penyuluhan kepada calon peserta Adiwiyata Propinsi, Nasional, Mandiri, Proklm dsb
						45.121.250		4.512.125	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan sarpras Kehati sebanyak 2 Unit yang berlokasi di RTH Singgahan dan RTH Jatirogo
	3	Berkurangnya resiko bencana	3	Indeks Resiko Bencana	121	1.865.844.773	Belum Rilis	186.584.477	Program Penanggulangan Bencana	- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
						826.927.910		248.078.373	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Kegiatan pemadaman kasus kebakaran, penyelamatan dan penanganan satwa liar - Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan pemadaman dan penyelamatan serta alat pelindung diri - Pembinaan internal aparaturnya damkar
	4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4	Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,81	5.301.279.378	Belum Rilis	2.120.511.751	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Koordinasi antar Lembaga dan kemitraan antar di wilayah Kabupaten dan atar Kota/Kabupaten - Patroli dan Pengamanan kegiatan KDH/WKDH dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah - Operasi pengendalian terpadu, pengendalian unjuk rasa dan penertiban wilayah di Kecamatan - Deteksi dan kesiapsiagaan dini linma - Kirab Pataka Kabupaten

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Sosialisasi penegakanPerda dan Perkada - Pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal - Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal - Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai
										koordinasi terkait pengembangan kapasitas PPNS dan JF Pol PP
						1.116.885.522		0	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
						1.075.394.022		430.157.609		Rapat Koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 dan Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
						500.815.308		200.326.123	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						212.424.003		84.969.601		Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Ormas
						2.756.468.980		1.102.587.592	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						892.277.235		356.910.894		Pembentukan Paskibraka Kabupaten Tuban Tahun 2025, Pembinaan Mental Purna Paskibraka 2024, Kegiatan Korps Musik Pemkab Tuban, Kegiatan Pembekalan Korps Musik Pemkab Tuban
						3.975.080		1.590.032		TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa)
						610.796.587		244.318.635		Upacara PHBN, Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi FKUB dan Sosialisasi FPK, Sosialisasi P4GN
						52.404.059.667		2.505.800.500	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	- Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 - Pemberian Honor Tenaga Non PNS dan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Politik dalam Negeri
						23.805.998.210		9.522.399.284	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	- Menyusun perencanaan rapat koordinasi pejabat Daerah - Melaksaksakana rapat Koordinasi Pejabat Daerah - Menyiapkan bahan rapat Koordinasi pejabat Daerah - Mengecek Kegiatan Fasilitasi Tanah - Menyusun Dokumen Kegiatan Fasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan Pelaporan Dan Evaluasi Dana Kelurahan Sesuai Ketentuan - Melaksanakan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dengan Lancar dan Sesuai Prosedur - Menyusun Dokumen Kebijakan Daerah tentang Batas Desa Sesuai Ketentuan - Menyusun Dokumen mutakhir Kode Dan Data Wilayah Administrasi Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Sesuai Ketentuan yang berlaku - Mengiput Data Penyelenggaraan Nama Rupabumi Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Melaksanakan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Sesuai Ketentuan Dan Prosedur

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										- Menyusun Dokumen Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Ketentuan Dan Prosedur - Melaksanakan Fasilitas Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sesuai Ketentuan Dan Prosedur fasilitas Tukar Menukar tanah kas Desa sesuai ketentuan dan Prosedur - Mengecek Dokumen LKPI Per urusan - Menyusun data-data dari OPD untuk Bahan Penyusunan Buku LKPI, LPPD dan SPM - Membuat laporan Pertanggung Jawaban Keterangan Bupati setiap Tahun - Menginput indikator kinerja kunci 110 IKK LPPD - Membuat MOU dengan OPD lain dan Pihak Luar Pemda
										- Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBA) - Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha - Pengajian Umum - Silaturahmi Jemaah Calon Haji ASN Kabupaten Tuban - Koordinasi Bina Mental Spiritual - Mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jatim dan MQK - Penguatan Sektap UKS - Insentif guru TPQ
										- Fasilitas Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah - Menghimpun usulan Perda dan Perkada dari perangkat daerah - Melakukan harmonisasi agar rancangan produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. - Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah - Koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya - Fasilitas penanganan gugatan, tuntutan, dan sengketa hukum yang melibatkan pemerintah daerah - Menghimpun seluruh produk hukum daerah (Perda, Perkada, Keputusan Kepala Daerah) yang telah ditetapkan - Pengelolaan arsip fisik dan digital produk hukum daerah - Pengelolaan dan pemutakhiran JDIH Pemerintah Daerah

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
II	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	b	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,87-5,01		Belum Rilis			
		c	Tingkat Kemiskinan	13,5		Belum Rilis			
		d	Gini Ratio	0,310-0,342		Belum Rilis			
		e	Indeks Williamson	0,923-0,954		Belum Rilis			
		f	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3		Belum Rilis			
	5 Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,85	2.802.100.000	Belum Rilis	1.977.276.024	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Penjaminan Kesehatan Hewan - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
					2.358.619.476		437.791.866	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (IB) - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
					3.413.779.599		1.043.192.037	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
				5.353.614.911		547.798.360	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pengembangan Prasarana Pertanian - Pembangunan Prasarana Pertanian
				5.532.800.000		437.791.866	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
				37.000.000		6.342.500	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian
				270.000.000		70.240.000	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				541.514.250		90.747.075	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
				25.000.000		0	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan
				24.190.560.160		101.751.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Pengelolaan Penangkapan Ikan - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				430.000.000		119.278.893	Program Pengolahan dan	- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
									Pemasaran Hasil Perikanan	- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
			6	PDRB Sektor Industri Pengolahan	4,91	1152078940	Belum Rilis	460.831.576	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelayanan Rumah Kemasan, Standarisasi produk IKM, pelatihan kewirausahaan, Bimtek IKM Naik Kelas dan Festival IKM
						17.756.500		8.878.250	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bimtek dan sosialisasi SIINas
						4.848.964.588		2.574.356.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan Akreditasi LPKS
						875278030		437.639.015	Program Hubungan Industrial	Fasilitasi pengesahan PP dan PKB, Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, Mediasi Perselisihan HI, Pembinaan Serikat Pekerja, Pembinaan K3, LKS Tripartit
						1.077.651.208		484.943.044	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelatihan pencari kerja, Penyebarluasan Informasi Kerja, Pelayanan PMI, dan Pelayanan AK1
			7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	10.409.076.000	Belum Rilis	4.684.084.200	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata utama daerah guna menjaga kualitas, kenyamanan, dan daya saing destinasi wisata. 2. Pelaksanaan promosi pariwisata melalui berbagai media serta fasilitasi kegiatan promosi daerah guna meningkatkan daya tarik dan eksposur pariwisata Kabupaten Tuban.
						831.392.050		374.126.423	Program Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata secara efektif dan terarah yang mendukung peningkatan daya tarik destinasi, promosi pariwisata, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi kreatif daerah.

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						296.971.355		133.637.110	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, festival, pemberdayaan masyarakat, dan sertifikasi kompetensi.
						184.060.000		82.827.000	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif MII Pemanfaatan & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui penguatan sistem pemasaran produk serta fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.
						48.528.650		21.837.893	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan melalui ruwatan adat, pagelaran wayang, serta penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya.
						2.141.634.059		963.735.327	Program Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan kesenian dan festival kebudayaan tradisional maupun modern secara merata di wilayah perkotaan dan kecamatan, termasuk kegiatan kenegaraan dan peringatan hari besar.
						87.086.000		39.188.700	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional melalui pendidikan dan pelatihan pelaku seni serta dukungan sarana bagi paguyuban seni daerah.
						622.628.730		280.182.929	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan permuseuman melalui konservasi koleksi, penyelenggaraan pameran dan edukasi publik, peningkatan akses layanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.
						29.073.500		13.083.075	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan sejarah lokal dan pelestarian warisan budaya melalui kegiatan lawatan sejarah serta pendataan objek yang diduga sebagai cagar budaya.

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
	6	Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8	Tingkat Inflasi Daerah	1-2	427387610	Belum Rilis	288.506.580	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Pemantauan harga dan stok Harg Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang sebanyak 12 rekomendasi yaitu Pasar Baru, Pasar Jatirogo dan Pasar Bangilan untuk kemudian diinput pada aplikasi SISKAPERBAPO Penjualan Paket Sembako Murah sebanyak 1134 dengan sasaran beberapa Kecamatan di Kabupaten Tuban. - Pengawasan penggunaan kandungan campuran terhadap makanan dan minuman di 8 (delapan) Pasar Desa yaitu Pasar Jenu, Tambakboyo, Layur Bancar, Sambonggede Merakurak, Margomulyo Kerek, Plumpang, Rengel, Sokosari dan 4 (empat) pasar Deargan yaitu Pasar Baru, Pasar Karangagung, Pasar Bangilan dan Pasar Jatirogo. Pengawasan Distribusi LPG 3 kg terhadap Pangkalan sebanyak 85 Pangkalan pada 20 Kecamatan. - Pengawasan penyalur dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi pada 7 (tujuh) Distributor dan 276 Kios Pupuk bersubsidi dan 2 (dua) Gudang Penyangga di Wilayah Kabupaten Tuban.
										- Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP sebanyak 11.054 unit. Pengawasan UTTP di seluruh pasar dan BDKT sejumlah 293 unit meliputi pengawasan minyak kita, beras kemasan, SPHP, SPBE dan SPBU. - Verifikasi Alat Standar Uji. - Pengadaan Alat Standar Uji berupa 1 unit timbangan elektronik kapasitas 300 kg, 1 unit stopwatch dan 1 set anak timbangan kelas F2 kapasitas 1 mg s/d 1 kg.
										- Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pasar Baru. Pemeliharaan sarana distribusi perdagangan berupa kendaraan roda tiga di 6 pasar daerah. - Pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dan pedagang pasar.
										- Pameran Dagang dan Pembangunan (Tuban Fair) dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban ke 732 sebanyak 45 Stand Peserta Pameran, dengan rincian 24 di Indoor dan 21 Outdoor. - Fasilitas pelaku usaha melalui kegiatan Kemitraan Pemasaran UMKM dengan Ritel Modern sejumlah 55 pelaku usaha.
										- Pameran Dagang Nasional diikuti sebanyak 2 pelaku usaha, pada kegiatan Pameran Trade Expo Indonesia (TEI), di ICE BSD Kabupaten Tangerang sebanyak 1 kali kegiatan.

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan diikuti 2 pelaku usaha pada kegiatan Misi Dagang dalam rangka Gelaran HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur. - Bimbingan Teknis Peningkatan Citra Produk Unggulan diikuti 25 pelaku usaha.
									Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pengembangan Usaha KLMDH untuk 48 Koperasi. Restrukturisasi Usaha KUD untuk 44 Koperasi.
						1.073.770.368	113473000	821.850.264	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	- Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus KDKMP sebanyak 328 orang. - Pelatihan Berjenjang (Pelatihan Manajerial, Pelatihan Akses Literasi Keuangan, Pelatihan Teknologi Informasi dan Pelatihan SKKNI) dari DAK Non Fisik sebanyak 100 orang. - Lomba Galaksi 1 (satu) event sebanyak 150 orang. - Peringatan Hari Koperasi ke-78 sebanyak 600 orang.
						1.451.833.920	593782396	1.306.705.195	Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	- Kemitraan Usaha Mikro untuk fasilitasi akses Permodalan dengan pihak perbankan - Kemudahan Perizinan Usaha Mikro - Sosialisasi SHAT untuk pelaku usaha Mikro. - Fasilitasi promosi produk unggulan lokal melalui Festival 100% Tuban - Fasilitasi promosi produk unggulan tingkat Provinsi melalui Event/ Expo UMKM Tk. Provinsi/ Nasional - Pelaksanaan Lomba UMKM Award sasaran 1 kegiatan. - Pelatihan berjenjang kewirausahaan (DAK NF NON FISIK) - Entrepreneur School.
									Program Pengembangan UMKM	Fasilitasi cafe inklusi sasaran 2 kelompok usaha.
						29.720.350		8.916.105	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi terhadap 444 koperasi yang ada di Kabupaten Tuban. Penilaian terhadap Koperasi sehat sebanyak 180 koperasi.

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
			9	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8086	9.615.943.052	Belum Rilis	4.327.174.373	Program Penataan Desa	Pengisian profil desa dan pemutakhiran status desa
			10	PDRB Per kapita	58.310.000	44.847.500	Belum Rilis	20.181.375	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi BUMDesma
						5.761.745.280		2.592.785.376	Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Fasilitasi penyelesaian permasalahan desa - Asistensi dan pendampingan perencanaan desa - Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa - Fasilitasi jaminan kesehatan kades dan perangkat desa - Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD - Pendampingan pengelolaan asset desa
						740.282.730		333.127.229	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Fasilitasi penataan dan pendataan LKD - Peningkatan kapasitas pengurus LKD - Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat - Fasilitasi Jatim Puspa - Fasilitasi pemberdayaan PKK
						168.894.450		76.002.503	Program Pemberdayaan Sosial	- Pembinaan dan koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Organisasi Sosial Lainnya - Monitoring Operasional LKS Perijinan Undian dan Pengumpulan Uang dan Barang
						5.238.906.870		2.357.508.092	Program Rehabilitasi Sosial	- Pemberian layanan dasar sesuai SPM Bidang Sosial meliputi permakanaan, sandang, alat bantu, reunifikasi, bimbingan sosial, rujukan - Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
						5.264.386.200		2.368.973.790	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Verifikasi dan Penyandingan Data Kesejahteraan Sosial - Pembinaan Pilar Sosial Program Keluarga Harapan - Pelayanan surat keterangan terkait kesejahteraan sosial - Persiapan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bantuan Tunai dari DBHCHT

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						56.266.700		25.320.015	Program Penanganan Bencana	- Penyediaan untuk tanggap darurat bencana sesuai SPM bidang sosial - Pembinaan dan fasilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
						58.551.350		26.348.108	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan rutin TMP meliputi kebersihan dan perbaikan sarana
						7.567.720.625		3.405.474.281	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penetapan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam penerapan pelaksanaan PUG, Pembinaan TP. PKK, Kegiatan Stunting, UMKM
	7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11	Persentase peningkatan nilai investasi	3,5	466.350.000	Belum Rilis	209.857.500	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM - Penyusunan Dokumen RUPM - Penyusunan Dokumen IPRO dan Peta Potensi - Matchmaking Antar Pelaku Usaha
						432.486.800		194.619.060	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Sosialisasi Jempol Lari - Roadshow Pelayanan Publik - Pemantauan pemenuhan komitmen
						540.000.000		243.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	- Pameran Promosi Investasi Tuban Investment Forum - Webinar Dialogue Investasi
						195.867.000		88.140.150	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Rekapitulasi data perizinan dan non perizinan - Penyusunan SP dan SOP perizinan dan non perizinan
						327.258.000		147.266.100	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jempol Ananda - Bimtek LKPM - Klinik Investasi - Pengawasan Perizinan Berusaha - Penyelesaian Hambatan Penanaman Modal - Sosialisasi Penanaman Modal

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
III	Mewujudkan Sumber Daya		g	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,1		Belum Rilis			
	Manusia Unggul		h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,6		Belum Rilis			
	8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12	Indeks Pendidikan	0,62	174.749.983.531	Belum Rilis	78.637.492.589	Program Pengelolaan Pendidikan	Workshop/pelatihan untuk pendidik agar bisa meningkatkan kualitas belajar untuk Satuan PAUD/TK, SMP dan PNF, melengkapi sarpras dalam belajar siswa
						74.981.000		22.494.300	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan kurikulum mulok untuk Satuan PAUD/TK, SMP dan PNF
						2.651.500		0	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
						7.263.000		0	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Pendidik sudah terlaksana dengan hampir menyeluruh dengan berstatus Pendidikan S-1/ Dan juga hampir sudah memiliki sertifikat pendidik
						1.979.496.870		692.823.905	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kepemimpinan dan kepeloporan, serta pemberian apresiasi kepada pemuda berprestasi.
						700.000.000		245.000.000	Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan kepramukaan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang mendukung penguatan tata kelola organisasi, pembentukan karakter, dan pengembangan kepemimpinan generasi muda.

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						19.472.721.6 90		6.815.452.59 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pengembangan olahraga pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan, pembinaan atlet berprestasi, serta penguatan organisasi keolahragaan. - Pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi, termasuk bagi atlet disabilitas, melalui keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat provinsi yang berdampak pada peningkatan capaian prestasi daerah. - Pembinaan dan penguatan organisasi keolahragaan melalui dukungan kepada cabang olahraga, KONI, dan NPCI, serta peningkatan kompetensi pelatih dan wasit.
			13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,7	75.080.174	Belum Rilis	26.278.061	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 10 orang
										Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 31 eksemplar
										Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 3 eksemplar
										Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 3 eksempla
						10.907.204.4 94		3.817.521.57 3	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3 perpustakaan
										Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 50 perpustakaan
										Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota 16 layanan
										Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 1360 eksemplar
										Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 1 dokume
										Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 7 lokus

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 12 orang
										Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 3 perpustakaan
	9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	0,81	94.099.932.662	Belum Rilis	37.639.973.065	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pengadaan alkes, obat bmhp, pengembagunan rumah sakit - Pemenuhan operasional RS berupa honorarium, dan pemenuhan rumah tangga RS - Kegiatan promotif dan preventif 33 Puskesmas berupa kegiatan PMT bumil dann balita, kegiatan siklus hidup, deteksi dini penyakit, insnetif UKM, tata kelloa pelayanan kesehatan dasar dan manajemen Puskesmas - Pengadaan alkes, obat bmhp, pengembangan Puskesmas, pembangunan Pustu, pemenuhann IPAL, sarana air bersih, pemenhunan sarana dan prasarana iFK dan Labkesda dan kaliberasi - Melaksanakan Validasi data Ibu hamil, Evaluasi capaian program Kesehatan Ibu, Analisa data, Rekapitulasi data, Melaksanakan kegiatan Skrining dan Konsultasi Bumil, Belanja pengadaan Buku KIA - Melaksanakan Validasi Data KIA, menginformasikan ke semua Fasyankes secara berkelanjutan tentang pemanfaatan RTK di Kab.Tuban dan semua Puskesmas yg mempunyai kasus rujukan persalinan agar segera melakukan klem dg mengirimkan SPJ - Koordinasi dengan Kabupaten Tetangga untuk pencatatan dan pelaporan peemriksaan SHK - Koordinasi dengan Soetomo untuk percepatan penagihan setiap bulannya - Kegiatan audit perinatal dan kalakarya MTBM& MTBS - Pelaksanaan pembinaan program UKS dan Remaja - Validasi data Ibu hamil, Evaluasi capaian program Kesehatan Ibu, Rekapitulasi data, Belanja pengadaan Buku KIA - Sosialisasai pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran ke semua RS dan Puskesmas , memproses SPJ pemanfaatan RTK dan Transport rujukan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						299.007.750		119.603.100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										Penerbitan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri RT

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
						609.242.200		243.696.880	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Memantau SIP nakes dan named melalui aplikasi SISDMK dan google form
										Koordinasi dengan pengelola kepegawaian Fasyankes dan operator SISDMK Puskesmas
										Koordinasi dengan DPMPSTP untuk data SIP yang sudah terbit setiap bulan
										Visitasi praktik mandiri untuk pengajuan SIP baru dengan melibatkan OP dan jejaring Puskesmas
										Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Labkesmas Bimtek pasca evaluasi labkesmas
										Melakukan pendataan peningkatan kompetensi (ijin belajar, pelatihan, workshop, seminar)
						499.650.875			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Pertemuan evaluasi pendampingan bumil resti - Transport pendampingan bumil KEK - Pertemuan evaluasi pendampingan bumil KEK - SMD, MMPD - Pendampingan SAJADAH - Pendampingan konsumsi TTD - Evaluasi kegiatan SAJADAH
										- Sosialisasi UBM, Detdin PPOK dengan Spirometri, Detdin Kanker Payudara dengan USG Probelinear - Melaksanakan monitoring pelaksanaan KTR di Kabupaten Tuban - Aksi Bergizi - Pelaksanaan Gerakan Cegah stunting

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Pembinaan Rutin SBH, Supervisi Promkes UKBM
						2.160.994.000		864.397.600	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	promosi kegiatan KB kepada masyarakat
										monitoring bagi kecamatan yang belum melaksanakan minilok
										Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), distribusi alkon dan pelayanan MKJP kepada masyarakat
										monitoring dan evaluasi serta pembinaan bagi kecamatan yang belum melaksanakan kegiatan
						6.119.590.000		2.447.836.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)	Pembinaan Poktan dan keluarga sejahtera
										Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
						185.509.700		74.203.880	Program Pengendalian Penduduk	Melaksanakan Koordinasi dengan lintas sektor terkait, mengenai revisi GDPK : Penambahan visi misi, pembentukan SK Tim Penyusun dan SK Tim Pelaksana GDPK, penambahan periodeisasi dari tahun 2015-2035 menjadi tahun 2025-2045
										Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) akan dilanjutkan pelaksanaannya pada bulan Oktober - November 2025
										kegiatan pembinaan program bangga kencana melalui SSK dan melaksanakan kegiatan pembinaan program bangga kencana pada

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										kader, akan melakukan penyerapan belanja jasa tenaga administrasi dan belanja internet 20 Balai Penyuluh KB Kecamatan pada tribulan 4
	10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15	Indeks Ketahanan Pangan	86,41		Belum Rilis			
						5.290.500.000		609.430.750	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
						130.000.000		4.760.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
						120.000.000		54.827.500	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
	11	Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,47	73.475.010	Belum Rilis	200.657.314	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Sekolah Perempuan Forum PUSPA
						227.154.250		0	Program Pengelolaan Sistem	Persiapan penyusunan profil gender dan profil anak

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
									Data Gender dan Anak	
						122.291.070		30.572.768	Program Perlindungan Perempuan	Layanan bagi Perempuan korban kekerasan
						57.328.100		20.064.835	Program peningkatan kualitas keluarga	- Layanan konseling puspaga - Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
						31.292.120		10.952.242	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rapat koordinasi gugus KLA Pelatihan konvensi hak anak
						123.930.790		43.375.777	Program Perlindungan Khusus Anak	Layanan bagi anak korban kekerasan
IV.	Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani		i	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,42		Belum Rilis			
	12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2580	922.430.056	Belum Rilis	415.093.525	Program Perekonomian Dan Pembangunan	- Fasilitasi Proses PBJ - Pengelolaan Katalog Elektronik - Pengelolaan SPSE - Layanan Konsultasi Penyedia dan Non Penyedia pada SPSE - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										- Sosialisasi pembinaan BLUD dan BUMD - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BLUD dan BUMD - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitasi Pengelolaan BLUD dan BUMD - Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) - Monitoring dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Bapokting - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah - Menyusun Laporan Kegiatan TPID - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Percepatan Akses Keuangan Daerah
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
										Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Permasalahan dalam Percepatan Program Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
						5.675.731.508,00		2.270.292.603	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak
										Pendataan dan pendaftaran objek, subjek, dan wajib pajak daerah secara berkelanjutan.
										Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah.
										Penetapan ketetapan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak.
										Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara administratif dan persuasif.
										Penyusunan rencana pengelolaan pajak daerah.
										Pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah.
										Penyusunan laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
			18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,75	457.670.992.633	Belum Rilis	160.184.847.422	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			19	Indeks Kapasitas Fiskal	1,8	1.017.214.536	Belum Rilis	356.025.088	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	78,36	2.241.439.888.282,00	Belum Rilis	1.008.647.949.727	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan implementasi sakip pada perangkat daerah, Penginputan data pada aplikasi simanis dan esr
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban secara rutin melaksanakan koordinasi internal dan menyusun dokumen pertanggungjawaban serta laporan kinerja, seperti LKPJ, LkjiP, dan LPPD yang memuat ikhtisar realisasi kinerja sebagai landasan objektif dalam melakukan evaluasi dan perbaikan mutu pengawasan di masa mendatang
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola administrasi keuangan internal yang tertib dan akuntabel, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak keuangan aparatur, termasuk di dalamnya pembayaran gaji serta tunjangan bagi seluruh ASN di

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur guna memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan berjalan secara optimal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang sistematis, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan pelatihan yang akurat untuk menutupi kesenjangan kompetensi, dilanjutkan dengan penyusunan program pelatihan yang terarah dan relevan, serta diakhiri dengan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan pelatihan yang telah diikuti.
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk menunjang administrasi umum perangkat daerah dengan memastikan bahwa semua aspek operasional dan administratif berjalan dengan lancar, sehingga dapat berfungsi dengan efektif dan efisien melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah guna memastikan bahwa perangkat daerah telah memiliki fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengadaan BMD yang telah dilaksanakan meliputi Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah telah memiliki semua layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, sehingga dapat

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah terealisasi melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah berupaya untuk memastikan bahwa semua aset milik daerah, termasuk kendaraan, peralatan, mesin, dan gedung kantor, dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif dan efisien melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
						4.443.430.306		1.999.543.638	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen : 1. RPJMD 2025-2029, 2. P-RKPD 2025 3. RKPD 2026 4. Rantek RKPD 2027
										Analisis Data untuk Perencanaan 2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah (buku dan video)
										Penerapan Aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri
										Penyusunan Dokumen : 1. Laporan pengendalian dan evaluasi TW 1, 2, 3 dan 4

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										2. Penyusunan dokumen Indeks Layak Huni 3. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 4. Indeks Kerukunan Umat Beragama 5. Nilai Tukar Petani
						5.544.657.824		2.495.096.021	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2024 2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2026 3. Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024
										1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2024 2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2026 3. Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024
										1. Penyusunan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Penyusunan Dokumen Strategi Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban
										1. Penyusunan Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan Kabupaten Tuban. 2. Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
						1.063.360.830		584.848.457	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Berkaitan dengan seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Revidu Laporan Kinerja, Revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Desa,

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Menjalin Kerjasama Pengawasan Internal, serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
										Berkaitan dengan seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ini Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu itu sendiri.
						4.594.365.542		1.837.746.217	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah merumuskan beberapa pedoman atau kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah Kebijakan yang telah berhasil ditetapkan pada bidang pengawasan antara lain : Pedoman Pengendalian Kecurangan dan Perubahan atas Peraturan Bupati Manajemen Risiko serta Pedomannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
										Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban telah melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi serta Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
	13	Birokrasi yang kapabel	21	Indeks Kearsipan Daerah	78,5	773.433.190	Belum Rilis	348.044.936	Program Pengelolaan Arsip	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 22.941 berkas
										Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 20 laporan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										Akuisisi, Pengolahan, preservasi dan Akses arsip statis 4 Arsip
										Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah / Kab. / Kota 11.583 penggunaan
										Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota 11 laporan
						63.641.764		28.638.794	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Penilaian dan penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 3.392 Arsip
										Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2.524 daftar
										Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 2.805 arsip
										Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 30 arsip
			22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1	5.857.728.847	Belum Rilis	3.221.750.866	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perencanaan, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, dan evaluasi sistem berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola e-government dan layanan publik
						272.910.640		144.507.200	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik sektoral - Pelatihan bagi petugas lapangan atau pengelola data mengenai metodologi dan pengolahan data statistik bekerja sama dengan BPS
						48.929.800		12.500.000	Program Penyelenggaraan Dan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	- Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan standar internasional - Penanganan serangan insiden Siber

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
			23	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3,97	2.982.172.860	Belum Rilis	1.640.195.073	Program Kepegawaian Daerah	- Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN digunakan untuk sosialisasi, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan ASN (Bezzeting dan E-Formasi) - Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK digunakan untuk melaksanakan konsultasi, koordinasi, persiapan serta pelaksanaan seleksi PNS dan PPPK mulai dari sosialisasi, - verifikasi berkas pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pemberkasan, pengangkatan PNS dan PPPK, pengambilan sumpah janji serta penyerahan SK PNS dan PPPK. - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian digunakan untuk pendampingan penyelesaian teknis penetapan SK pensiun - Pengelolaan Kenaikan Pangkat
						770.081.500		423.544.825	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN digunakan untuk pelaksanaan ujian dinas - Pembinaan Disiplin ASN digunakan untuk sosialisasi manajemen ASN melalui pembinaan dan sosialisasi Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil - Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Reward and Punishment ASN.
						2.334.386.600		1.283.912.630	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kelitbangan
										Penyusunan Dokumen Kajian : 1. Dokumen Kajian Standarisasi Fasilitas Pendidikan Dasar Ramah Anak di Kabupaten Tuban 2. Dokumen Kajian Pengaruh Unmet Need Terhadap Kematian Ibu di Kabupaten Tuban
										Penyusunan Dokumen Kajian : 1. Dokumen Kajian Pembangunan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Tuban 2. Dokumen Kajian Optimalisasi Air Tanah Karst sebagai Pemasok Air Domestik pada Kawasan Krisis Air di Kabupaten Tuban

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										3. Dokumen Kajian Analisis Pengembangan Potensi Hutan Bakau di Kabupaten Tuban 4. Dokumen Kajian Analisis Backlog Perumahan dan Strategi Pemerintah Dalam Pengadaan Perumahan Bagi Masyarakat
										1. Pelaksanaan Lomba Tuban Berinovasi (TUBERNOVA) tingkat OPD/Kecamatan/Pus kesmas & Masyarakat 2. Koordinasi dan Pengumpulan Data Dukung Inovasi Kabupaten Sesuai Indikator pada Innovative Government Award (IGA) 3. Pembinaan serta Pendampingan Inovator Kabupaten Tuban (TubanTekno - Inkubasi Inovasi) 4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Melalui Aplikasi SISEVA (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah) 5) Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Ruang KI - Kekayaan Intelektual)
	15	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	3,97	2.655.320.852	Belum Rilis	1.194.894.383	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Memverifikasi kebenaran informasi· Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan data pengaduan secara terintegrasi
						241.560.000		108.702.000	Program pendaftaran penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk. mendukung pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan melalui program “Layanan Cedak Mas/Cepat Dekat Masyarakat” yaitu (pelayanan perekaman, penerbitan KTP el, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Akta kematian). Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
										pelayanan adminudukcapil pada pusat keramaian publik dan event/kegiatan tertentu, seperti event pada pameran hari jadi kabupaten Tuban atau pameran pembangunan
										penyelenggaraan International Organization for Standardization (ISO).
						99.457.950		44.756.078	Program Pencatatan Sipil	belanja Fumigasi, map ordner dan ATK, Bahan pembersih, lembur. percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara kolaborasi dengan bidang pendaftaran penduduk serta pelaksanaannya dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI sebagai pemenuhan hak anak;
						400.206.953		180.093.129	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Peningkatan perluasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Lain.
										- keliling ke sekolah SMA/SMK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tuban. - Belanja pemeliharaan peralatan pendukung jaringan Aplikasi SIAK Terpusat agar koneksifitas jaringan Aplikasi SIAK Terpusat - Pembayaran langganan internet pra bayar, dan belanja VPN setiap bulannya
										peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas dari Operator SIAK yang ada di 20 Kecamatan, Operator Adminduk Mal Pelayanan Publik, Operator Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban dan Tenaga Non ASN terkait adminduk dari Perangkat Daerah di 20 Kecamatan.
						30.752.260		13.838.517	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Dokumen Buku Data Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban.
						41.609.955.064		33.389.606.994	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi pembahasan raperda; Penyampaian informasi kegiatan DPRD; Fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada anggota DPRD;

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025	PAGU 2025	CAPAIAN KINERJA s.d. TW III 2025	REALISASI PAGU s.d. TW III 2025	PROGRAM PENUNJANG	BENTUK KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
						89.224.500		52.687.000		Fasilitasi rapat pembahasan anggaran
						17.383.901.488		13.201.703.765		Fasilitasi pembahasan raperda
						2.175.932.230		1.463.994.465		Fasilitasi bimtek bagi anggota DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi dan publikasi kegiatan DPRD
						5.892.979.390		4.027.984.500		Fasilitasi pelaksanaan reses, kunjungan kerja dalam daerah dan penyusunan pokir
						16.067.917.456		14.643.237.264		Fasilitasi kunjungan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD
						1.319.091.070		593.590.982	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sosialisasi FKP, Pelayanan Publik
						1.018.841.146		458.478.516	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan PHBI, Pendistribusian Bansos, Pendampingan Proposal Tempat Ibadah, Pendampingan Disabilitas, Lansia dan ODGJ
						671.974.610		302.388.575	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Konferensi Perangkat Desa, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa, APBDes, Monev Keuangan Desa
						382.929.100		172.318.095	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Bencana dan Pengamanan wilayah

3.3 Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Misi 1 Tujuan 1

Misi 1 : “Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan” didukung 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran
Pada Tujuan 1 (satu) terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni</i>	Indeks Layak Huni (ILH)	79	79,31	100,39

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

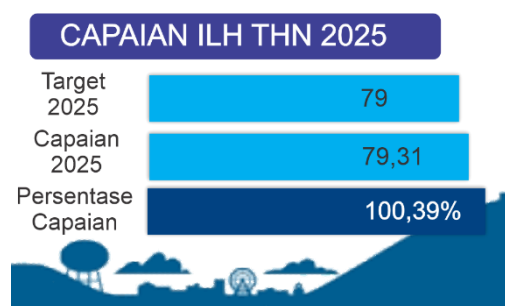
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni</i>	Indeks Layak Huni (ILH)	81	79,31	97,91

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur	Nasional
1	2	3	4	5
<i>Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni</i>	Indeks Layak Huni (ILH)	79,31	-	-

Indeks Layak Huni

Dalam RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan terobosan dengan menjadikan Indeks Layak Huni (ILH) sebagai indikator tujuan utama. Hal ini dilakukan karena disadari bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu selaras dengan kebahagiaan dan kenyamanan warga.



Sumber : Bapperida Kab. Tuban, Tahun 2025

Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban akan dihitung berdasarkan nilai indeks per kecamatan dan secara agregat kabupaten. Hasil nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 akan dijelaskan di masing-masing kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Penjelasan nilai Indeks Layak Huni dijelaskan berdasarkan profil responden, nilai Indeks Layak Huni per kategori dan per sub kategori.

Agar dapat diketahui peringkat atau kelas dari masing-masing kategori, sub kategori, dan peringkat kecamatan, maka dilakukan pembagian kelas (tier) yang meliputi Top Tier, Average Tier, dan Bottom Tier. Pembagian kelas nilai indeks ini berbeda dengan nilai Indeks Layak Huni secara agregat, akan tetapi nilai tier bergantung terhadap nilai akhir dari perhitungan nilai indeks itu sendiri atau nilai relatif. Penentuan rentang kelas/tier pada masing-masing kecamatan, per kategori dan per sub kategori dapat ditinjau pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Keterangan Nilai Tier Pada Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban

Tier Nilai Per Kecamatan	Tier Nilai Per Kategori	Tier Nilai Per Sub Kategori	Keterangan Nilai Tier
83,39 - 87,51	79,16 - 79,84	80,40 - 84,84	TOP TIER
79,27 - 83,38	78,48 - 79,15	75,95 - 80,39	AVERAGE TIER
75,13 - 79,26	77,78 - 78,47	71,49 - 75,94	BOTTOM TIER

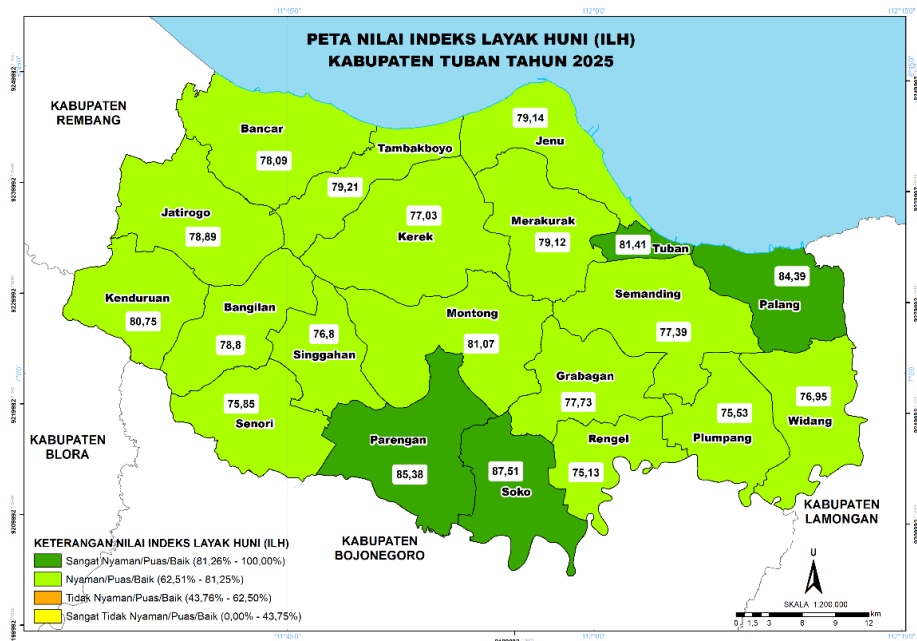
Rekapitulasi nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 menurut nilai kelas indeks lebih lanjut dapat ditinjau pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.2 Nilai Indeks Layak Huni Menurut Kelas/Tier Per Kecamatan

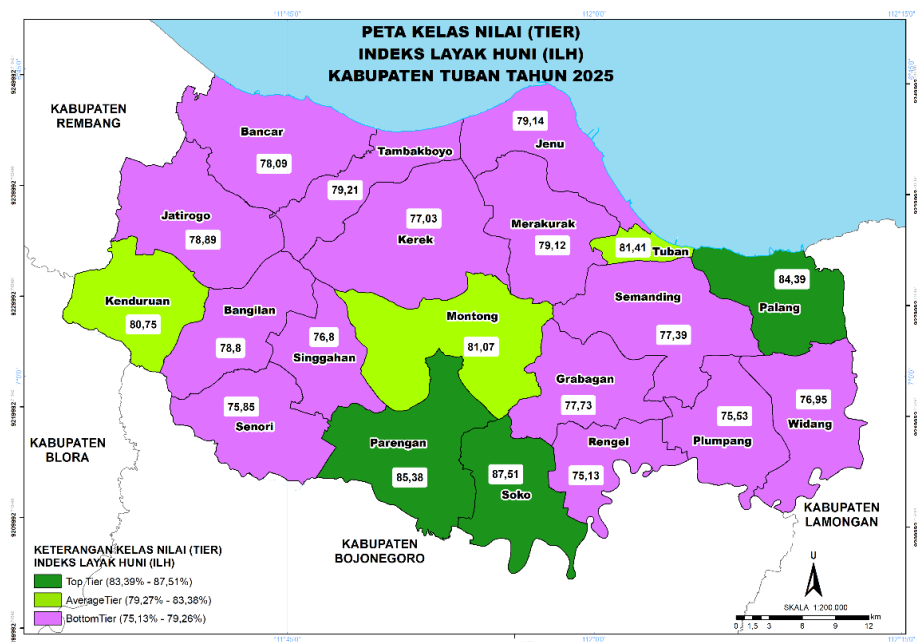
No	Kecamatan	Nilai Kelas Indeks Layak Huni (Tier)	Keterangan Nilai Kelas Indeks Layak Huni (Tier)
1	Soko	87,51	Top Tier
2	Parengan	85,38	Top Tier
3	Palang	84,39	Top Tier
4	Tuban	81,41	Average Tier
5	Montong	81,07	Average Tier
6	Kenduruan	80,75	Average Tier
7	Tambakboyong	79,21	Average Tier
8	Jenu	79,14	Average Tier
9	Merakurak	79,12	Average Tier
10	Jatirogo	78,89	Bottom Tier
11	Bangilan	78,80	Bottom Tier
12	Bancar	78,09	Bottom Tier
13	Grabagan	77,73	Bottom Tier
14	Semanding	77,39	Bottom Tier
15	Kerek	77,03	Bottom Tier
16	Widang	76,95	Bottom Tier
17	Singgahan	76,80	Bottom Tier
18	Senori	75,85	Bottom Tier
19	Plumpang	75,53	Bottom Tier
20	Rengel	75,13	Bottom Tier

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Soko berada di kelas Top Tier dengan nilai Indeks Layak Huni sebesar 87,51%. Sedangkan Kecamatan Rengel menempati kelas Bottom Tier dengan nilai Indeks Layak Huni yaitu 75,13%. Secara spasial Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 berdasarkan nilai agregat dan berdasarkan Kelas/Tier dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 3.1 Peta Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 Berdasarkan Nilai Agregat



Gambar 3.2 Peta Nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 Berdasarkan Kelas (Tier)

Hasil pemeringkatan juga ditentukan berdasarkan kategori dan sub kategori Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 dapat ditinjau pada tabel berikut berikut ini.

Tabel 3.3 Nilai Tier Indeks Layak Huni Berdasarkan Kategori

No	Kategori Indeks Layak Huni Tuban	Nilai Tier Kategori Indeks Layak Huni Tuban	Keterangan Nilai Tier Kategori Indeks Layak Huni Tuban
1	Transportasi	79,84	Top Tier
2	Prasarana Kawasan	79,42	Top Tier
3	Sarana Kawasan	79,39	Top Tier
4	Kebencanaan Dan Lingkungan Hidup	77,78	Bottom Tier

Sumber : Bapperida Kab. Tuban, Tahun 2025

Dari hasil identifikasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Layak Huni Kabupaten Tuban Tahun 2025 secara agregat adalah **79,31**. Nilai Indeks Layak Huni tersebut telah mencapai target nilai Indeks Layak Huni tahun 2025 pada Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 yaitu sebesar 79,00.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, nilai Indeks Layak Huni berada pada rentang nilai 75,13 – 87,51. Jika nilai Indeks Layak Huni dalam 20 kecamatan tersebut dibandingkan antar Kecamatan dengan 3 kelas nilai (tier), maka didapatkan terdapat 3 kecamatan termasuk dalam kelas top tier dengan rentang nilai 84,39 – 87,51, meliputi Kecamatan Soko, Parengan dan Palang. Kecamatan yang masuk dalam kelas top tier, berarti kecamatan tersebut di Kabupaten Tuban memiliki nilai ILH diatas rata-rata 5. Kecamatan termasuk dalam kelas average tier dengan rentang nilai 79,12 – 81,41 meliputi Kecamatan Tuban, Montong, Kenduruan, Tambakboyo, Jenu, dan Merakurak. Kecamatan yang masuk kelas average tier, berarti kecamatan tersebut di Kabupaten Tuban memiliki nilai ILH rata-rata. 11 kecamatan sisanya termasuk kelas bottom tier dengan rentang nilai 75,13 – 78,89 yang meliputi Kecamatan Jatirogo, Bangilan, Bancar, Grabagan, Semanding, Kerek, Widang, Singgahan, Senori, Plumpang, dan Rengel. Kecamatan yang masuk kelas bottom tier, berarti kecamatan tersebut di Kabupaten Tuban memiliki nilai ILH dibawah rata-ra

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Tujuan	Indikator	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni	Indeks Layak Huni (ILH)	a. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan skala prioritas dalam hal membangun sarana dan prasarana terutama pada sub kategori Indeks Layak Huni yang masih rendah, dengan berprinsip pada pembiayaan yang kecil bagi APBD, namun memiliki dampak yang luas bagi masyarakat umum b. Pemerintah mengarahkan program pembinaan teknis dan asistensi reguler kepada pemerintah desa dalam proses penyusunan Musyawarah Desa dan RPJMDes, agar desa dapat mengintegrasikan program yang mendukung peningkatan sarana publik c. Pemerintah memperkuat integrasi program pembangunan ILH ke dalam RPJMD dan Renstra OPD agar selaras dengan prioritas peningkatan kualitas hidup Masyarakat.	a. Meningkatkan publikasi dan penyebaran informasi mengenai lokasi, jenis, dan layanan fasilitas yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten (melalui media sosial, website, baliho, brosur di kantor desa, dsb). b. Optimalisasi pemanfaatan dan daya tarik fasilitas, agar masyarakat merasakan manfaat langsung. c. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tiap fasilitas, serta melakukan audit/investigasi kualitas secara berkala, survei kepuasan pengguna, respon keluhan cepat, guna meningkatkan kualitas layanan.	a. Mitigasi Banjir Rob: Pembangunan tanggul penahan ombak dan sistem drainase terpadu di sepanjang Jalur Pantura untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke permukiman. b. Sinkronisasi Perencanaan: Memastikan pembangunan jalan dan sarana prasarana tidak hanya berfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah dengan indeks rendah agar kesenjangan antar-kecamatan (seperti Senori vs kecamatan pesisir) tidak semakin lebar.

Tujuan	Indikator	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
				c. Ruang Publik dan Budaya: Memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) sebagai wadah interaksi sosial dan kegiatan budaya guna meningkatkan rasa kepemilikan dan kebahagiaan warga terhadap lingkungannya. d. Diversifikasi Lapangan Kerja: Mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional (seperti nelayan di kawasan pesisir) dengan pelatihan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis pengolahan hasil laut.

Sasaran pada Tujuan I

Tujuan “Mewujudkan Kabupaten Tuban Layak Huni” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	84,85	85,69	100,99
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	74,32	99,29
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623.550	677.881	108,71

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

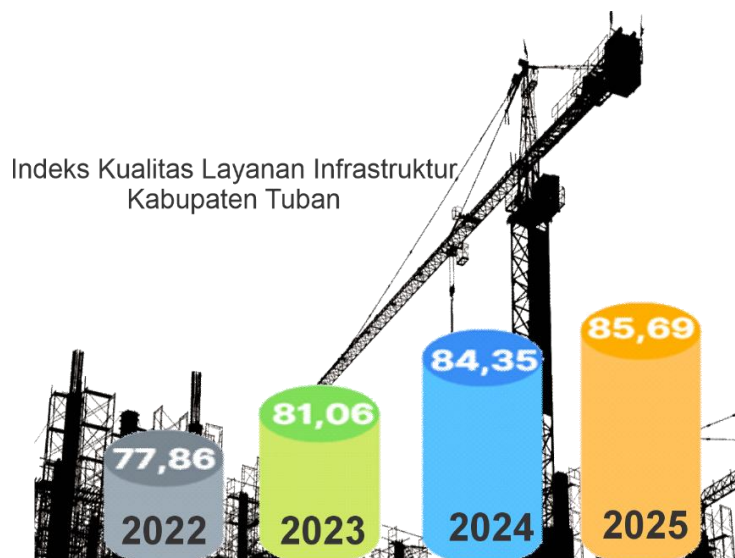
Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	86,85	85,69	99,66
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,17	74,32	98,86
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.023.550	677.881	66,22

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan salah satu indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan atau melayani kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat



terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. IKLI mengukur persepsi masyarakat tentang kualitas layanan infrastruktur, baik dari segi ketersediaan, kualitas fisik, kemudahan akses, maupun manfaat yang dirasakan. Metode perhitungan IKLI adalah dengan menghitung rata-rata dari 3 komponen yaitu kualitas ketersediaan, kualitas fisik, dan kualitas layanan. Realisasi selama beberapa tahun kebelakang terus mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perolehan skor IKLI pada 2025 ini tercatat sebesar 85,69 atau meningkat sebesar 1,34 poin dari skor 84,35 pada 2024 lalu.



Sumber : Bapperida Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.1 Perbandingan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya, Kabupaten Tuban memiliki panjang dan ruas jalan kabupaten, sebagai berikut:

Kabupaten Tuban	Panjang (Km)	Sistem Primer					Sistem Sekunder			
		JKP 2	JKP 3	JKP 4	JLP	J.Ling.P	JAS	JKS	JLS	J.Ling.S
Kabupaten Tuban	1.906,337	82,250	-	156,870	256,800	1.371,757	15,770	7,460	7,600	6,030

Sumber : Dinas PUPR PRKP Kabupaten Tuban, 2025

Kabupaten Tuban memiliki jalan kabupaten sepanjang 1.906,337Km, dengan ruas terpanjang jalan lingkungan primer sepanjang 1.371,757Km dan ruas terpendek yakni jalan lingkungan sekunder sepanjang 6,030Km.

Jalan lingkungan primer mendominasi jaringan jalan di Tuban, yang menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah pusat kegiatan nasional dan wilayah kabupaten sangat kuat.

- Jalan Lingkungan Primer Merupakan komponen terbesar dengan panjang 1.371,757 km. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar jalan di Tuban berfungsi untuk melayani pergerakan di dalam kawasan permukiman primer atau perdesaan yang luas.
- Jalan Lokal Primer (JLP): Memiliki panjang 256,800 km, yang berfungsi menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal.
- Jalan Kolektor Primer (JKP): Terbagi menjadi JKP 2 (82,250 km) dan JKP 4 (156,870 km). Tercatat tidak ada jalan JKP 3 di wilayah ini.

Jalan lingkungan Sekunder memiliki proporsi yang jauh lebih kecil dibandingkan Sistem Primer, yang mencerminkan fokus pada pelayanan di dalam kawasan perkotaan atau zona industri tertentu:

- Jalan Arteri Sekunder (JAS): 15,770 km.
- Jalan Lokal Sekunder (JLS): 7,600 km.
- Jalan Kolektor Sekunder (JKS): 7,460 km.
- Jalan Lingkungan Sekunder (J.Ling.S): 6,030 km

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	a. Implementasi pemeliharaan jalan yang responsif terhadap kerusakan; b. Penambahan ruas jalan baru (SK Bupati No.188.45/92/2024); c. Mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan ditindaklanjuti dengan cepat; d. Peningkatan kualitas perkerasan jalan; e. Ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai.	a. Survei dan pemetaan kondisi jalan secara berkala; b. Pemeliharaan rutin dan berkala sesuai prioritas; c. Sosialisasi tata cara pengaduan dan alur penanganan kepada Masyarakat; d. Untuk struktur tanah yg labil maka terus diupayakan penanganannya yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing - masing ruas atau titik yang ada, baik melalui peningkatan jalan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin termasuk yg dilakukan oleh UPT untuk kerusakan kecil yang segera butuh penanganan. e. Untuk peningkatan jalan pada ruas tertentu, penanganan yang telah dilakukan berupa pelebaran badan jalan, peninggian secara bertahap mengganti konstruksi dengan menggunakan beton rigid (beton bertulang).	a. Optimalisasi Perencanaan dan Prioritas Pembangunan, Menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kebutuhan Masyarakat; b. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan, Melakukan audit tahunan terhadap proyek jalan dan jembatan untuk mengevaluasi progres, kendala, dan dampak pembangunan; c. Memperkuat sistem pengaduan masyarakat dengan membentuk tim respon cepat penanganan pengaduan serta evaluasi bulanan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
		f. Melakukan verifikasi lapangan dan administrasi status DI Dekker; g. Melakukan pengecekan untuk database infrastruktur SDA; h. Melakukan verifikasi lapangan massal untuk memvalidasi hasil koreksi data; i. Melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW dan RDTR secara periodik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan wilayah; j. Untuk kegiatan tata ruang, sudah memiliki forum penataan ruang yang diketuai oleh sekretaris daerah dan anggota : Bapperida, Dinas PUPR, PRKP, DIhp, dinas pertanian, bag perekonomian dan SDA-P.	- terhadap efektivitas penanganan pengaduan; d. Meningkatkan pemeliharaan jalan/jembatan melalui UPTD Teknis di masing-masing kecamatan; e. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan dengan masterplan pengembangan jaringan jalan jangka Panjang. f. Membangun dan Mensosialisasikan Database Tunggal sebagai satu-satunya acuan data; g. Menetapkan Prosedur Tetap Updating Data setelah setiap kegiatan lapangan; h. Mengadakan Forum Validasi Data Berkala antar bidang terkait.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	84,85	85,69	100,99	673.748.465.701,66	597.776.134.840,72	88,72%	12,26%
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	86,05	85,24	99,05	325.993.149.162,00	316.013.171.247,00	96,94%	2,11%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	VC Ratio rata2	0.28 Rasio	0.32 Rasio	87.50	78.876.483.840,50	67.405.904.357,72	85.46%	2,04%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Luas Permukiman yang Sudah Terdapat PSU dengan Kondisi Layak	89,14%	89,14%	100	21.000.000.000	20.306.276.750	98,91%	1,09%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	44,83%	32,92%	73,43	14.462.210.680,00	14.064.611.281,00	97,25%	-23,82%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak	90,02%	93,92%	104,33	6.610.409.300,00	5.704.456.950,00	86,30%	34,80%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persampahan	53,85%	56,61%	105,12	3.834.750.000,00	3.819.225.350,00	99,60%	5,52%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	45,13%	40,9%	90,63	73.087.468.000,00	71.799.603.100,00	98,24%	-7,61%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Perlindungan Kawasan Rawan Banjir	87,55%	88,93%	101,58	94.972.501.619,17	88.047.658.679,00	92,59%	8,99%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang Tertata	30%	43,83%	146,10	53.408.376.169,99	9.191.511.932,00	17,21%	128,89%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketidaksesuaian KKPR yang Ditindaklanjuti	45,13%	40,9%	90,63	1.503.116.930,0	1.423.715.194,00	98,24%	-7,61%

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

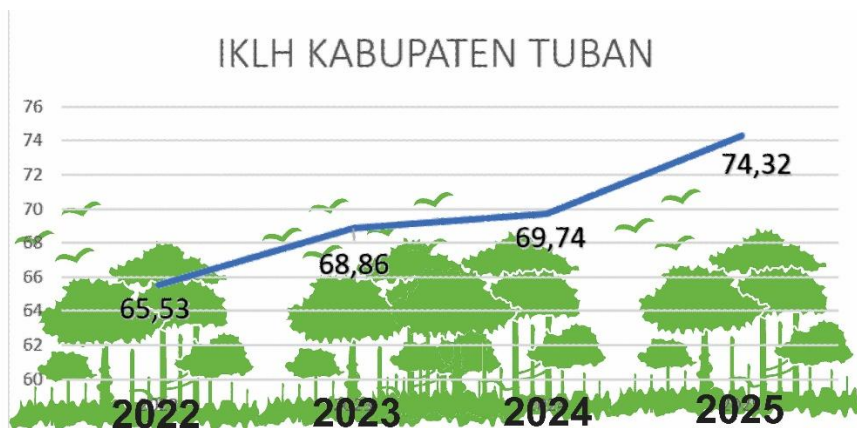
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencatatkan angka sebesar **74,32** di Tahun **2025**. Jika disandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar **74,85**, maka tingkat realisasi capaian adalah sebesar **99,29%**. Meskipun secara angka kumulatif belum sepenuhnya menyentuh target yang dicanangkan, skor 74,32 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup secara umum berada pada kategori "**Baik**".



No	Indikator	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,72	75.85
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,89	78.01
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,39	64.85
	IKLH Kabupaten Tuban	69,74	74,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Tahun 2025

Tabel 3.4 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Grafik 3.2 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban tercatat pada tahun 2022 sebesar 65,53 poin. Kemudian capaian tahun 2023 meningkat drastis menjadi 68,86 poin. Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban mengalami kenaikan

menjadi 74,32. Capaian IKLH Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga capaian tahun 2025.

Indikator Komponen	Perbandingan	
	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur
Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,01	74,45
Indeks Kualitas Air (IKA)	75,85	73,07
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,85	63,97
IKLH	74,32	73,43

Sumber : DLHP Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel 3.5 Perbandingan IKLH Kabupaten Tuban dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Secara keseluruhan, Kabupaten Tuban menunjukkan performa kualitas lingkungan hidup yang lebih unggul dibandingkan rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur pada seluruh indikator yang diukur. Berikut adalah rincian perbandingannya:

- 1) Indeks Kualitas Udara (IKU) : Kabupaten Tuban mencatatkan angka 78,01, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 74,45. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah Tuban relatif lebih bersih dan sehat dibandingkan rata-rata provinsi.
- 2) Indeks Kualitas Air (IKA) : Pada sektor perairan, Tuban kembali unggul dengan nilai 75,85, sementara Jawa Timur berada di angka 73,07. Selisih ini mengindikasikan upaya pengelolaan sumber daya air di Tuban berjalan lebih efektif daripada rata-rata wilayah lain di Jawa Timur.
- 3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) : Indikator kualitas lahan merupakan angka terendah bagi kedua wilayah dibandingkan indeks lainnya. Namun, Tuban tetap memimpin dengan angka 64,85, sedikit di atas capaian provinsi yang sebesar 63,97. Meskipun unggul, sektor ini memerlukan perhatian lebih intensif karena angkanya masih berada di bawah kategori "sangat baik".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Indeks Kualitas Air (IKA) Tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh: - Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair; - Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair; - Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/kelompok masyarakat yang concern terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai.	- Pemantauan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan pada badan air yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; - Penerbitan ijin lingkungan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan usaha penghasil limbah cair melalui Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan penanganan atas pengaduan lingkungan hidup yang berpotensi mencemari badan air melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;	- Meminimalisir buangan limbah domestik ke badan air melalui Program Pengelolaan Persampahan; dan - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; - Meningkatkan kegiatan konservasi pada sekitaran area mata air untuk menjaga debit air.

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup dikarenakan adanya penambahan parameter PM2.5 dimana alat yang mengukur PM2.5 ini belum ada semua di titik uji yang diperuntukkan untuk mengukur kualitas udara. Untuk menjaga kualitas udara supaya lebih baik, akan dilakukan dengan:	1. Meningkatkan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara; 2. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;	1. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Penyediaan Transportasi Publik; 3. Meningkatkan kegiatan gemar bersepeda (gowes) dan pelaksanaan Car Free Day yang membudaya sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari;	
3. Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh: a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik	1. Terasering dan Sabuk Hijau: Menerapkan teknik konservasi tanah pada lahan pertanian dengan kemiringan curam untuk mencegah erosi.	1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL): Melakukan penanaman kembali di lahan kritis, terutama di kawasan hutan negara maupun hutan rakyat. 2. Gerakan Menanam Pohon: Menggalakkan program "Satu Orang Satu Pohon" atau	

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Alternatif solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah; b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau di masing-masing lokasi/tapak kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam dokumen lingkungan; c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan <i>deleniasi</i> RTH dan <i>update</i> data pada <i>website</i> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.	2. Pemulihan Lahan Bekas Tambang: Memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang (batu kapur/tanah liat) agar melakukan reklamasi dan revegetasi pasca-tambang secara nyata, bukan sekadar administratif	kewajiban menanam pohon bagi pengembang perumahan dan industri di Tuban. 3. Hutan Kota: Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area perkotaan untuk memenuhi target minimal 30% dari luas wilayah.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

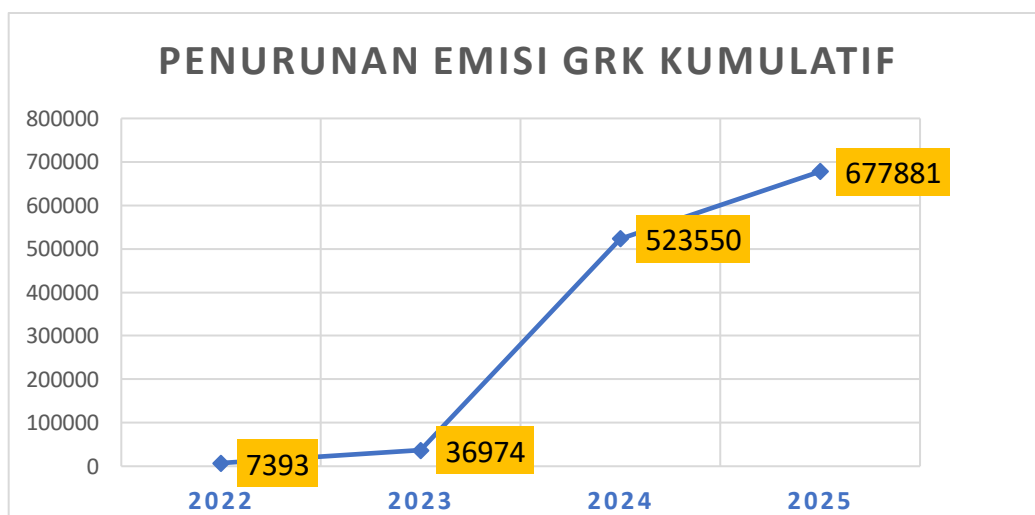
No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,85	74,35	99,29	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61	12,67
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran Udara	59.50%	47.06%	126.43%	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00	96.26%	96.26%
		Persentase Pencemaran Air	54%	15.38%	351.11%				
		Persentase Lahan Kritis	27.94%	27.94%	100.00%				
3	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	29.53%	26.04%	88.18%	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%	3.02%
		Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	39.20%	38.75%	98.85%				
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Kawasan KEHATI yang Dikelola	9 Ha	9 Ha	100.00%	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%	3.05%
5	Program Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah dengab kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar	24,39	100.00	410	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61%	13,39%
		Ketepatan waktu tanggap pasca bencana	15	15	100.00				
		Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	100.00	100.00	100.00				
		Persentase penanganan darurat bencana dan logistik	100.00	100.00	100.00				

C. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Merupakan indikator baru dalam penyusunan dokumen perencanaan. Perhitungan potensi penurunan emisi GRK Kumulatif ini dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA). Capaian potensi penurunan emisi GRK kumulatif Kabupaten Tuban terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menegaskan keseriusan dalam pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Perhitungan dilakukan



secara kumulatif sehingga untuk realisasi tahun berikutnya merupakan penjumlahan dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Pada tahun 2025 realisasi Penurunan Emisi GRK Kumulatif 677.881Ton CO₂-eq.



Sumber : DLHP Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.3 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Dari Grafik diatas menunjukkan tren kenaikan yang positif secara konsisten. Karena ini adalah data **kumulatif**, angka yang meningkat setiap tahun menandakan bahwa upaya mitigasi atau aksi penurunan emisi terus berjalan dan hasilnya terus terakumulasi dari tahun ke tahun.

- 2022 - 2023 (Fase Awal): Pertumbuhan cenderung landai, naik dari 7.393 menjadi 36.974 ton CO2 eq. Ini biasanya merupakan tahap awal implementasi kebijakan atau inventarisasi data dari sektor-sektor kunci.
- 2023 - 2024 (Lonjakan Signifikan): Terjadi kenaikan sangat tajam dari 36.974 ke 523.550 ton CO2 eq (meningkat lebih dari 14 kali lipat). Hal ini mengindikasikan adanya program mitigasi skala besar yang mulai terealisasi atau masuknya data dari sektor industri dan energi yang dominan.
- 2024 - 2025 (Konsolidasi): Kenaikan berlanjut hingga mencapai 677.881 ton CO2 eq. Meskipun tetap naik, kemiringan grafiknya sedikit lebih landai dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan fase pemeliharaan atau keberlanjutan program.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Sektor Pertanian: Penggunaan varietas padi rendah emisi dan manajemen pengairan (irigasi berselang) di lahan sawah Tuban. Sektor Kehutanan: Upaya rehabilitasi lahan dan peran hutan produksi (bekerja sama dengan KPH Perhutani) sebagai penyerap karbon alami. Sektor Energi & Transportasi: Inisiatif efisiensi energi di industri serta penggunaan transportasi ramah lingkungan.	- Gerakan penanaman pohon yang berfungsi menyerap emisi GRK harus lebih digalakkan. - Emisi GRK dari sektor industri perlu dikelola dengan upaya penangkapan atau konversi untuk mengurangi dampak negatifnya. - Transportasi umum perlu dioptimalkan sebagai alternatif untuk mengurangi emisi GRK di Tengah tingginya mobilitas penduduk - Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor transportasi dan industri perlu ditingkatkan guna menekan emisi GRK.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	623.550	677.851	108,71	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61	22,09
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran Udara	59.50%	47.06%	126.43%	2,310,704,359.81	2,224,177,715.00	96.26%	96.26%
		Persentase Pencemaran Air	54%	15.38%	351.11%				
		Persentase Lahan Kritis	27.94%	27.94%	100.00%				
3	Program Pengelolaan Persampahan	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	29.53%	26.04%	88.18%	27,968,193,600.00	25,310,093,605.00	90.50%	3.02%
		Proporsi Rumah Tanggga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	39.20%	38.75%	98.85%				
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Kawasan KEHATI yang Dikelola	9 Ha	9 Ha	100.00%	127,551,600.00	123,663,690.00	96.95%	3.05%
5	Program Penanggulangan Bencana	Persentase wilayah dengab kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar	24,39	100.00	410	3.943.599.694	3.415.640.160	86,61%	13,39%
		Ketepatan waktu tanggap pasca bencana	15	15	100.00				
		Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	100.00	100.00	100.00				
		Persentase penanganan darurat bencana dan logistik	100.00	100.00	100.00				

Misi 2 Tujuan 2

Misi 2 : “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif” didukung 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran

Pada Tujuan 2 (dua) terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan</i>	PDRB Per Kapita	71,99	Belum Rilis	-
	Tingkat Kemiskinan	13,54	14,13	95,64

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan</i>	PDRB Per Kapita	75,45	Belum Rilis	-
	Tingkat Kemiskinan	11,38	14,13	75,83

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional

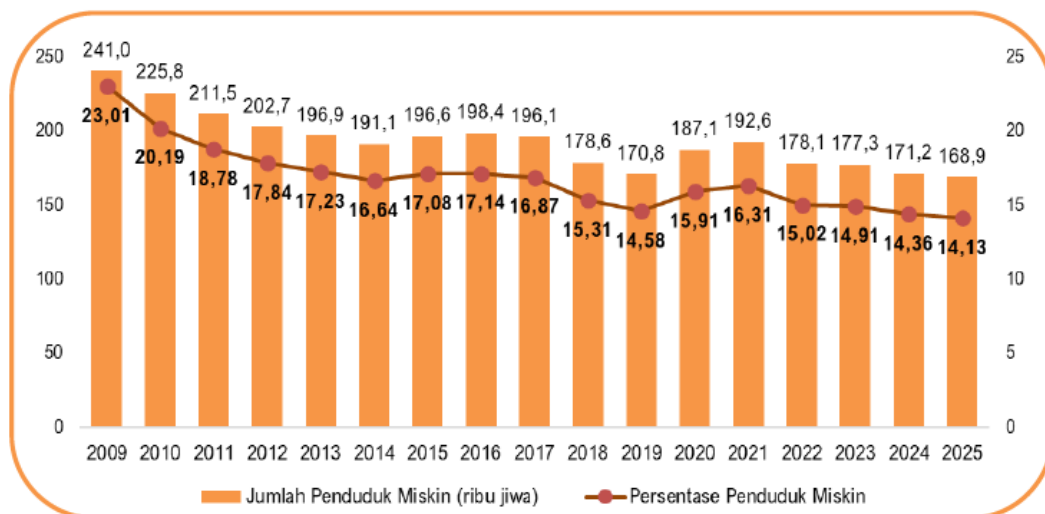
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Kab. Lamongan	Kab. Bojonegoro	Prov. Jawa Timur
1	2	3		4	5
<i>Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan</i>	PDRB Per Kapita	Belum Rilis	-	-	-
	Tingkat Kemiskinan	14,13	12,03	11,49	9,50

Tingkat Kemiskinan

Secara umum, selama periode tahun 2009-2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2015, 2016, 2020, dan 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2015



dan 2016 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Adapun kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 terjadi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia secara global. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2009 sampai 2025.



Sumber : Bapperida Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Tahun 2009-2025

Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban berkurang sekitar 2,38 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, yaitu dari 171,2 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,9 ribu jiwa pada Maret 2025. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, yaitu dari 14,36 persen pada Maret 2024 menjadi 14,13 persen pada Maret 2025. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah

pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Dengan kata lain, Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode tahun 2009-2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu mencapai 9,73 persen dibanding tahun 2009. Sedangkan kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 3,41 persen. Perkembangan Garis Kemiskinan tersebut mengikuti tingkat inflasi atau perkembangan harga komoditas makanan dan non makanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 Tuban sebesar 4,28 persen atau turun sebesar 0,12 persen poin jika dibandingkan TPT Agustus 2023 yang sebesar 4,40 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan pasar tenaga kerja, meskipun sebagian besar pekerja masih terserap di sektor informal.
2. Laju inflasi menunjukkan penurunan. Inflasi Jawa Timur pada periode Maret 2024–Maret 2025 sebesar 0,77 persen, lebih rendah jika dibandingkan inflasi pada periode Maret 2024–Maret 2023 sebesar 3,04 persen. Inflasi yang rendah membantu menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2025 Jawa Timur sebesar 111,61, lebih rendah dibandingkan NTP Maret 2024 yang sebesar 114,22. Artinya, daya beli petani pada bulan Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 menurun karena kenaikan harga hasil pertanian pada bulan Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 relatif lebih rendah. Sedangkan kenaikan harga biaya produksi serta barang dan jasa yang dikonsumsi petani pada bulan Maret 2025 dibandingkan Maret 2024 relatif lebih tinggi. Sehingga berpotensi memperlambat penurunan kemiskinan di perdesaan.

4. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 sebesar 3,86 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,37 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi yang melambat membuat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat tidak optimal.
5. Laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tuban tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2024 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,78 persen (y-on-y). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli, tetapi manfaatnya belum merata sehingga kelompok miskin tidak sepenuhnya merasakan dampaknya.

Upaya Percepatan Pengentasan

Kemiskinan difokuskan pada bidang pertanian dan pariwisata dengan tujuan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan dan meningkatkan kualitas sumber daya



manusia. Peningkatan akses terhadap layanan dasar berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Sedangkan, Perlindungan sosial berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan. Selain peningkatan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan pendapatan juga dipengaruhi langsung oleh penurunan beban pengeluaran.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai acuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diantaranya yaitu:

1. Perbaikan program perlindungan sosial; (Perlindungan dalam menghadapi goncangan: jatuh sakit, kematian, kehilangan pekerjaan, bencana alam)
2. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; (Pemenuhan kebutuhan pendidikan, pangan, kesehatan, infrastruktur)
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; (Peningkatan kapasitas masyarakat miskin agar lebih dapat berupaya mandiri)

4. Pembangunan inklusif. (Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan)

Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Tuban pada tahun 2025, langkah-langkah inovatif perlu diterapkan bersamaan dengan Nomenklatur yang telah ditetapkan. Inovasi yang perlu dilakukan untuk memberikan daya ungkit yang tinggi dalam penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah melalui strategi:

1. Pengembangan Kawasan Kampung Agrowisata;
2. Program “Petani Muda”; dan
3. *Marketing* untuk produk ikonik Tuban.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa potensi wisata untuk pengembangan Kawasan Agrowisata diantaranya lokasi strategis sebagai koridor lalu lintas perekonomian Pulau Jawa, keamanan dan ketertiban umum berjalan kondusif, serta peluang sektor unggulan pariwisata alam, budaya, dan religi yang berguna untuk pengembangan kawasan agrowisata. Pada potensi lingkungan Kabupaten Tuban memiliki kawasan pesisir dengan garis pantai sejauh 65 Km, dan luasnya lingkungan asri pedesaan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik agrowisata. Di samping itu, potensi pertanian Kabupaten Tuban yang dapat dimanfaatkan antara lain banyaknya jumlah petani dan tenaga kerja pertanian terutama petani milenial yang menggunakan teknologi, pendapatan utama penduduk dari sektor pertanian, dan lahan pertanian yang luas.

Guna mewujudkan adanya Kawasan Kampung Agrowisata diperlukan *enabling environment* sebagai berikut.

1. Kebijakan/regulasi mengenai pariwisata, pertanian, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan;
2. Dukungan dan komitmen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan agrowisata.

3.2.1. Sasaran pada Misi 2

Tujuan “*Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan*” didukung oleh 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 2 Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,06	Belum Rilis	-
	Rasio Gini	0,334	0,312	106,58
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	Belum Rilis	-
<i>Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah</i>	Presentase Desa Mandiri	46,95	81,03	172,58
	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	73,23	84,74
<i>Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	3,44	119,43
	Rasio Kewirausahaan	7,47	8,24	110,30
	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	119,01	102,17
<i>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</i>	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,50	62,39	99,82

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 1 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,29	Belum Rilis	-
	Rasio Gini	0,330	0,312	105,45
	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	2,74	Belum Rilis	-

Sasaran RPJMD 1	Indikator Sasaran 2	Target Akhir RPJMD 3	Capaian Tahun 2025 4	% Realisasi Capaian 2025 5
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	72,67	81,03	111,5
	Indeks Ketahanan Pangan	88,65	73,23	82,60
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,23	3,44	118,67
	Rasio Kewirausahaan	10,74	8,24	76,72
	Nilai Tukar Petani (NTP)	122,88	119,01	96,85
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	84,50	62,39	73,83

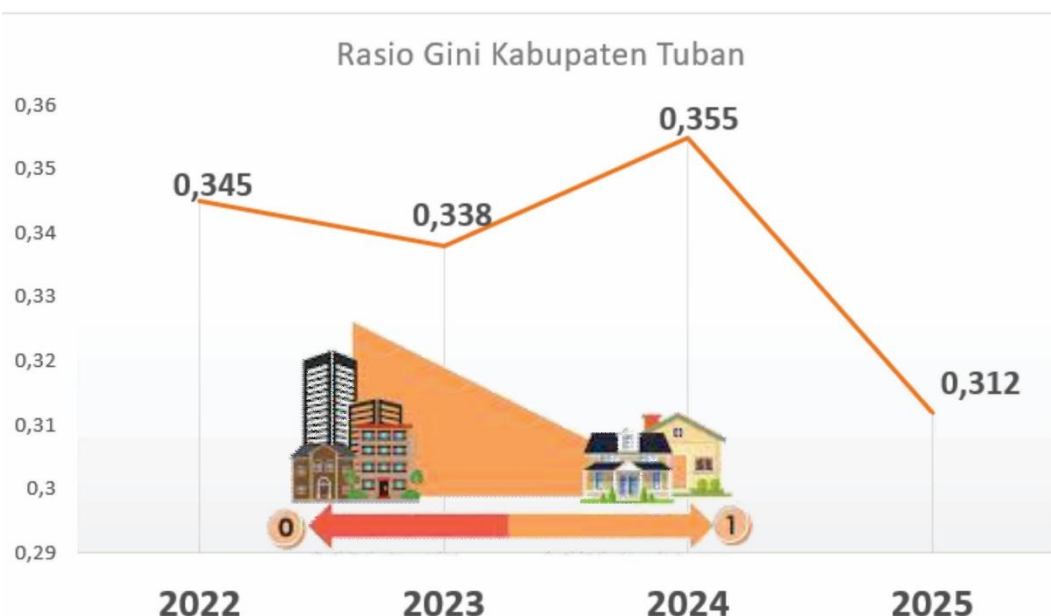
A. Rasio Gini

Koefisien Gini, atau yang dikenal sebagai Rasio Gini, merupakan salah satu metrik yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu populasi. Koefisien Gini didasarkan diri pada konsep kurva Lorenz, yang merupakan sebuah grafik pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu, seperti pendapatan, dengan distribusi uniform yang mencerminkan persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini diukur dalam rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks Gini mencerminkan tingkat pemerataan yang sempurna, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi dengan sangat merata di antara seluruh populasi. Sebaliknya, semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Dengan kata lain, nilai Indeks Gini yang mendekati 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Jadi, Indeks Gini yang berada pada rentang antara 0 (nol) hingga 1 (satu) memberikan gambaran sejauh mana distribusi pendapatan di suatu masyarakat dapat dianggap merata atau tidak merata. Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna, sementara nilai 1 (satu) mencerminkan tingkat ketimpangan yang sempurna. Penilaian terhadap tingkat ketimpangan menggunakan Gini Rasio mengacu pada standar tertentu, sebagaimana

dinyatakan dalam kriteria yang dikemukakan oleh Hera Susanti dan rekan-rekannya dalam buku "Indikator- Indikator Makro Ekonomi" (LPEM-FEUI, 1995). Menurut standar ini, Gini Rasio (GR) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai yang diperoleh:

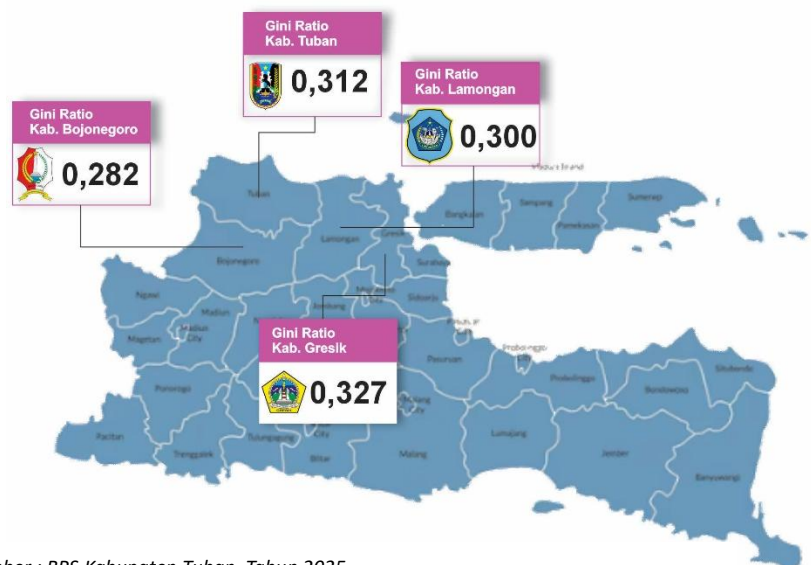
- Jika nilai GR < 0.3 , maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.
- Apabila nilai GR $0.3-0.5$, maka tingkat ketimpangan tersebut masuk dalam kategori sedang atau moderat.
- GR > 0.5 mengindikasikan ketimpangan tinggi.

Dengan pendekatan ini, setiap nilai Rasio Gini dapat dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketimpangan yang terkait. Standar penilaian ini memberikan pedoman untuk menginterpretasikan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu populasi dianggap memiliki Tingkat ketimpangan yang rendah, sedang, atau tinggi. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan target makro pembangunan untuk Rasio Gini sebesar **0,334**. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan data statistik terbaru, capaian kinerja aktual menunjukkan angka **0,312**. Capaian ini menunjukkan performa yang sangat positif karena berada di bawah target (0,022 poin lebih baik). Dalam konteks Rasio Gini, angka yang lebih rendah dari target menandakan bahwa pemerataan ekonomi di Kabupaten Tuban berjalan lebih efektif daripada yang diproyeksikan.



Grafik 3.5 Perbandingan Rasio Gini
Kabupaten Tuban beberapa Tahun Terakhir

Melihat grafik diatas Rasio Gini Kabupaten Tuban sangat Fluktuatif, Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2024, Kabupaten Tuban berhasil menekan angka ketimpangan secara signifikan pada tahun 2025. Penurunan ke angka 0,312 menunjukkan bahwa distribusi ekonomi di wilayah tersebut bergerak ke arah yang lebih inklusif dan merata. Tahun 2022 - 2023: Tren Penurunan (Perbaikan) Pada tahun 2022, Rasio Gini tercatat sebesar 0,345. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 0,338 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan atau pengeluaran masyarakat pada periode tersebut. Tahun 2023 - 2024: Lonjakan Ketimpangan Terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024, di mana angka Rasio Gini melonjak ke level 0,355. Ini adalah titik tertinggi dalam periode empat tahun terakhir, yang menandakan bahwa pada tahun tersebut kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin di Tuban sempat melebar. Tahun 2024 - 2025: Penurunan Drastis (Pemerataan Signifikan) Kabar baik terlihat pada transisi menuju tahun 2025. Rasio Gini turun drastis ke angka 0,312. Angka ini tidak hanya lebih rendah dari tahun sebelumnya, tetapi juga merupakan pencapaian pemerataan terbaik (paling rendah) dibandingkan tiga tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Gambar 3.6 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar Tahun 2025

Dalam konteks regional, capaian Rasio Gini Kabupaten Tuban sebesar 0,312 menempatkan wilayah ini pada posisi yang kompetitif namun memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung. Capaian 0,312 bagi

Kabupaten Tuban adalah performa yang solid karena masih berada di bawah target yang ditetapkan (0,334). Namun, jika melihat perbandingan dengan Bojonegoro dan Lamongan, terdapat potensi bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mempelajari praktik terbaik (best practices) dari wilayah tetangga tersebut—terutama dalam hal distribusi pendapatan di sektor pertanian dan pengelolaan dana bagi hasil migas agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Rasio Gini	1. Efektivitas Program Perlindungan Sosial: Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran (seperti BLT, PKH daerah, atau bantuan pangan) berhasil menjaga daya beli masyarakat di desil pendapatan terbawah. 2. Pertumbuhan Sektor Pertanian & UMKM: Tuban memiliki basis agraris yang kuat. Peningkatan produktivitas petani dan digitalisasi UMKM lokal memberikan kontribusi langsung pada pendapatan masyarakat di pedesaan, yang secara otomatis memperkecil kesenjangan dengan masyarakat perkotaan. 3. Penyaluran Tenaga Kerja Proyek Strategis: Adanya proyek-proyek besar (seperti industri kilang atau manufaktur) yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar	1. Mendorong pelaku usaha mikro di pasar-pasar tradisional untuk masuk ke ekosistem digital dan mendapatkan akses perbankan (finansial inklusif) agar skala ekonomi mereka meningkat. 2. Memastikan lulusan SMK dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Tuban memiliki keahlian yang relevan dengan industri besar di sana. Hal ini mencegah terjadinya <i>wage gap</i> (kesenjangan upah) yang terlalu jauh antara tenaga ahli luar dan tenaga kerja lokal. 3. Menjaga harga kebutuhan pokok (terutama beras, cabai, dan minyak goreng) tetap stabil. Inflasi yang tinggi paling memukul masyarakat miskin, yang jika tidak dikendalikan, dapat memperlebar kembali angka Rasio Gini.

	membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga yang sebelumnya pengangguran atau pekerja sektor informal. 4. Pemerataan Infrastruktur Perdesaan: Pembangunan jalan poros desa dan akses pasar yang lebih baik melalui Visi Bupati Tuban "Bangun Desa Noto Kutho" mempercepat perputaran ekonomi di wilayah pinggiran, sehingga ekonomi tidak hanya berpusat di area perkotaan Tuban saja.	
--	--	--

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan	Rasio Gini	0,334	0,312	106,58	4.702.419.587,5	3.929.012.960	83,55	23,02%
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	33,96%	33,96%	420.515.602,50	351.163.432	83,50%	-49,54%
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang Menanamkan Modal	10%	10%	100%	473.145.000	471.137.140	99,58%	0,42%
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	337.413.880	282.960.030	83,86%	16,14%
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)	3,68%	7,12%	193,47%	3.138.866.297	2.521.206.130	80,32%	113,15%
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pembaharuan Data Pelaku Usaha Industri	80%	80,38%	100,47%	332.478.808	302.546.228	90,00%	10,47%

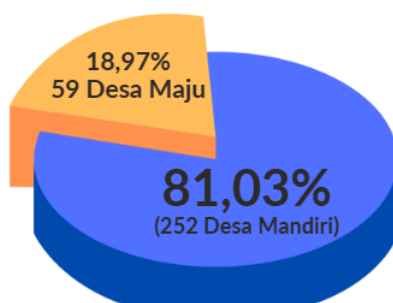
B. Presentase Desa Mandiri

Sesuai Visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2025-2030 (Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono) adalah **"Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan!"**. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi pembangunan daerah, kita



telah bergeser dari sekadar 'membangun desa' menjadi 'desa yang membangun'. Fokus utama bukan lagi sekadar pemenuhan infrastruktur dasar, melainkan penguatan kemandirian ekonomi dan tata kelola digital. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 bahwa Presentase Desa Mandiri di Kabupaten Tuban melampaui target kinerja yang ditetapkan target tahun 2025 yaitu 46,95% (146 desa mandiri) dengan capaian kinerja sebesar 81,03% (252 desa mandiri) dari 311 Desa yang ada di kabupaten Tuban.



Sumber : Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Tahun 2025

Bahwa mayoritas masyarakat desa di Tuban kini tinggal di wilayah yang memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, dan ketahanan sosial

yang lebih tangguh. Capaian ini memposisikan Tuban sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam transformasi desa di Jawa Timur.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

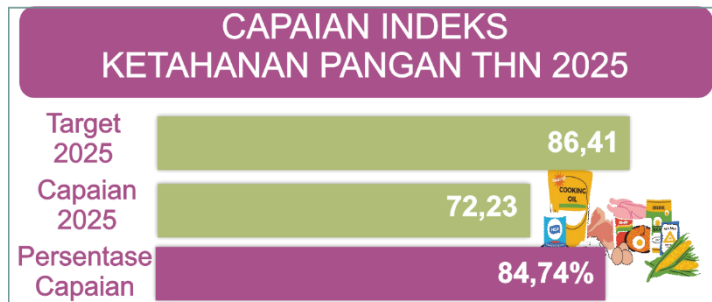
Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Persenatse Desa Mandiri	1. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meliputi fasilitas dan pendampingan dalam penyusunan APBDes dan Jaringan Informasi Desa sebanyak 311 desa. 2. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan desa pada 311 desa. 3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa meliputi fasilitas bantuan keuangan dana desa, fasilitas iuran BPJS kesehatan bagi perangkat desa, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi siskeudes di 311 desa. 4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa meliputi peningkatan kapasitas dan pendampingan BUM Desa.	1. Meningkatkan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) meliputi rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan TTG di desa. 2. Mempelopori Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) meliputi rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pencaangan BBGRM secara serentak di 311 desa. 3. Pengelolaan Aset Desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan aset desa bagi 311 desa. 4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD pada 311 desa.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	46,95	81,03	84,74	9.419.684.701	7.693.846.386	81,67	3,06%
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	73,94%	67,52%	91,32	8.146.427.524	7.334.343.118	90,03	1,29%
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Melakukan Pemberdayaan	18,5%	16,19%	87,51	1.205.341.787	291.951.268	88,37	-0,85
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-Rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	57,14	55,12	96,46	67.915.390	67.552.000	99,46	-3%

C. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. Ketahanan pangan itu sendiri merujuk pada kondisi di



mana semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi mereka untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat. Indeks Ketahanan Pangan sering digunakan oleh organisasi internasional seperti The Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyusun Global Food Security Index (GFSI), untuk menilai dan membandingkan ketahanan pangan antar negara. Negara-negara dengan skor tinggi di indeks ini dianggap memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, sementara negara dengan skor rendah sering kali menghadapi tantangan dalam hal produksi pangan, akses, dan stabilitas pasokan pangan. Realisasi Indeks Ketahanan Pangan sebesar **72,23** menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Tuban berada pada kategori Cukup Tahan, namun belum memenuhi target optimal sebesar **86,41**. Terdapat deviasi sebesar 14,18 poin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tantangan sepanjang tahun 2025.



Grafik 3.7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban dari tahun 2021 hingga 2025

Secara keseluruhan, Kabupaten Tuban sempat menunjukkan performa yang sangat impresif dan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, Memasuki tahun 2025, terjadi penurunan yang cukup tajam pada Indeks Ketahanan Pangan menjadi 72,23. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam sektor pangan, seperti kendala distribusi, perubahan iklim yang memengaruhi produksi, atau faktor ekonomi lainnya yang menekan ketahanan pangan daerah. Penurunan drastis pada tahun 2025 memberikan sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk segera melakukan evaluasi dan penguatan kembali kebijakan ketahanan pangan agar dapat kembali ke level optimal.



Tabel 3.6 Perbandingan Indeks Kethanan Pangan Kabupaten Tuban dengan Nasional Tahun 2025

Meskipun angka IKP Kabupaten Tuban (72,23) berada sedikit di bawah rata-rata nasional (73), capaian ini menunjukkan performa yang relatif kuat dan berada dalam kategori ketahanan pangan yang Tahan/Stabil. Selisih yang hanya sebesar 0,77 poin mengindikasikan bahwa infrastruktur dan ketersediaan pangan di Tuban hampir setara dengan standar rata-rata Indonesia secara keseluruhan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Ketahanan Pangan	Penyebab tidak tercapainya IKP yaitu dikarenakan adanya modernisasi indikator, yang awalnya 9 indikator bertambah menjadi 12 indikator. Pemutakhiran metodologi pengukuran ini mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh internasional	Berbagai upaya akan dilakukan atas pencapaian kinerja, diantaranya dalam bidang perikanan berupa pemberian bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan, rehabilitasi TPI, rehabilitasi kolam di BBI Singgahan dan Rengel. Selain itu pemberian

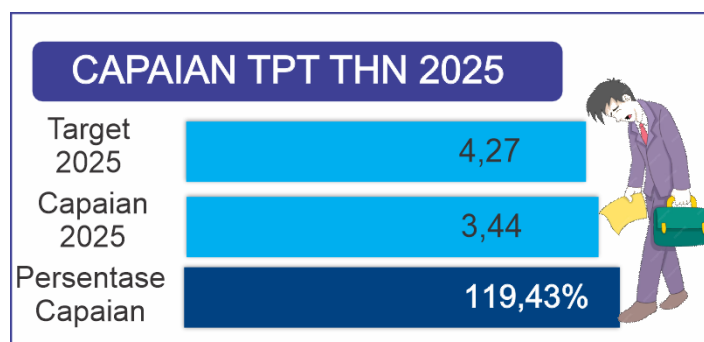
	seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)), Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), dan pengukuran ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FOOD and Agriculture Organization (FAO). Dengan adanya tambahan indikator tersebut maka akan mengurangi angka komposit dari perhitungan IKP. Berdasarkan data backcasting tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional dapat diketahui bahwa angka indeks ketersediaan menjadi faktor utama penurunan IKP di Kabupaten Tuban. Pada indeks ketersediaan ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, dan rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari 4 indikator tersebut, 3 diantaranya adalah indikator baru.	bantuan hibah berupa sarana dan prasarana pertanian juga terus ditingkatkan diantaranya pembangunan jaringan irigasi tersier, pompanisasi, pengembangan area tanam untuk bawang merah dan kacang tanah, pemberian UPPO, alsintan dan lain sebagainya. Dalam rangka ketahanan pangan dan penurunan angka stunting diberikan bantuan kebun B2SA untuk 41 keluarga resiko stunting. Pelatihan Juleha (Juru Sembelih Halal), Sosialisasi NKV bagi pelaku usaha produksi peternakan, pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin, pelaksanaan berbagai jenis kajian akademik diantaranya yaitu Kajian Akademik untuk Perhitungan Nilai Tambah, Integrated Farming, Updating Lahan Baku Sawah, FSVA, NBM, Skor PPH, dan Tambat Labuh.
--	--	---

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	86,41	72,23	84,74	4.912.487.505	3.287.657.487	66,92	5,3%
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	77,4	65,63	84,79	85.587.857	84.792.300	99,07	-14,28
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan Pangan (%)	92,78	97	104,54	4.720.913.406	3.097.118.417	65,60	38,94
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa tahan pangan (kategori 5 dan 6)	100	12,5	12,5	105.986.242	105.746.770	99,77	-87,27

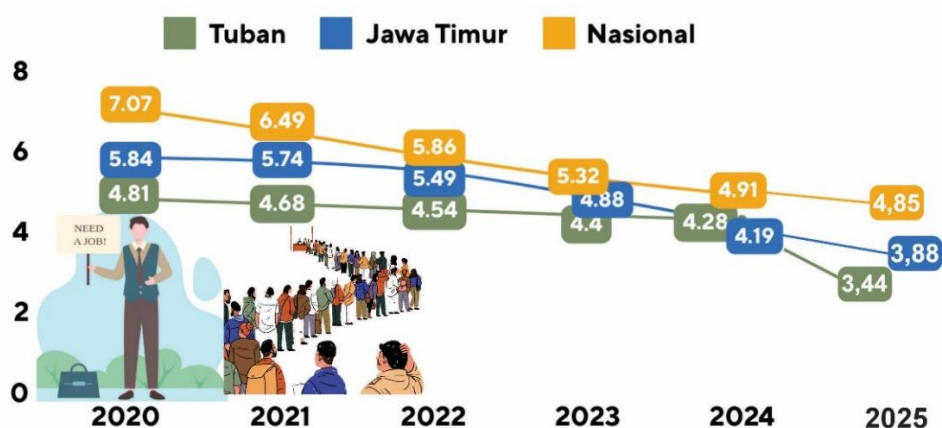
D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Rasio persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja merupakan indikator kritis dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kabupaten Tuban mencapai tingkat



pengangguran terbuka yang lebih baik daripada capaian tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi maupun Nasional, menunjukkan performa yang positif. Meskipun Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, permasalahan pengangguran tetap merupakan isu signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengatasi permasalahan pengangguran menjadi prioritas utama untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan performa yang **sangat baik** dalam upaya menekan angka pengangguran pada tahun 2025. Berdasarkan data statistik terkini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban tercatat sebesar **3,44%**. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, hanya sekitar 3 sampai 4 orang yang belum terserap oleh lapangan kerja.

Dengan realisasi sebesar 3,44% terhadap target 4,27%, maka capaian kinerja Kabupaten Tuban mencapai 119,43%. Perlu diingat bahwa pada indikator TPT, semakin rendah angka realisasi dibandingkan target, maka kinerja dianggap semakin baik.



Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025 dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren penurunan pengangguran yang konsisten di semua level (Kabupaten, Provinsi, dan Nasional) sejak tahun 2020. Namun, Kabupaten Tuban secara konsisten berhasil menjaga angka pengangguran di bawah angka rata-rata Jawa Timur dan Nasional selama enam tahun berturut-turut arti grafik tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Tuban tidak hanya berhasil memulihkan kondisi ketenagakerjaan pasca-pandemi (2020), tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem lapangan kerja yang lebih efektif dibandingkan rata-rata provinsi maupun pusat. Capaian 3,44% ini mencerminkan keberhasilan sinergi antara investasi industri, pemberdayaan UMKM, dan program pelatihan tenaga kerja di daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Ketahanan Pangan	1. Program stimulus bagi UMKM dan kemudahan perizinan usaha melalui sistem digital meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor informal dan mandiri. 2. Penggunaan Dana Desa untuk proyek infrastruktur lokal memberikan lapangan kerja sementara namun masif bagi masyarakat di tingkat desa. 3. Sebagai sektor dominan, pertanian mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan, mencegah terjadinya lonjakan pengangguran akibat urbanisasi yang tidak terkendali. 4. Operasionalisasi penuh dan fase pemeliharaan pada proyek-proyek	1. Menyelenggarakan pelatihan kerja yang tersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sesuai dengan kebutuhan spesifik industri berat yang ada di Tuban, agar tenaga kerja lokal tidak hanya mengisi posisi <i>unskilled labor</i>. 2. Memperkuat platform informasi lowongan kerja terpadu milik Pemkab yang real-time, guna mempercepat pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja (mengurangi masa tunggu kerja). 3. Mendorong digitalisasi pemasaran bagi wirausaha muda agar bisnis mereka lebih <i>scalable</i> (mudah berkembang), sehingga mampu

	besar (seperti City Mall Tuban) menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.	merekrut lebih banyak karyawan dari lingkungan sekitar. 4. Mendorong investasi atau pengembangan pusat ekonomi baru di wilayah Tuban bagian selatan agar konsentrasi lapangan kerja tidak hanya menumpuk di wilayah pesisir/utara yang menjadi pusat industri.
--	---	--

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	86,41	72,23	119,43	29.175.518.835	28.546.002.354	97,84	21,58%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5,00	9,26	185,20	22.732.874.490	22.719.694.700	99,52%	85,68%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan(%)	83,91	85,05	101,36	2.605.305.764	2.345.272.549	90,02%	11,34%
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60,62	61,05	100,71	2.352.234.474	2.120.510.700	90,15%	10,56%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	13,14	13,14	100	42.424.610	29.244.590	68,93	31,07%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	35,1	34,92	99,49	52.100.500,00	35.797.870	68,71	30,78%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	22,02	22,02	100	1.390.578.997	1.295.481.945	93,16	6,84%

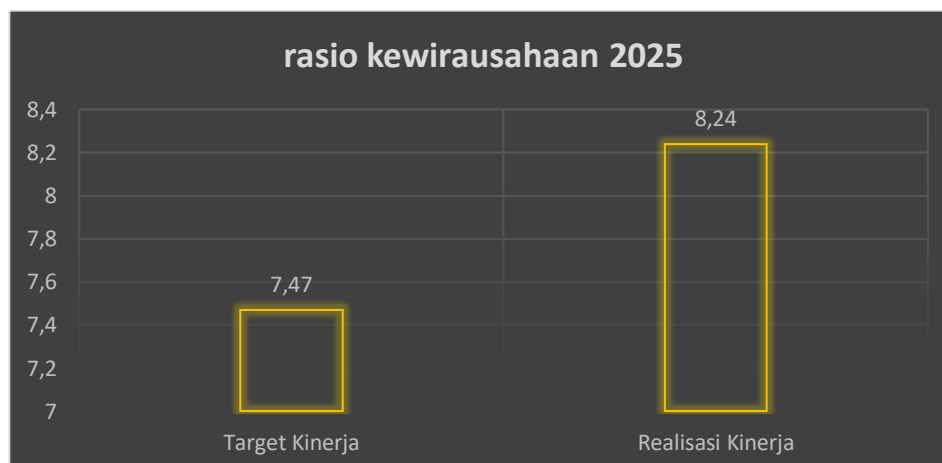
E. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah wirausaha (pemilik usaha/entrepreneur) dengan total jumlah Angkatan kerja di suatu wilayah. Angka ini biasanya dinyatakan dalam bentuk **persentase**. Semakin tinggi rasionya, semakin dianggap maju tingkat kemandirian ekonomi dan daya saing negara tersebut.

Rasio kewirausahaan sering dijadikan parameter kemajuan sebuah wilayah karena beberapa alasan:

- Penciptaan Lapangan Kerja: Wirausaha bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga membuka lowongan bagi orang lain.
- Inovasi: Wirausaha cenderung mencari cara baru untuk memecahkan masalah, yang mendorong kemajuan teknologi dan layanan.
- Ketahanan Ekonomi: Negara dengan banyak pelaku usaha kecil dan menengah biasanya lebih stabil saat menghadapi krisis global.

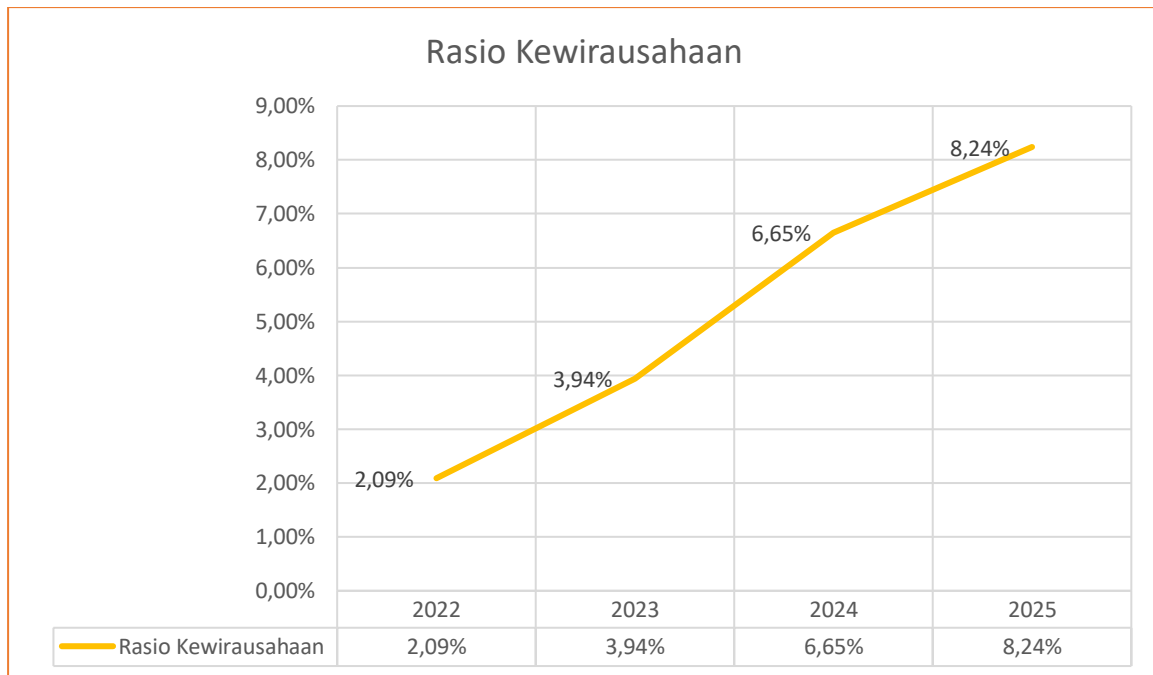
Realisasi **Rasio Kewirausahaan** pada tahun 2025, Kabupaten Tuban berhasil menembus angka 8,24% dengan target kinerja 7,47% dengan capaian kinerja 110,30.



Grafik 3.9 Perbandingan Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Tuban dengan target tahun 2025

Dengan rasio yang mencapai **8,24%**, Kabupaten Tuban kini berada dalam jalur yang tepat menuju struktur ekonomi yang lebih mandiri. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk di Tuban, terdapat setidaknya 8 orang yang menjadi penggerak ekonomi sebagai wirausaha. Hal ini berdampak langsung pada:

- a) Penurunan Angka Pengangguran: Melalui terciptanya lapangan kerja baru secara mandiri.
- b) Peningkatan PDRB Daerah: Kontribusi sektor swasta yang semakin solid terhadap pendapatan daerah.
- c) Ketahanan Ekonomi: Masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi karena memiliki basis usaha yang beragam.



Grafik 3.10 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Kabupaten Tuban menunjukkan tren pertumbuhan yang progresif dan konsisten dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan selama empat tahun terakhir. Grafik pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang semakin mandiri. Secara keseluruhan, dari tahun 2022 hingga 2025, Kabupaten Tuban berhasil meningkatkan Rasio Kewirausahaan sebesar 6,15%. Tren positif yang stabil ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong sektor swasta telah berjalan sangat efektif, menciptakan struktur masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Rasio Kewirausahaan	1. Terfasilitasinya akses pemasaran, promosi dan permodalan bagi sebagian besar pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. 2. Literasi Digital : Pelatihan pemasaran digital untuk modernisasi transaksi. 3. Standarisasi Produk: Fasilitasi sertifikasi Halal dan perbaikan desain pengemasan (<i>branding</i>) agar produk lokal mampu bersaing di ritel modern. 4. Pemerintah daerah Kabupaten Tuban gencar melakukan renovasi pasar tradisional (seperti pembangunan Pasar Induk) dan memfasilitasi pameran/festival secara rutin. Hal ini memperpendek jarak antara produsen dan konsumen serta membuka akses jejaring usaha (<i>business networking</i>) yang lebih luas bagi para pemula. 5. Adanya tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tuban menunjukkan bahwa masyarakat Tuban semakin beralih dari pola pikir "pencari kerja" menjadi "pencipta lapangan kerja".	1. Mendorong UMKM Tuban tidak hanya "berjualan online", tetapi mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional. 2. Fasilitasi platform <i>Big Data</i> daerah yang menghubungkan stok produk UMKM dengan kebutuhan industri besar di Tuban. 3. Mewajibkan perusahaan besar di Tuban untuk menyerap minimal 20-30% kebutuhan operasional dari wirausaha lokal yang tersertifikasi. 4. Memberikan insentif pajak daerah atau kemudahan izin bagi wirausaha yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri menjadi produk bernilai tambah atau energi terbarukan. 5. Integrasi sektor pariwisata dengan kewirausahaan desa (Edu-wisata). Misalnya, desa penghasil batik tenun tidak hanya menjual kain, tapi juga menjual pengalaman/kursus membatik.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Rasio Kewirausahaan	7,47	8,24	110,30	29.175.518.835	28.546.002.354	97,84	12,46%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	5,00	9,26	185,20	22.732.874.490	22.719.694.700	99,52	85,68%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan(%)	83,91	85,05	101,36	2.605.305.764	2.345.272.549	90,02	11,34%
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	60,62	61,05	100,71	2.352.234.474	2.120.510.700	90,15	10,56%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	13,14	13,14	100	42.424.610	29.244.590	68,93	31,07%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	35,1	34,92	99,49	52.100.500,00	35.797.870	68,71	30,78%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	22,02	22,02	100	1.390.578.997	1.295.481.945	93,16	6,84%

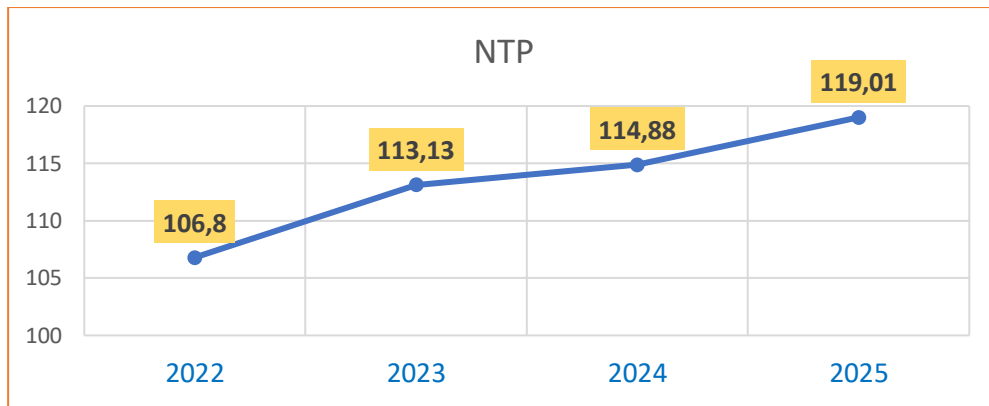
F. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sebagai daerah agraris, fokus pembangunan di Tuban perlu diarahkan pada sektor pertanian, bukan sekadar mempertahankan metode tradisional, melainkan mendorong transformasi ke arah modernisasi dan industrialisasi pertanian (agroindustri). Transformasi ini



diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian, sehingga posisi petani, khususnya petani produsen, semakin kuat. Perubahan ini juga dapat memperbaiki daya tawar petani dan mendukung posisi daerah baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, diperlukan data pendukung yang lengkap dan aktual guna mengevaluasi dan merencanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan rasio antara indeks harga hasil pertanian yang diterima petani dengan indeks harga barang atau jasa yang dibayarkan petani. NTP mencerminkan kemampuan petani dalam menukarkan produk hasil pertanian dengan kebutuhan produksi mereka. Oleh karena itu, publikasi NTP menjadi alat penting untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan pembangunan sektor ini. Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan nilai tukar dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, semakin baik input produksi maupun daya beli petani terhadap produk konsumsi rumah tangga, sehingga petani relatif lebih sejahtera. Oleh karena itu, NTP dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Rata-rata NTP Kabupaten Tuban tahun 2025 sebesar 119,01 lebih tinggi dari target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu 116,48 dengan realisasi kinerja 102,17%.



Grafik 3.11 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

nilai NTP secara konsisten berada di atas angka 100, ini mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan atau daya beli petani di Tuban terus meningkat dalam empat tahun terakhir. NTP secara konsisten berada di atas angka 100, ini mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan atau daya beli petani di Tuban terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten setiap tahunnya. Data ini mencerminkan keberhasilan kebijakan sektor pertanian atau kondisi pasar yang menguntungkan bagi petani di Kabupaten Tuban. Pertumbuhan yang stabil ini sangat baik untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan Nasional, NTP Kabupaten Tuban 2025 masih berada di bawah NTP nasional (123,26), namun di atas NTP Jawa Timur (118,96).



Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Nilai Tukar Petani :

1. Sub sektor tanaman pangan: (1) optimalisasi pengelolaan lahan melalui penerapan Manajemen Tanaman Sehat (MTS); (2) penggunaan benih unggul tahan banjir dan kekeringan; (3) perbaikan jaringan irigasi menjadi langkah prioritas; dan (4) penerapan pola tanam terpadu, seperti: tumpang sari dan mina padi dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi risiko kegagalan akibat cuaca.
2. Peningkatan produktivitas Total Factor Productivity (TFP). Peningkatan TFP dilakukan dengan: inovasi manajemen atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, penerapan teknologi modern seperti mekanisasi, sistem irigasi yang efisien, benih unggul, serta adopsi praktik pertanian berkelanjutan.
3. Pemanfaatan teknologi, seperti: greenhouse dapat membantu mengatasi kendala iklim dan meningkatkan hasil panen. Sub sektor peternakan: pelatihan manajemen usaha yang efisien bagi peternak, yang mencakup perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan penerapan teknologi modern dalam budidaya.
4. Sub sektor perikanan: (1) mendorong optimalisasi perikanan budidaya laut, melalui pemanfaatan teknologi, seperti keramba jaring apung dan pemberian pelatihan teknik budidaya modern; (2) perikanan tangkap perlu ditingkatkan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan dan efisien; (3) revitalisasi perikanan perairan umum melalui program restocking ikan dan pengelolaan ekosistem.
5. Meskipun telah mencapai angka 81,03%, Kabupaten Tuban tetap memperkuat Langkah-langkah di tahun selanjutnya :

Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025, Kabupaten Tuban tetap memperkuat langkah-langkah di tahun selanjutnya :

1. Menerapkan kebijakan harga dasar atau harga acuan minimum komoditas utama (padi, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur ayam, tembakau dan tebu). Hal ini untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar.
2. Penyediaan subsidi pupuk dan benih sangat penting untuk menekan biaya produksi, terutama mengingat harga input yang dirasakan masih mahal oleh petani
3. Penguatan rantai pasok melalui digitalisasi pemasaran dengan memanfaatkan platform e-commerce juga akan membantu petani menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing produk.

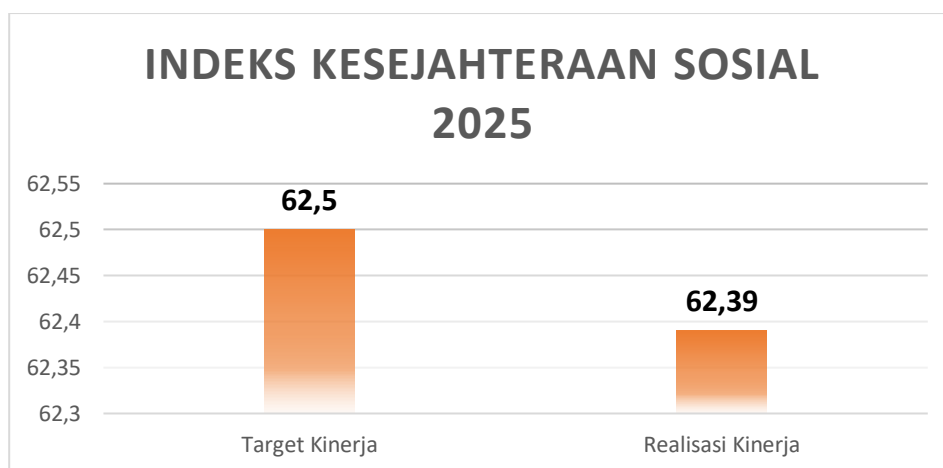
4. Menciptakan lingkungan pemberdayaan usaha pertanian melalui pengendalian inflasi dan gejolak ekonomi, penguatan kelembagaan, penguatan rantai pasok, fasilitasi investasi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi.
5. Sub sektor peternakan: pembangunan pasar ternak modern serta infrastruktur pemasaran akan memperkuat rantai pasok, termasuk pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas penyimpanan hasil peternakan, dan akses langsung ke konsumen atau pelaku industry.
6. Sub sektor perikanan: (1) penguatan rantai pemasaran melalui pembentukan koperasi nelayan, penyediaan fasilitas cold storage, dan pembangunan infrastruktur distribusi untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan memotong rantai distribusi; (2) perluasan pasar baik domestik maupun ekspor harus dilakukan dengan menciptakan branding produk perikanan unggulan Kabupaten Tuban agar memiliki daya saing tinggi; (3) Pemerintah daerah perlu memberikan subsidi sarana produksi, seperti pakan, benih berkualitas, dan BBM untuk kapal; (4) penerapan kebijakan harga dasar untuk komoditas perikanan dan perluasan program asuransi

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,48	119,01	102,17	11.693.969.082	7.128.500.547	60,95	41,21%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah total produksi produk peternakan (daging) (ton)	21.829	24.534,77	112,40	5.353.614.911	2.595.342.593	48,48	63,92%
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	37.539,79	37.648,53	100,29	2.315.818.989	1.284.451.610	55,46	44,83%
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota	52.791,52	53.319,43	101	1.179.779.175	451.881.555	38,30	62,7%
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah total produksi olahan hasil perikanan (Ton)	47.282	48.110,9	101,75	203.334.076	195.872.265	96,33	5,42%
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100	100	100	2.641.421.931	2.600.952.524	98,47	1,53%

G. Indeks Kesejahteraan Sosial

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan sosial adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos) terdiri dari berbagai indikator yang mengukur kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Secara umum, indikator-indikator ini mencakup dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Beberapa contoh indikator yang sering digunakan antara lain: pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur demografi, tingkat lapangan kerja, kondisi perumahan dan lingkungan, serta tingkat kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Tuban Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun, capaian IKesos Kabupaten Tuban berada pada angka **62,39**. Jika disandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar **62,50**, maka tingkat realisasi kinerja mencapai **99,82%**.



Grafik 3.12 Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos)
Kabupaten Tuban dengan target tahun 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos) diharapkan dapat mengukur capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sebagai ukuran kualitas hidup, IKS dibangun melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif. Tulisan ini menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui jurnal ilmiah, buku dan dokumentasi lainnya. Indikator Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan ukuran pembangunan sosial di Indonesia, sehingga dapat dievaluasi dan ada perbaikan program dari tahun ke tahun.

Indikator	Satuan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
Kinerja					
Indeks					
Kesejahteraan Sosial	Indeks	n/a	n/a	57,10	62,39

Tabel 3.8 Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator kinerja baru yang mulai diukur secara konsisten sejak 2024. Data menunjukkan adanya lompatan yang sangat impresif dalam kurun waktu satu tahun dari **57,10** di tahun 2024 menjadi **62,39** di tahun 2025.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kesejahteraan Sosial	1. Belum menyeluruhnya pemutakhiran data warga kurang mampu maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 2. Kenaikan Garis Kemiskinan (GK) akibat fluktuasi harga pangan seringkali menekan daya beli masyarakat rentan, sehingga meski pendapatan naik, standar kesejahteraan terasa stagnan. 3. Isu seperti perkawinan usia anak dan rendahnya animo melanjutkan pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah/RLS) masih menjadi beban pada dimensi kualitas SDM.	1. Program percepatan seperti RAT (Rencana Aksi Tahunan) Penanggulangan Kemiskinan untuk menurunkan persentase penduduk miskin secara konsisten. 2. Pembangunan jalan dan aksesibilitas ke pelosok desa mempermudah mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. 3. Inisiatif seperti pemberian sembako dan layanan kesehatan jemput bola membantu menjaga bantalan sosial bagi warga kurang mampu.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	116,48	119,01	102,17	23.372.051.876	11.233.174.906	48,06	54,10
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100	285.598.586	222.491.128	77,90	22,1
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar	50%	49,64%	99,28	6.077.748.335	1.552.658.165	25,55	73,73
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1%	0,2%	20	17.008.704.955	9.458.025.613	55,61	-35,61

Misi 3 Tujuan 3

Misi 3 : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal” didukung 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran

Pada Tujuan 3 (tiga) terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	72,56	73,15	100,81

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir tahun RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	73,75	73,15	99,18

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Prov. Jawa Timur	Nasional
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	73,15	73,74	76,13	75,90

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata skor capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi

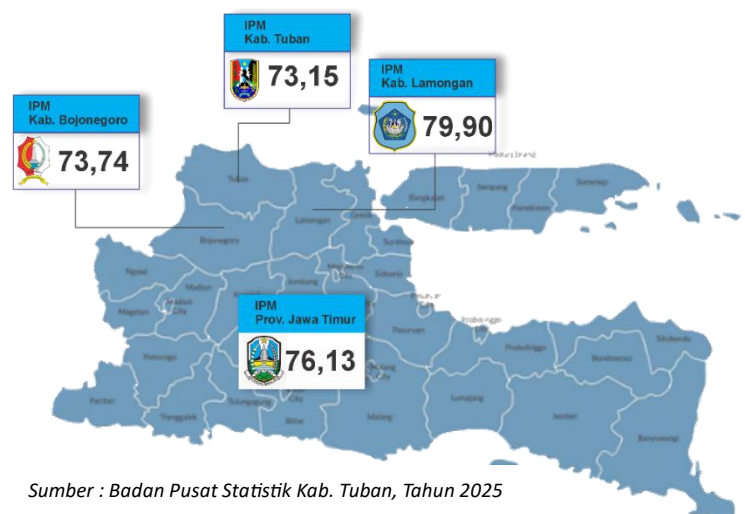


pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pemerintah Kabupaten Tuban mencatatkan keberhasilan signifikan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat pada tahun 2025. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban mencapai angka 73,15**. Capaian ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan, tetapi juga berhasil **melampaui target** yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar **72,56**. Dengan realisasi mencapai **100,81%** dari target, Kabupaten Tuban memperkuat posisinya dalam kategori status pembangunan manusia yang "**Tinggi**".



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Gambar 3.41 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Secara umum, Kabupaten Tuban sudah masuk dalam **Kategori Tinggi** ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Namun, jika melihat data di atas Kabupaten Tuban merupakan yang terendah di antara wilayah Kabupaten sekitar dan Provinsi di Jawa Timur Fokus pada peningkatan dimensi pendidikan (lama sekolah) dan standar hidup layak biasanya menjadi kunci untuk mendorong nilai ini ke depannya.

Analisis yang mempengaruhi capaian IPM di Tahun 2025 :

- a) Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat, dan standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,37 persen dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,65 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya sebesar 1,83 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya meningkat 0,13 persen dibanding tahun sebelumnya
- b) Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,7 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada tahun 2022, UHH Tuban adalah 74,53 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 75,23 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,28 tahun (0,37 persen) dibanding tahun sebelumnya.
- c) Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2025, HLS Tuban rata-rata meningkat 1,11 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,24 persen per tahun. RLS tahun 2025 meningkat 0,01 tahun (0,13 persen) dibanding tahun 2024.
- d) Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Tuban mencapai Rp. 12,12 juta per tahun. Capaian ini meningkat 538 ribu rupiah (4,65 persen) dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025, Kabupaten Tuban tetap memperkuat langkah-langkah di tahun selanjutnya :

a) Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan adalah fondasi utama IPM. Fokus harus beralih dari pengobatan ke pencegahan.

- Akselerasi Penurunan Stunting: Memastikan intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menjamin kualitas generasi masa depan.
- Optimalisasi Layanan Jemput Bola: Memperkuat program seperti *Pasti Eling* agar masyarakat di pelosok desa mendapatkan akses skrining kesehatan rutin tanpa kendala jarak.
- Peningkatan Fasilitas RSUD dan Puskesmas: Menambah jumlah tempat tidur dan ketersediaan dokter spesialis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

b) Penguatan Sektor Pendidikan

- Beasiswa Transformasi: Memberikan beasiswa khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, terutama di bidang teknik dan ekonomi kreatif.
- Pencegahan Perkawinan Anak: Melakukan edukasi masif di tingkat desa mengenai dampak ekonomi dan kesehatan dari pernikahan dini yang menjadi penghambat utama keberlanjutan sekolah.
- Revitalisasi SMK dan BLK: Menyesuaikan kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri besar di Tuban agar lulusan memiliki daya saing tinggi.

c) Peningkatan Standar Hidup Layak

- Hilirisasi UMKM: Mengonversi wirausaha mikro menjadi kecil/menengah agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
- Pengendalian Inflasi Daerah: Menjaga stabilitas harga pangan pokok agar pertumbuhan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga barang.
- Penyediaan Lapangan Kerja Lokal: Memastikan investasi besar di Tuban memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bersertifikasi bagi warga asli Tuban.

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) dibandingkan dengan target Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,49	7,54	88,81
	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,77	101,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	54,94	95,81
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	7,91	90,4
Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	75,23	100,71
Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,31	Belum Rilis	-
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 3 (tiga) Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	9,29	7,54	81,16
	Harapan Lama Sekolah	13,04	12,77	101,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,74	54,94	95,81
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,49	7,91	83,35

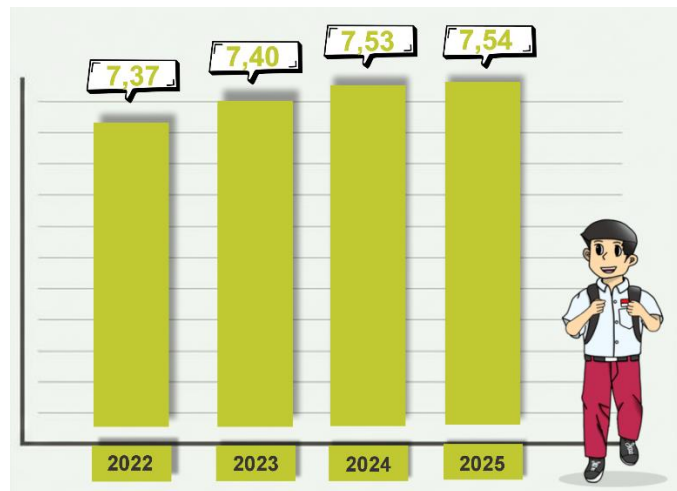
Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata</i>	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,13	75,23	98,81
<i>Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,31	Belum Rilis	-
<i>Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis</i>	Indeks Harmoni Indonesia	7,61	7,01	92,22

A. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun

Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025, berikut adalah posisi capaian pendidikan di Kabupaten Tuban :

Indikator	Target	Realisasi	Selisih (Gap)	Persentase Capaian
Rata-Rata Lama Sekolah (Usia 15+)	8,49 Tahun	7,54 Tahun	-0,95 Tahun	88,81%

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas saat ini berada di angka 7,54 tahun. Secara administratif, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pada kelompok usia tersebut secara rata-rata telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Kelas VII (tujuh) atau kelas 1 SMP. Meskipun menunjukkan tren yang stabil, realisasi sebesar 7,54 tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu 8,49 tahun (setara dengan hampir menyelesaikan kelas 9 atau tamat SMP). Terdapat selisih sebesar 0,95 tahun yang menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.14 Grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren positif yang konsisten dalam tingkat pendidikan Masyarakat di Kabupaten Tuban selama periode empat tahun terakhir. Secara umum, terjadi kenaikan bertahap setiap tahunnya. Peningkatan yang terus berlanjut setiap tahunnya menunjukkan adanya keberhasilan dalam program pemerataan pendidikan atau peningkatan akses sekolah bagi masyarakat. Meskipun kenaikannya terlihat kecil secara nominal (berada di kisaran angka 7 tahun), hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga setingkat kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP secara lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel 3.9 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan perbandingan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, kabupaten Tuban, memiliki nilai RLS yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 8,81 tahun dan Kabupaten sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa secara makro, tingkat pendidikan di Kabupaten Tuban perlu terus didorong agar bisa mengejar standar provinsi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	1. Angka RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 15 tahun ke atas (termasuk lansia). Rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia tua di masa lalu ikut menarik rata-rata keseluruhan ke bawah, meskipun partisipasi sekolah generasi muda saat ini mungkin sudah jauh lebih baik. 2. Pernikahan usia dini tetap menjadi penghambat utama keberlanjutan sekolah di wilayah pedesaan Tuban. Remaja yang menikah cenderung langsung putus sekolah untuk mengurus rumah tangga atau bekerja. 3. Adanya pola pikir di sebagian masyarakat bahwa bekerja lebih menguntungkan secara instan dibandingkan menempuh pendidikan jangka panjang. 4. Maraknya industri dan proyek pembangunan di Tuban terkadang menyerap tenaga kerja remaja sebagai buruh kasar atau pekerja harian, yang memicu mereka meninggalkan bangku sekolah demi upah harian.	1. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu proaktif melakukan pendataan penduduk usia 25–50 tahun yang hanya tamat SD atau SMP, lalu menawarkan program Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) secara gratis. 2. Memanfaatkan balai desa atau pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) agar warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk belajar. 3. Mengingat tingginya angka perkawinan anak di wilayah pedesaan Tuban, diperlukan edukasi intensif yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menunda usia pernikahan demi pendidikan. 4. Meskipun sekolah negeri gratis, beban biaya transportasi dan kebutuhan harian bagi keluarga prasejahtera sering menjadi alasan siswa putus sekolah. Pemberian subsidi transportasi (SIMAS GANTENG/Bis Gratis dari Pemkab Tuban) perlu diperluas.

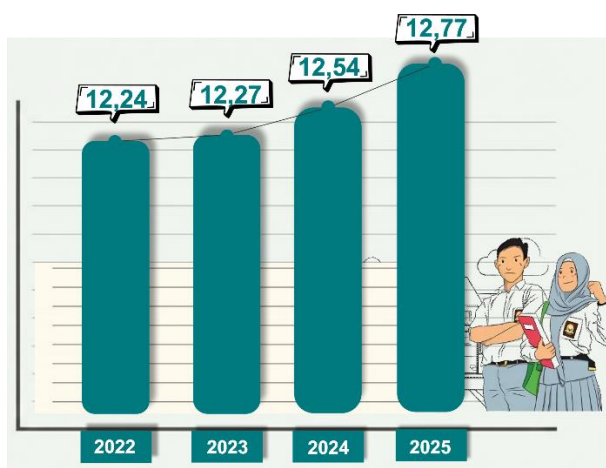
Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,49	7,54	88,81	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	-4,04%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				

4	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembagan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. Indikator ini mengukur potensi anak usia 7 tahun untuk menempuh pendidikan formal hingga jenjang tertentu, yang menunjukkan kualitas sistem pendidikan di suatu wilayah. Kabupaten Tuban berhasil mencatatkan angka HLS sebesar 12,77 tahun. Angka ini secara signifikan telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu sebesar 12,64 tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Tuban berjalan lebih progresif dan lebih cepat dari perencanaan awal. Secara teknis, angka HLS sebesar 12,77 mengindikasikan bahwa anak-anak di Kabupaten Tuban memiliki peluang atau harapan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma atau awal Perguruan Tinggi (setara dengan lulus SMA/SMK dan melanjutkan ke tahun pertama perkuliahan). Ini merupakan lompatan positif dari wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Pencapaian ini menandakan adanya peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Dengan realisasi yang sudah melewati target 2025 lebih awal, Kabupaten Tuban memiliki modal kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.15 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Pencapaian angka 12,77 pada tahun 2025 memberikan gambaran optimis bahwa rata-rata anak di Kabupaten Tuban memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (setara dengan menamatkan pendidikan wajib 12 tahun dan

memulai tahun pertama di tingkat diploma atau sarjana). Kenaikan total sebesar 0,53 poin dari tahun 2022 ke 2025 mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan setinggi mungkin.



Tabel 3.10 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2025

Secara visual dan angka, Kabupaten Tuban menunjukkan posisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Berikut rinciannya:

- Peringkat terendah di antara aetangga : Kabupaten Tuban memiliki angka RLS sebesar 12,77 tahun. Angka ini merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan.
- Tertinggal dari Kabupaten Bojonegoro : Terdapat selisih sebesar 0,50 tahun dengan Kabupaten Bojonegoro yang mencatatkan angka 13,27 tahun.
- Selisih Signifikan dengan Kabupaten Lamongan: Kabupaten Lamongan dengan angka 14,04 tahun. Ini berarti terdapat jarak sebesar 1,27 tahun antara pencapaian pendidikan di Lamongan dibandingkan Tuban.
- Di Bawah Rata-rata Provinsi: Capaian RLS Kabupaten Tuban juga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 13,44 tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Harapan Lama Sekolah	1. Presisi Intervensi, Dengan data yang valid, pemerintah daerah mampu memetakan secara akurat anak-anak <i>out-of-school</i> (tidak sekolah) dan memberikan bantuan yang tepat sasaran (beasiswa/bantuan sarpras) sebelum mereka benar-benar keluar dari sistem. 2. Dengan memberikan akomodasi gratis (program SIMAS GANTENG) kembali sekolah di desa-desa terpencil (seperti di Kecamatan Soko dan Montong), hambatan geografis yang sering menjadi alasan anak berhenti sekolah dapat dieliminasi. 3. Kampanye masif mengenai "Investasi Jangka Panjang" melalui pendidikan yang sering didorong oleh kepemimpinan daerah mulai mengubah pola pikir masyarakat perdesaan.	Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama dengan Kemensos RI meluncurkan inisiatif Sekolah Rakyat yang berfokus pada pemerataan akses bagi kelompok masyarakat rentan. • Target Spesifik: Menjangkau anak-anak yang terkendala biaya atau jarak geografis melalui sistem pendidikan yang lebih fleksibel. • Dampak: Menurunkan angka putus sekolah pada usia transisi (lulus SMP ke SMA), yang secara langsung meningkatkan proyeksi lamanya seorang anak akan bersekolah.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	12,77	101,02	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	8,79%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				

4	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembagan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan budaya literasi, utamanya melalui pembinaan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan, koleksi, dan tenaga perpustakaan guna meningkatkan minat baca dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus



berupaya memperkuat fondasi literasi masyarakat sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Berdasarkan hasil pengukuran, **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tuban tahun 2025 tercatat sebesar 54,94.**

Meskipun angka ini menunjukkan geliat aktivitas literasi yang tetap terjaga, capaian tersebut masih berada di bawah **target yang ditetapkan sebesar 57,34**. Dengan realisasi sebesar **95,81%** dari target, terdapat selisih (gap) sebesar **2,40 poin** yang menjadi catatan penting dalam evaluasi pembangunan sektor literasi di tahun ini. Angka **54,94** merupakan cerminan bahwa pembangunan literasi di Kabupaten Tuban berada pada jalur yang progresif namun memerlukan akselerasi.



Grafik 3.16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Dalam dua tahun, terjadi kenaikan sebesar 2,36 poin. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program perluasan akses perpustakaan, penambahan koleksi buku (baik fisik maupun digital), serta peningkatan intensitas kampanye gemar membaca di sekolah maupun komunitas. Terdapat penurunan sebesar 1,30 poin. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius karena posisi di tahun 2025 bahkan lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	1. Pemerataan Layanan: Akses terhadap perpustakaan di wilayah pelosok pedesaan masih perlu diperluas guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. 2. Kecukupan Koleksi: Adanya tantangan dalam memperbarui koleksi buku, baik cetak maupun digital, agar tetap relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat yang cepat berubah. 3. Partisipasi Digital: Meskipun tren digitalisasi meningkat, pemanfaatan perpustakaan digital belum sepenuhnya optimal di kalangan masyarakat umum dibandingkan dengan penggunaan media sosial konvensional.	1. Digitalisasi Masif: Memperkuat aplikasi perpustakaan digital untuk menjangkau penduduk usia produktif yang memiliki mobilitas tinggi. 2. Literasi Berbasis Komunitas: Menghidupkan kembali pojok baca di balai desa dan ruang publik untuk mendekatkan akses buku ke masyarakat bawah. 3. Evaluasi Program: Mengidentifikasi variabel spesifik dalam penghitungan IPLM (seperti ketercukupan anggota perpustakaan atau jumlah kunjungan) yang paling banyak menyumbang penurunan di tahun 2025.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,34	54,94	95,81	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	2,96%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				

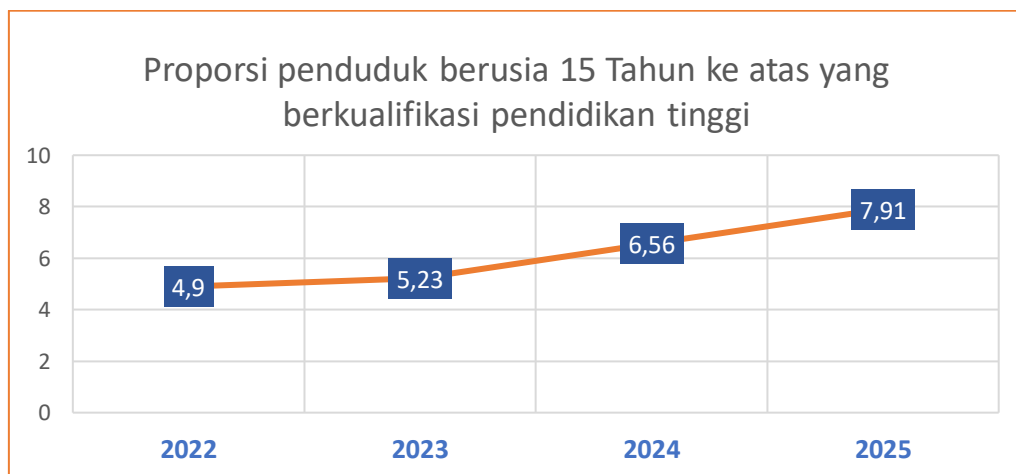
4	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

D. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tuban tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV S1, S2, S2 Terapan, S3.



Pada tahun 2025, Kabupaten Tuban mencatatkan proporsi penduduk berpendidikan tinggi sebesar **7,91%**. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar **8,75%**, maka capaian ini menyentuh angka **90,4%** dari target yang direncanakan.



Grafik 3.17 Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Berdasarkan data visual yang Anda berikan, berikut adalah analisis mengenai Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Tuban periode 2022–2025, grafik menunjukkan tren kenaikan yang sangat positif dan konsisten dalam empat tahun terakhir. Terjadi lompatan signifikan sebesar 1,35% antara tahun 2024 ke 2025. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap perguruan tinggi di Tuban semakin membaik atau kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi meningkat secara tajam dalam dua tahun terakhir

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas	1. Pilihan Karier Pasca-Sekolah: Sebagian besar lulusan menengah atas di wilayah industri cenderung langsung memasuki dunia kerja (sebagai tenaga terampil) dibandingkan melanjutkan ke jenjang akademis formal. 2. Aksesibilitas Pendidikan: Meskipun beasiswa daerah telah ditingkatkan, hambatan ekonomi dan jarak geografis menuju perguruan tinggi tertentu masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. 3. Migrasi SDM: Adanya fenomena "brain drain", di mana penduduk yang telah lulus pendidikan tinggi dari luar daerah cenderung menetap dan bekerja di kota besar, sehingga tidak terdata sebagai penduduk menetap di Kabupaten Tuban.	1. Memperluas cakupan bantuan biaya pendidikan khusus untuk putra daerah berprestasi dari keluarga kurang mampu. 2. Mendorong pembukaan kampus cabang atau program studi di luar kampus utama (PSDKU) di wilayah Kabupaten Tuban untuk mendekatkan layanan pendidikan. 3. Menyelaraskan jurusan perguruan tinggi lokal dengan kebutuhan industri besar yang ada di Tuban (seperti sektor migas dan manufaktur) agar minat melanjutkan studi meningkat.

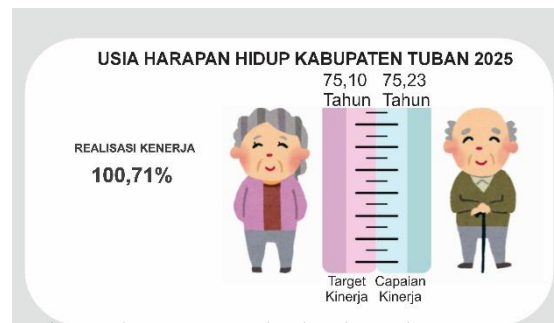
Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran : Porporasi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,75	7,91	90,4	215.501.031.004	200.101.355.699	92,85	-2,45%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	99.35	96,78	97	67.973.500	21.163.000	31	66%
		Persentase Pendidik yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	86.41	61.31	70				
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	100	100	100	200.067.777.497	186.270.966.767	93	4,5%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	100	87,09	87				
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	81,84	86				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100	25,56	25				
		APK PAUD/Sederajat	82.95	80,95	97,5				
		APK SD/Sederajat	100	95,43	95				
		APK SMP/Sederajat	100	87,09	87				
		APM PAUD	95.52	95,43	99				
		APM SD/Sederajat	95.93	95,43	99				
		APM SMP/Sederajat	87.59	87,09	99				
		Angka Melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat	97.3	85,28	87,6				
		Angka Melanjutkan ke SMA/MA/Sederajat	72	70	97				
		Persentase Peningkatan Kepesertaan PKBM Usia diatas 25 Tahun	3	0.11	0,03				
		Persentase Peningkatan Kelulusan Kejar Paket Penduduk Usia di Atas 25 Tahun	2	0	0				

4	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	90	88,51	98	449.183.275	284.760.500	63	35%
		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	93,01	88,51	95				
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	10	10,01	100	918.689.640	332.930.640	36,24	63,76%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	12	16	66,66	10.778.928.763	10.139.424.827	94,07	-27,41%
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	43,47	43,51	100,09	3.218.478.329	3.052.109.965	94,83	5,26%

E. Usia Harapan Hidup (UHH)

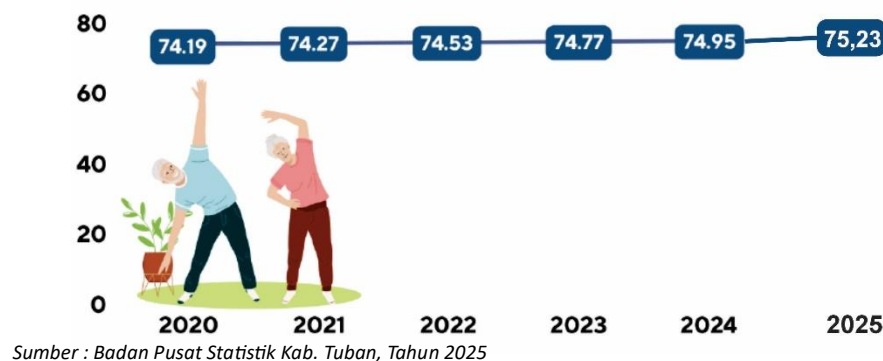
Usia harapan hidup (atau life expectancy) adalah perkiraan rata-rata lama hidup seseorang sejak lahir, berdasarkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, tingkat ekonomi, gaya hidup, serta akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Kabupaten Tuban berhasil mencatatkan angka Usia Harapan Hidup sebesar **75,23 tahun**.

Capaian ini secara gemilang berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah, yaitu sebesar **75,10 tahun**. Keberhasilan melampaui target sebesar 0,13 poin ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir di Kabupaten Tuban pada tahun 2025 memiliki peluang untuk hidup hingga usia 75 tahun lebih, sebuah angka yang mencerminkan kualitas hidup yang semakin membaik.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Grafik 3.18 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025

Usia harapan hidup di Kabupaten Tuban dapat dikategorikan sebagai tingkat yang cukup baik. Dari data yang tergambar sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,76 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Tuban adalah 74,27 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 75,23 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,28 tahun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Tuban memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 75 tahun. Upaya peningkatan dimensi kesehatan dengan meningkatkan angka harapan hidup sejalan dengan langkah-langkah dalam mengembangkan iklim pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Melalui

peningkatan daya beli masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Tuban.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tuban, Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tuban dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025

Kabupaten Tuban mencatatkan performa yang sangat impresif jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan angka UHH sebesar 75,23 tahun, Kabupaten Tuban berada jauh di atas capaian Nasional yang tercatat sebesar 74,47 tahun. Selisih positif sebesar 0,76 poin ini menunjukkan bahwa ekosistem kesehatan dan standar hidup di Tuban lebih unggul dibandingkan rata-rata wilayah lain di Indonesia. Jika disandingkan dengan cakupan yang lebih luas di tingkat regional, UHH Kabupaten Tuban (**75,23 tahun**) menunjukkan persaingan yang kompetitif dengan angka Provinsi Jawa Timur yang berada di level **75,36 tahun**. Meskipun terdapat selisih tipis sebesar **0,13 poin** di bawah angka provinsi, posisi Tuban sudah sangat mendekati standar ideal kesehatan di Jawa Timur.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Usia Harapan Hidup (UHH)	1. Akses Layanan Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan rumah sakit yang semakin merata di seluruh wilayah Tuban. 2. Penurunan Angka Kematian: Keberhasilan program penekanan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui	1. Memperluas jangkauan layanan kesehatan jemput bola untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) di wilayah pelosok. 2. Menambah ketersediaan dokter spesialis dan tempat tidur di RSUD serta standarisasi layanan di seluruh Puskesmas.

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	pendampingan intensif tenaga medis. 3. Gaya Hidup Sehat: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberhasilan program sanitasi total berbasis masyarakat. 4. Lingkungan Berkualitas: Perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan air bersih yang lebih luas menjangkau desa-desa.	3. Menjadikan Posyandu sebagai pusat edukasi kesehatan keluarga, tidak hanya untuk balita tetapi juga untuk pemantauan kesehatan lansia secara rutin. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih dan jamban sehat untuk mencegah penyakit penular yang dapat menurunkan kualitas hidup. 5. Menjaga stabilitas harga bahan pokok agar masyarakat rentan dapat terus mengakses nutrisi berkualitas, yang pada akhirnya mendukung ketahanan fisik.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,1	75,23	100,71	42.148.212.394	40.333.615.056	95,69	5,01
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase ketercukupan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) sesuai Standar yang ditentukan (RSUD Dr. R Koesma)	89,1	83,49	93,70	39.912.418.617	38.333.892.866	96,04	8,18%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	51,61	43,41	84,11	794.630.584	755.773.148	95,14	-11,03%
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	100	100	100,00	169.680.076	145.755.185	85,90	16,98%
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	43,5	46	105,75				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Bidang Kesehatan yang meningkat kompetensinya	10%	46%	455,69	826.771.967	673405767	81,45	374,24
6	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	1,9	belum rilis	-	444.711.150	424788090	95,52	-

F. Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia adalah metrik komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dan keseimbangan dalam Masyarakat Indonesia, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Indeks Harmoni Indonesia bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hidup yang harmonis dan sejahtera dalam suatu masyarakat atau negara.



Secara lebih rinci, Indeks Harmoni Indonesia mencakup beberapa dimensi:

- 1) Dimensi Ekonomi : Mengukur kesejahteraan, kesetaraan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
- 2) Dimensi Sosial : Menilai hubungan antar individu dan kelompok, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan.
- 3) Dimensi Budaya : Mengukur sejauh mana keberagaman budaya dihormati dan dilestarikan.
- 4) Dimensi Agama : Menilai tingkat toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat melalui penguatan kohesi sosial. Pada tahun pertama periode perencanaan, Pemerintah Kabupaten Tuban secara resmi mulai mengintegrasikan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sebagai salah satu indikator sasaran dalam dokumen RPJMD 2025–2030. Indeks ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai keseimbangan hubungan antarwarga dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan religius. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, capaian Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Indeks Harmoni Indonesia 2025	7,01	7,01	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tuban, Tahun 2025

Angka 7.01 mencerminkan kondisi harmoni di Bumi Wali yang berada pada kategori "Sangat Baik/Tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tuban memiliki tingkat toleransi yang tinggi, mampu menyelesaikan konflik melalui dialog, serta memiliki rasa gotong royong yang kuat di tengah keberagaman budaya dan agama.



Gambar 3.4 Perbandingan Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Analisis Perbandingan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Sekitar Kabupaten Tuban mencatatkan nilai **7,01**. Angka ini menunjukkan performa yang stabil dan berada pada kategori yang baik, meskipun terdapat variasi capaian jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung maupun berada dalam satu klaster wilayah.

- 1) Kabupaten Lamongan: Mencatatkan nilai tertinggi dalam kelompok ini dengan skor 7,58. Hal ini mengindikasikan Lamongan memiliki tingkat kohesi sosial yang sangat kuat di wilayah tersebut.
- 2) Kabupaten Bojonegoro: Berada di posisi kedua dengan skor 7,23. Meskipun berselisih tipis, Bojonegoro menunjukkan keunggulan dalam indeks harmoni dibandingkan Tuban.
- 3) Kabupaten Ngawi: Memiliki indeks sebesar 7,07, yang secara statistik sangat kompetitif dan hanya terpaut tipis (0,06 poin) di atas Kabupaten Tuban.

- 4) Kabupaten Jombang: Dari data yang tersaji, Tuban (7,01) unggul dibandingkan Kabupaten Jombang yang mencatatkan skor 6,84. Ini menunjukkan bahwa dalam skala regional yang lebih luas, Tuban masih memiliki ketahanan harmoni yang lebih baik dibandingkan beberapa wilayah lainnya.

Berdasarkan capaian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kabupaten Tuban sebesar 7,01 pada tahun 2025, terdapat beberapa faktor strategis yang menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target kinerja 100% pada awal periode RPJMD 2025–2030. Berikut adalah analisis faktor keberhasilan tersebut :

1) Penguatan Nilai Lokal "Bumi Wali"

- Identitas Budaya: Pemanfaatan branding "Bumi Wali" sebagai fondasi karakter masyarakat yang religius namun inklusif, sehingga meminimalisir potensi gesekan antarumat beragama.
- Ketahanan Sosial: Tingginya rasa gotong royong dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan kearifan lokal.

2) Sinergi Kelembagaan yang Efektif

- Peran Bakesbangpol : Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan koordinasi dan pemantauan stabilitas wilayah secara rutin.
- Optimalisasi FKUB: Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjembatani komunikasi lintas iman, yang tercermin dari angka harmoni yang berada pada kategori "Sangat Baik".

3) Integrasi Kebijakan dalam Perencanaan Daerah

- Baseline RPJMD: Penetapan IHaI sebagai indikator sasaran dalam RPJMD 2025–2030 memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki orientasi pada penguatan kohesi sosial.
- Kesesuaian Target: Perencanaan yang presisi dengan menetapkan target 7,01 yang berhasil direalisasikan secara penuh (100%), menunjukkan akurasi data dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan capaian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Kabupaten Tuban tahun 2025 yang mencapai 7,01 (100% dari target), berikut adalah upaya-upaya strategis yang dapat dilaksanakan ke depan untuk mempertahankan dan meningkatkan performa tersebut dalam kerangka RPJMD 2025–2030 :

1) Penguatan Basis Data dan Digitalisasi Harmoni

- Monitoring Real-Time: Mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis digital untuk memetakan potensi konflik sosial di tingkat desa.
- Survei Berkala: Melakukan evaluasi IHaI secara mandiri setiap tahun untuk melihat tren perkembangan di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban.

2) Program Inovasi "Bumi Wali Inklusif"

- Dialog Lintas Generasi: Menyelenggarakan forum diskusi yang melibatkan milenial dan Gen Z untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini.
- Festival Budaya Harmoni: Mengadakan event tahunan yang menampilkan keberagaman etnis dan agama di Tuban sebagai daya tarik wisata sekaligus perekat sosial.

3) Penguatan Peran Lembaga Adat dan Agama

- Revitalisasi FKUB & FPK: Meningkatkan anggaran dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hingga ke tingkat kecamatan.
- Kader Penggerak Harmoni: Membentuk agen-agen perdamaian di setiap desa yang bertugas sebagai mediator konflik ringan di masyarakat.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100	9.687.831.412	9.035.716.849	93,26	6,64%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jenis Pelanggaran dalam Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	5.301.279.378	4.737.051.398	89,36	10,64%
		Persentase Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan	100	100	100				
		Persentase Satlinmas yang Aktif	50	26,87	53,74				
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (Response time) penanganan kebakaran (menit)	15	11,26	133,21	826.927.910	747.233.000	90,36	42,85%
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budya politik	100	100	100	3.559.624.124	3.551.432.451	99,77	2,33%

Misi 4 Tujuan 4

Misi 4 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif” didukung 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran

Pada Tujuan 4 (tiga) terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	93,28	91,35	97,93

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir tahun RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
<i>Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	101,28	91,35	90,19

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten sekitar/Provinsi/Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Prov. Jawa Timur
1	2	3	4	5	
<i>Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	91,35	85,79	87,39	

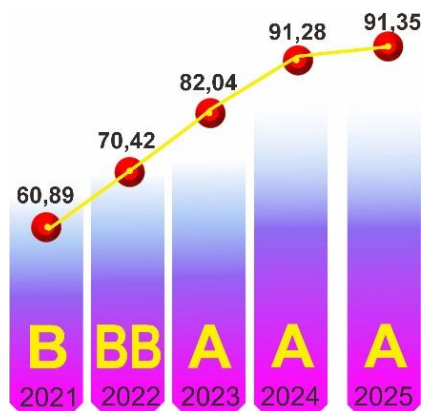
Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah skor pengukuran capaian perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, bertujuan menciptakan birokrasi bersih, efektif, dan pelayanan publik berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN,

dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil evaluasi final yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagai berikut :



Meski tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban terus menunjukkan komitmen yang progresif dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban berhasil mencapai skor 91,35. Angka ini merefleksikan bahwa nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas telah terinternalisasi dengan baik di seluruh jajaran Perangkat Daerah. Capaian ini menempatkan Tuban sebagai salah satu daerah dengan performa birokrasi terbaik yang konsisten pada level '**Sangat Memuaskan**' atau dengan **Predikat A**.

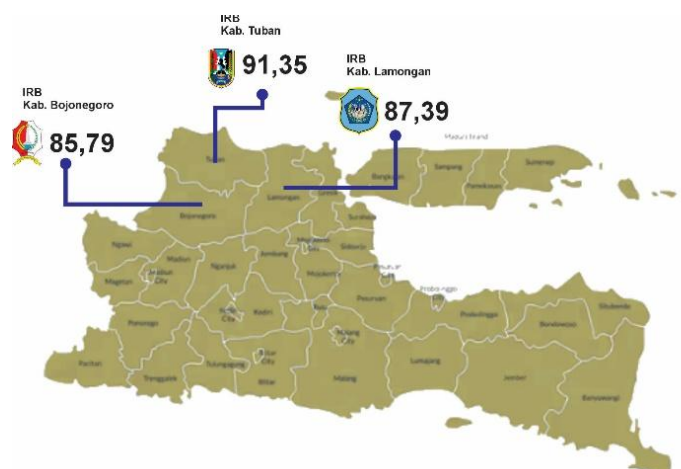


Grafik 3.19 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban dari tahun 2020 hingga 2025

Perjalanan transformasi ini dapat dijabarkan melalui tonggak pencapaian berikut:

- 1) Tahun 2021 - 2022 (Fase Fondasi): Mengawali perubahan dari nilai 60,89 (B) menjadi 70,42 (BB), sebuah peningkatan yang menunjukkan penguatan tata kelola dasar.
- 2) Tahun 2023 (Fase Lompatan Kualitas): Berhasil menembus ambang batas Predikat A dengan kenaikan signifikan ke angka 82,04, menandakan sistem birokrasi mulai berjalan efektif dan efisien.

- 3) Tahun 2024 - 2025 (Fase Stabilitas dan *Excellence*): Memasuki level performa tinggi di angka 91,28 dan mencapai puncak di 91,35. Capaian di angka 90-an ini membuktikan bahwa budaya kerja berkinerja tinggi telah melembaga di Kabupaten Tuban.



Gambar 3.4 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar **91,35**, Tuban mengungguli kabupaten tetangga seperti Kabupaten Bojonegoro dengan IRB 85,79 dan Kabupaten Lamongan dengan IRB 87,39. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban mencerminkan sistem birokrasi yang lebih lincah, penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi, serta komitmen yang lebih kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Capaian ini menjadi modal berharga bagi Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebagai berikut :

A. Capaian dengan performa terbaik

Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan performa "Ekselensi" pada beberapa indikator dengan nilai indeks maksimal (100%):

- Indeks Reformasi Hukum: Mencapai skor indeks 2,50 dari bobot 2,5 (100%), yang menandakan kualitas regulasi daerah sudah sangat tinggi.
- Tindak Lanjut Pengaduan (LAPOR): Mencapai 100%, membuktikan responsivitas pemerintah yang sangat baik terhadap keluhan masyarakat.
- Opini BPK: Mendapatkan nilai penuh (100%), yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih.

d) Digitalisasi Arsip: Memperoleh nilai 96%, menunjukkan keseriusan dalam modernisasi administrasi.

B. Area yang Perlu Akselerasi (Kelemahan & Rekomendasi)

Meskipun skor keseluruhan sangat tinggi, terdapat beberapa titik kritis yang menghambat pencapaian target ideal (93,28):

- a) Pembangunan Zona Integritas (ZI): Indikator ini merupakan yang terendah dengan capaian indeks hanya 42,86%. Ini menunjukkan bahwa penyebaran unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan pemda masih sangat terbatas.
- b) Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern): Capaian index hanya 64,00%. Catatan evaluasi menunjukkan bahwa penetapan tujuan dan penjenjangan kinerja belum memadai, serta manajemen risiko belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses bisnis OPD.
- c) RB Tematik (Pengendalian Inflasi): Pada komponen dampak, indeks pengendalian inflasi berada di angka 0,00% dengan catatan kinerja dari Kemendagri yang berada pada kriteria "Belum Baik".
- d) Pembangunan Statistik: Capaian indeks 44,80%. Hal ini disebabkan karena penerapan standar data dan metadata statistik belum diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh produsen data.

Kesimpulan Strategis

Kabupaten Tuban telah berhasil membangun infrastruktur birokrasi yang sangat kuat di level administratif dan regulasi (Skor 91,35). Namun, tantangan utama untuk mencapai target 93,28 terletak pada substansi integritas dan pengendalian.

Fokus utama perbaikan ke depan harus ditekankan pada penguatan sistem pengawasan (SPIP), percepatan unit kerja menuju WBK/WBBM (Zona Integritas), serta sinkronisasi Satu Data Indonesia untuk meningkatkan indeks pembangunan statistik.

Sasaran pada Misi 4

Tujuan “Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani” didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 4 Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,99	81,31	104,25
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,433	0,234	16,32
	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	8,69	173,8
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,14	92,61
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	89,52	99,66
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemd (Pemerintah Digital)	4,29	Belum Rilis	-

Hasil Kinerja Sasaran dari Tujuan 4 Tahun 2025 dibandingkan target akhir RPJMD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	90,13	81,27	90,16
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Survei Penilaian Integritas (SPI)	81,99	81,31	99,17
Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,513	0,234	15,46

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Capaian 2025
Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	8,69	96,5
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,53	4,14	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,89	89,52	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemd (Pemerintah Digital)	2,11	Belum Rilis	-

A. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah

SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Predikat
Nilai SAKIP 2025	82,13	81,27	98,95%	A

Ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien melalui pelaporan kinerja yang terukur dan transparan. Tujuan SAKIP diantaranya :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Mewujudkan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
- Mendorong birokrasi berorientasi hasil (*result-oriented government*).
- Memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

SAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD. Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Dalam pembuatan LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi final yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
Perencanaan Kinerja	30	25,63	25,70
Pengukuran Kinerja	30	23,32	23,74
Pelaporan Kinerja	15	11,68	20,20
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,50	19,63
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,13	81,27

Tabel 3.12 Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Tuban dari tahun 2024 dan 2025

Pemerintah Kabupaten Tuban terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Capaian nilai SAKIP Kabupaten Tuban berada jauh di atas rata-rata nilai SAKIP Nasional yang tercatat sebesar **66,42**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja di Kabupaten Tuban memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar rata-rata instansi pemerintah di Indonesia.

Jenis Instansi	Rata-rata Nilai SAKIP	
	2024	2025
Kementerian/Lembaga	72,83	73,61
Provinsi	70,76	69,05
Kabupaten/Kota	63,98	64,89
Nasional	65,55	66,42
Kabupaten Tuban	80,13	81,27
Sumber : Kemenpan RB tahun 2026		

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP di tahun mendatang, sesuai LHE dari Kemenpan RB terdapat 12 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

- 1) Nilai Komponen Perencanaan Kinerja :

- a) Memperbaiki kualitas pohon kinerja pada level Perangkat Daerah (PD) dengan cara memastikan agar kinerja/*immediate outcome* merupakan *Critical Succes Factor* (CSF) dari kinerja level di atasnya sehingga akan berpengaruh pada penentuan output/aktivitas yang akan dikawal pada level individu akan menjadi lebih fokus menunjang kinerja kegiatan tersebut.
 - b) Mendorong perbaikan pada pelaksanaan identifikasi crosscutting di pohon kinerja level PD diharapkan tidak hanya menyebutkan unit kerja/instansi lain yang terlibat tetapi juga kontribusi/peran spesifik apa yang akan dikawal sehingga dapat dibuktikan bahwa pelaksanaannya bukan bersifat insidentil.
 - c) Memastikan kembali penetapan target kinerja berjenjang agar lebih andal dengan cara memperhitungkan sejauh mana target kinerja yang ditetapkan pada level berjenjang dapat saling menunjang sehingga pencapaian target kinerja yang ditetapkan lebih realistis.
- 2) Nilai Komponen Pengukuran Kinerja :
- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi rencana aksi dengan cara memastikan bahwa setiap capaian kinerja mendapatkan analisis/feedback dari pimpinan sebagai wujud adanya komitmen pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja.
 - b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring kinerja individu dengan cara memastikan penyampaian laporan aktivitas harian yang disampaikan pegawai sudah konsisten disertai dengan penyampaian data dukung berupa foto atau laporan sebagai data dukung khususnya untuk aktivitas harian yang sifatnya kunjungan lapangan.
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan strategi, kebijakan, aktivitas dan penganggaran untuk menjaga pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
 - d) Menambahkan menu pada aplikasi E-Monev Kabupaten Tuban yang di dalamnya terdapat capaian kinerja Kepala Daerah secara berkala dan juga memperlihatkan peran Perangkat Daerah pada masing-masing indikator kinerja Kepala Daerah.
- 3) Nilai Komponen Pelaporan Kinerja :

- a) Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) dengan cara memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja yang diperjanjikan telah memiliki analisis, khususnya upaya perbaikan ke depan pada pencapaian kinerjanya.
 - b) Mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penetapan target kinerja dan perubahan strategi pada tahun berikutnya.
- 4) Nilai Komponen Evaluasi Internal :
- a) Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk dapat mengupload Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2025 pada halaman <https://esr.menpan.go.id> untuk memastikan Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat telah disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah.
 - b) Mendorong APIP/Inspektorat Kabupaten Tuban untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara detail dan mendalam pada permasalahan masing-masing Perangkat Daerah dalam melakukan implementasi SAKIP, misalnya terkait pelaksanaan program/kegiatan, penentuan target, pelaksanaan rencana aksi, capaian kinerja berkala, dan lain-lain.
 - c) Memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIPATIL HAPE) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemantauan progress tindaklanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95	583.052.332.185	496.471.087.738	85,15	13,79
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	26,22
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	94,87				
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	1.242.722. 417	1.126.735.926	90,67	6,47
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57				
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70	51,81	74,01	2.599.929.42 3	2.538.966.963	97,66	-23,65
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90	45,6
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90	69.274.600	64.952.400	93	11,9

7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79	14,21
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	100	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00	56,34	42,62
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat Pembangunan kompetensi 20JP	100	100	100	3.464.684.868	2.790.697.763	80,55	19,4518
		Persentase ASN yang telah menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	80	79,88	99,85				
		Persentase kinerja ASN minimal baik	83	82,19	99				
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65,00	64,46	99,16	1.835.717.787	1.542.888.806	84,05	15,11
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100	100	100	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24	18,76

B. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. Opini ini merupakan bentuk pernyataan profesional auditor berdasarkan empat kriteria utama : kesesuaian dengan standar akuntansi



pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini menegaskan konsistensi Pemkab Tuban dalam menjaga tata kelola keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah, serta sebagai bentuk keberhasilan kolektif seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2025 merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah memenuhi standar tertinggi dalam akuntabilitas publik. Keberhasilan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari pemenuhan empat kriteria utama yang ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



Berikut adalah faktor-faktor pendukung diraihnya opini WTP oleh Pemkab Tuban :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tuban disusun menggunakan SAP Berbasis Akrua. Hal ini menjamin bahwa setiap transaksi dicatat secara transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya pada saat transaksi terjadi.

- Penyajian Laporan: Konsistensi dalam menyajikan komponen laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dll).
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Pengungkapan informasi yang detail sehingga memudahkan auditor memahami angka-angka yang disajikan.

2) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

SPI yang kuat berfungsi sebagai "pagar" untuk mencegah kesalahan dan kecurangan.

- Peran Inspektorat: Pengawasan internal yang proaktif melalui probity audit (audit selama proses berjalan) untuk memastikan kegiatan sesuai prosedur.
- Teknologi Informasi: Penggunaan sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi, mengurangi risiko manipulasi data manual.

3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK sangat teliti dalam melihat apakah anggaran digunakan sesuai koridor hukum.

- Pengadaan Barang dan Jasa: Kepatuhan penuh terhadap regulasi lelang dan kontrak kerja.
- Penyelesaian Temuan: Kecepatan Pemkab Tuban dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya sebelum batas waktu yang ditentukan.

4) Pengelolaan Aset Tetap yang Tertib

Aset sering kali menjadi hambatan bagi banyak daerah. Keberhasilan Tuban biasanya didukung oleh:

- Inventarisasi Aset: Pencatatan aset (tanah, jalan, bangunan) yang akurat secara fisik maupun administratif.
- Sertifikasi Tanah: Langkah masif dalam mensertifikatkan tanah-tanah milik Pemkab untuk menghindari sengketa hukum di masa depan.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95	583.052.332.185	496.471.087.738	85,15	13,79
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	26,22
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	94,87				
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	1.242.722. 417	1.126.735.926	90,67	6,47
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57				
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70	51,81	74,01	2.599.929.42 3	2.538.966.963	97,66	-23,65
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90	45,6
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90	69.274.600	64.952.400	93	11,9

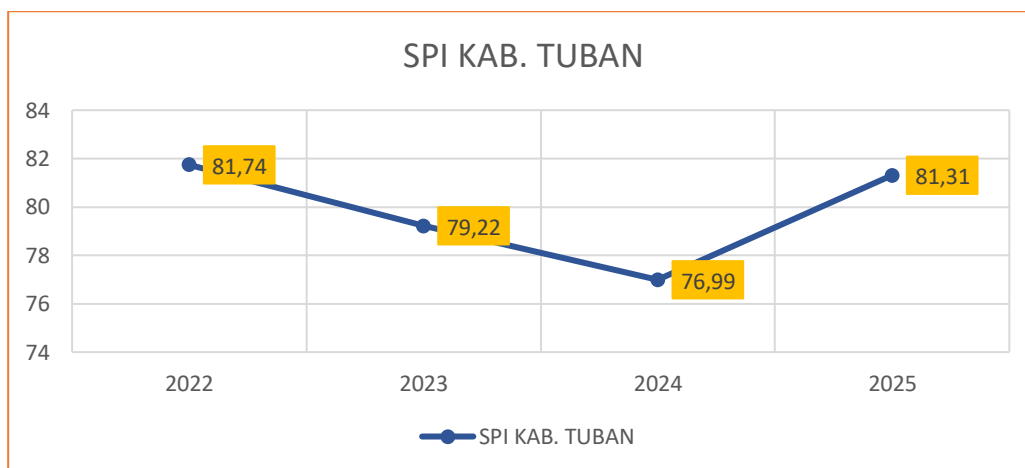
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79	14,21
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	100	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00	56,34	42,62
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat Pembangunan kompetensi 20JP	100	100	100	3.464.684.868	2.790.697.763	80,55	19,4518
		Persentase ASN yang telah menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	80	79,88	99,85				
		Persentase kinerja ASN minimal baik	83	82,19	99				
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65,00	64,46	99,16	1.835.717.787	1.542.888.806	84,05	15,11
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100	100	100	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24	18,76

C. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei nasional yang diselenggarakan KPK untuk memotret integritas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memetakan risiko serta mencegah korupsi. Survei ini berbasis pengalaman responden internal (pegawai), eksternal (pengguna layanan), dan ahli (ekspert), dengan hasil berupa Indeks Integritas Nasional. Di tahun 2025 Pemkab Tuban terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berbagai kebijakan strategis dijalankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin prima dan memuaskan masyarakat. Komitmen tersebut kembali berbuah hasil manis. Pemkab Tuban meraih nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 sebesar 81,31 dan masuk dalam kategori Terjaga.



Capaian ini menempatkan Kabupaten Tuban di peringkat ke-6 nasional untuk kategori pemerintah daerah se-Indonesia pada survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sekaligus menempatkan Pemkab Tuban di peringkat kedua di tingkat Provinsi Jawa Timur.



Grafik 3.19 Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Grafik diatas menunjukkan dinamika yang fluktuatif dari pencapaian Indeks SPI Kabupaten Tuban, namun ditutup dengan performa pemulihan yang kuat pada tahun terakhir, meskipun sempat mengalami tren penurunan selama dua tahun berturut-turut (2023-2024), Kabupaten Tuban berhasil membalikkan keadaan di tahun 2025. Capaian **81,31** di tahun 2025 hampir menyamai rekor tertinggi di tahun 2022, yang menandakan kembalinya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas birokrasi di Kabupaten Tuban.

	SKOR SPI	KATAGORI
 NASIONAL	72,32	RENTAN
 PROV. JAWA TIMUR	75,23	WASPADA
 KAB. TUBAN	81,31	TERJAGA
 KAB. LAMONGAN	77,78	WASPADA
 KAB. BOJONEGORO	72,15	RENTAN

Tabel 3.13 Perbandingan Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional

Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil mencatatkan performa yang bisa diandalkan pada tahun 2025 dengan meraih skor SPI sebesar 81,31. Capaian ini menempatkan Tuban dalam kategori "TERJAGA", sebuah level prestisius yang menunjukkan sistem pencegahan korupsi telah berjalan dengan sangat efektif. Keberhasilan meraih skor 81,31 membawa Kabupaten Tuban :

- 1) Peringkat 6 Nasional: Secara nasional, integritas Pemkab Tuban diakui sebagai salah satu yang terbaik, menempati urutan ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- 2) Peringkat 2 Jawa Timur: Di tingkat regional, Tuban mengukuhkan posisinya sebagai Runner-up atau terbaik kedua di Provinsi Jawa Timur.
- 3) Melampaui Rata-rata: Skor Tuban (81,31) jauh melampaui rata-rata Nasional yang berada di angka 72,32 (Rentan) dan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 75,23 (Waspada).

Berdasarkan data grafik dan capaian skor 81,31 yang menempatkan Kabupaten Tuban pada kategori "TERJAGA", terdapat beberapa faktor krusial yang mempengaruhi keberhasilan tersebut di tahun 2025. Capaian ini sangat signifikan mengingat Kabupaten Tuban berhasil menduduki Peringkat 6 Nasional dan Peringkat 2 di Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah faktor-faktor pendukung utama:

1) Pemulihan Sistem Pencegahan Korupsi

Setelah mengalami tren penurunan pada tahun 2023 (79,22) hingga titik terendah di tahun 2024 (76,99), Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan evaluasi total. Lonjakan nilai sebesar 4,32 poin di tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan masif pada sistem pemantauan dan evaluasi internal.

2) Efektivitas Sosialisasi dan Budaya Integritas

Skor yang tinggi dalam kategori "TERJAGA" mencerminkan persepsi positif dari tiga kelompok responden SPI:

- Internal (Pegawai): Meningkatnya kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja tanpa adanya praktik pungutan liar atau gratifikasi.
- Eksternal (Masyarakat/Pengguna Layanan): Kemudahan akses layanan publik dan transparansi biaya yang dirasakan langsung oleh warga Tuban.
- Ekspert (Ahli): Penilaian positif dari para ahli mengenai kebijakan dan regulasi antikorupsi yang diterapkan Pemkab.

3) Digitalisasi Layanan Publik (E-Government)

Implementasi sistem digital yang terintegrasi seperti E-Monev dan SIPATIL HAPE mempersempit ruang pertemuan tatap muka antara petugas dan masyarakat. Hal ini secara otomatis menurunkan risiko terjadinya suap atau pemerasan dalam birokrasi.

4) Komitmen Kuat Pimpinan

Kenaikan drastis di tahun 2025 tidak mungkin terjadi tanpa instruksi langsung dan pengawasan ketat dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky S.E. Komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi KPK dan BPK menjadi sinyal kuat bagi seluruh ASN di Tuban untuk menjaga integritas.

5) Penguatan Peran Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tuban berperan lebih aktif sebagai *quality assurance*. Melalui audit rutin dan kanal pengaduan (*Whistleblowing System*) yang responsif, setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani lebih dini.

Berdasarkan analisis capaian **Survei Penilaian Integritas (SPI)** Kabupaten Tuban yang sempat mengalami fluktuasi sebelum mencapai skor **81,31** di tahun 2025, berikut adalah rekomendasi strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan predikat "**TERJAGA**":

- Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memperhatikan kejelasan informasi layanan sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah pengemasan informasi prosedur layanan secara jelas dan interaktif melalui inovasi. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan juga sangat penting untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah dengan lebih baik. Kemudahan dalam memahami prosedur layanan juga menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, pengemasan informasi prosedur layanan yang jelas dan bersifat interaktif melalui inovasi harus menjadi prioritas.
- Evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survey kepuasan layanan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud.
- Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Tuban disarankan untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini harus mencakup proses tender, evaluasi, dan pengelolaan kontrak agar pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai SOP pengadaan barang dan jasa yang baru serta standar harga juga perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman dan efektivitas implementasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban juga perlu memperhatikan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, melakukan edukasi dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Masyarakat sangat penting. Selain itu, melakukan due diligence terhadap vendor dan memasukkan vendor yang tidak berintegritas ke dalam daftar hitam juga harus dilakukan. Dengan membuka ruang pengadaan barang dan jasa yang lebih luas

dan melibatkan masyarakat secara efektif, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

- Dalam rangka mencegah gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu mengimplementasikan dan menginternalisasi kebijakan serta regulasi yang mengatur mekanisme pelaporan dan pengelolaan gratifikasi di instansi. Langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada seluruh pegawai juga harus dilakukan agar semua pihak memahami pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan.
- Pemerintah Kabupaten Tuban juga harus mewajibkan survei kebutuhan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa per divisi atau direktorat. Dengan mengembangkan system aplikasi e-catalog atau eprocurement, setiap direktorat atau divisi dapat lebih mudah dalam menginput data kebutuhan. Selain itu, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pemberian sanksi yang tegas terhadap vendor yang tidak memenuhi kriteria juga sangat diperlukan untuk memastikan hasil pengadaan bermanfaat bagi masyarakat.
- Sosialisasi dan pelatihan mengenai standar prosedur operasional pelaksanaan pengenaan sanksi atau denda juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik akan mempermudah proses penegakan sanksi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dan pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Dalam hal rekrutmen pegawai non-ASN dan promosi pegawai,
- Pemerintah Kabupaten Tuban disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap-menyuap. Program kepemimpinan yang terkait dengan kepatuhan juga perlu dibuat untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menjalankan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301, diharapkan integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat terjaga.
- Pemerintah Kabupaten Tuban harus menegakkan sanksi terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan regulasi internal lainnya.

Menerapkan larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai dan pimpinan di instansi, disertai dengan contoh dari pimpinan, akan memperkuat komitmen terhadap integritas.

- Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Terakhir, dalam menghadapi perintah atasan yang tidak sesuai aturan,
- Pemerintah Kabupaten Tuban perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan larangan suap-menyuap. Penegakan aturan tanpa pandang bulu dan penerapan sistem manajemen kepatuhan yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	82,13	81,27	98,95	583.052.332.185	496.471.087.738	85,15	13,79
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dalam SAKIP Daerah	11,72	12,20	104,09	49.116.374.346	38.246.758.277	77,87	26,22
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP Daerah	24,01	23,74	94,87				
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	89,01	86,46	97,14	1.242.722. 417	1.126.735.926	90,67	6,47
		Persentase Realisasi Kontribusi BUMD terhadap PAD	1,06	0,96	90,57				
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	70	51,81	74,01	2.599.929.42 3	2.538.966.963	97,66	-23,65
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	70,18	67,65	142,50	1.860.132.832	1.802.473.074	96,90	45,6
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah	88,28	92,61	104,90	69.274.600	64.952.400	93	11,9

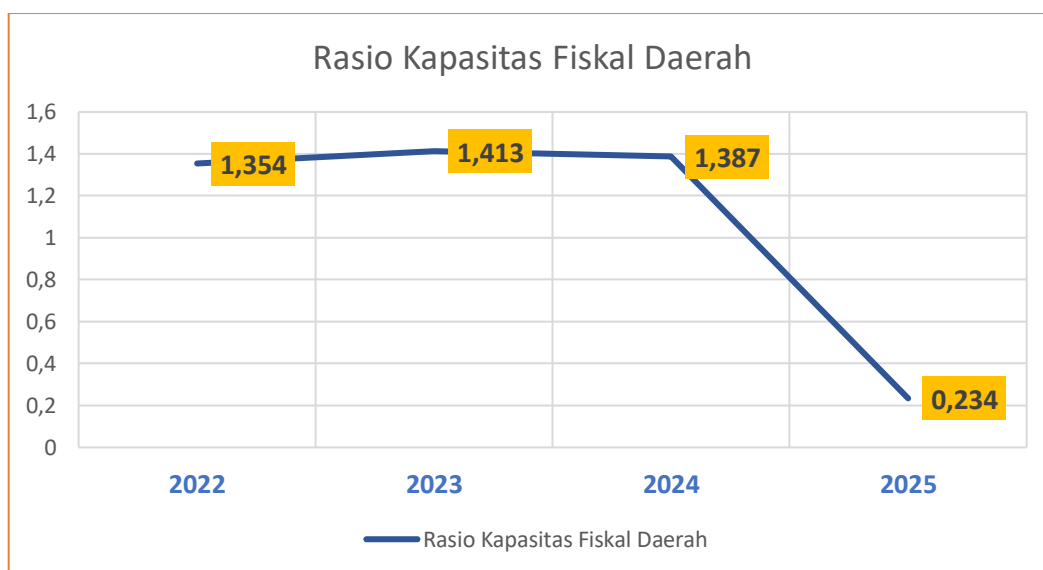
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	100	100	100	522.013.204.691,10	447.840.579.833,00	85,79	14,21
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100	100	100	2.026.903.392,00	1.141.923.546,00	56,34	42,62
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat Pembangunan kompetensi 20JP	100	100	100	3.464.684.868	2.790.697.763	80,55	19,4518
		Persentase ASN yang telah menduduki jabatan sesuai dengan pemetaan manajemen talenta	80	79,88	99,85				
		Persentase kinerja ASN minimal baik	83	82,19	99				
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial dan fungsional	65,00	64,46	99,16	1.835.717.787	1.542.888.806	84,05	15,11
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	presentase tanah milik daerah yang bersertifikat	100	100	100	2.666.039.669,00	2.165.808.913,00	81,24	18,76

D. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) adalah indikator kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari total pendapatan (dikurangi dana khusus/tertentu) dibandingkan dengan kebutuhan belanja (terutama belanja pegawai), yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memetakan kemampuan fiskal daerah. Pada tahun 2025, posisi kapasitas fiskal Kabupaten Tuban menunjukkan potret sebagai berikut:

- Realisasi Capaian: Kabupaten Tuban mencatatkan angka 0,234.
- Target Tahunan: Sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 1,433.
- Status Kinerja: Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi saat ini baru mencapai sekitar 16,3% dari target yang direncanakan.

Capaian angka 0,234 menempatkan Kabupaten Tuban dalam kategori kapasitas fiskal yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sumber pendanaan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang sudah ditentukan peruntukannya (earmarked), sehingga ruang gerak pemerintah daerah untuk mendanai program prioritas atau inovasi baru secara mandiri masih terbatas.



Grafik 3.20 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)
Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Pada tahun 2022 Kabupaten Tuban menunjukkan kekuatan fiskal yang terus meningkat hingga tahun 2023, namun Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan tipis menjadi 1,387. Meskipun menurun, angka ini masih tergolong sangat kompetitif dan

menunjukkan bahwa daerah masih memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk melakukan belanja diskresioner. Memasuki tahun 2025, grafik menunjukkan penurunan yang sangat drastis ke angka 0,234. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya perubahan struktur keuangan daerah yang signifikan.

Adanya selisih yang cukup lebar antara target (1,433) dan realisasi (0,234) dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis :

- 1) Ketergantungan Transfer: Tingginya proporsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa yang membatasi fleksibilitas fiskal daerah.
- 2) Beban Belanja Wajib: Besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan pemenuhan *spending mandatory* (pendidikan dan kesehatan) yang menyerap porsi besar pendapatan umum.

Untuk mengejar ketertinggalan target di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah berikut:

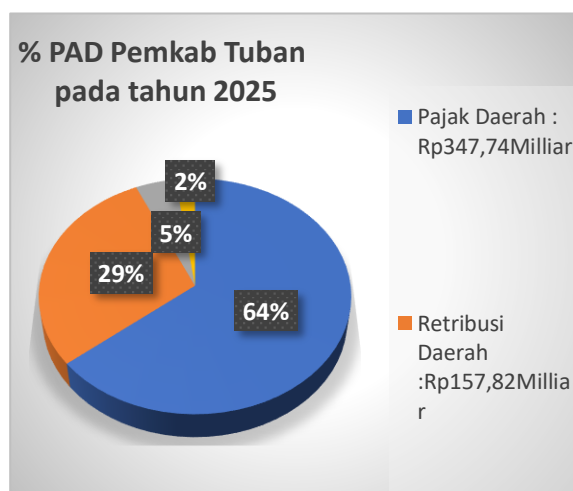
- 1) Intensifikasi & Ekstensifikasi Pajak: Memperluas basis pajak melalui digitalisasi pemungutan pajak daerah.
- 2) Efisiensi Belanja: Melakukan rasionalisasi belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
- 3) Peningkatan Investasi: Mendorong iklim investasi di Tuban untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor industri dan energi.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

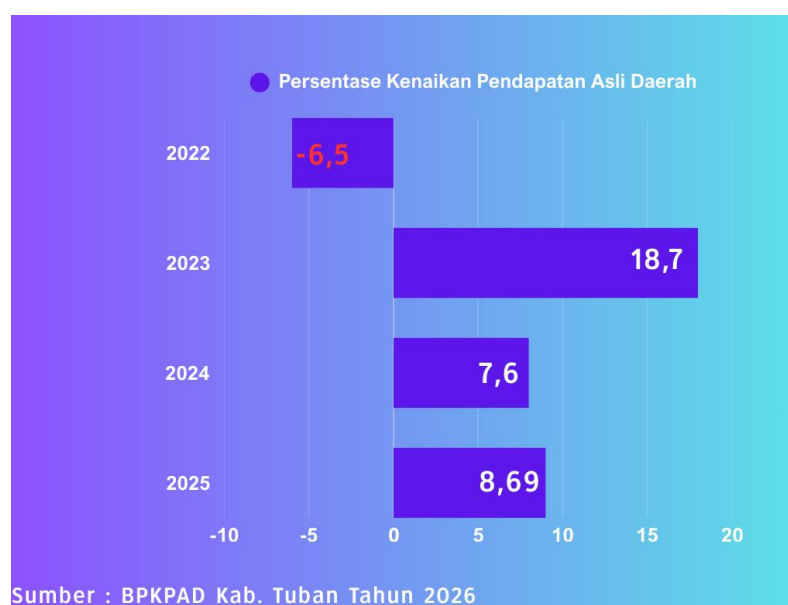
No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	1,433	0,234	16,32	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	-65,16
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100	103.42	103.42	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	21,94

E. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator kinerja keuangan yang mengukur tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli (pajak, retribusi, dll) dibandingkan dengan periode sebelumnya (tahun lalu). Pada tahun 2025 Kabupaten Tuban menetapkan **Target Kinerja** pertumbuhan PAD sebesar **5%**. Angka ini sebelumnya dinilai sebagai target yang realistis di tengah dinamika ekonomi global



dan transisi kebijakan pajak daerah yang baru. Namun, melalui serangkaian inovasi dan optimalisasi pemungutan, Tuban berhasil mencatatkan **Capaian Kinerja** riil sebesar **8,69%**. Capaian ini merepresentasikan efektivitas kinerja sebesar **173,8%** dari target yang direncanakan. Angka 8,69% ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator kuat bahwa mesin ekonomi lokal Tuban bergerak lebih cepat dari yang diprediksikan.



Grafik 3.21 Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung positif setelah melewati masa transisi pasca-pandemi. Pada tahun **2022**, persentase kenaikan PAD berada di zona negatif, yakni sebesar

-6,5%. Angka ini menunjukkan adanya kontraksi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi atau dampak sisa pemulihan ekonomi di sektor-sektor kunci daerah. Tahun **2023** menjadi titik balik atau *rebound* yang luar biasa. Kabupaten Tuban mencatatkan kenaikan PAD tertinggi dalam periode ini dengan angka **18,7%**. Kenaikan tajam ini mengindikasikan keberhasilan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas kebijakan pemungutan pajak dan retribusi. Setelah lonjakan drastis, grafik menunjukkan fase stabilisasi di tahun 2024 dan kenaikan 8,69 di akhir 2025.

Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 diantaranya :

- 1) Secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp61.617.229.313,40 atau 14,42%. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah tersebut antara lain didorong oleh pelaksanaan inovasi Gebyar Hadiah Pajak Daerah, yang menyasar masyarakat Kabupaten Tuban yang berbelanja di restoran, serta pembukaan stand pelayanan pajak pada kegiatan Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu.
- 2) Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh penambahan rekening baru, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang mulai dibukukan sebagai penerimaan daerah pada Tahun 2025.
- 3) Kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembayaran pajak secara non-tunai (cashless) untuk berbagai jenis pajak daerah, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kabupaten Tuban. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.
- 4) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada beberapa jenis pajak utama. Peningkatan terbesar terjadi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp40.284.326.390,00 atau 37,99%, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak di sektor barang dan jasa.

- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan sebesar Rp5.032.850.145,00 atau 14,75%, seiring dengan meningkatnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp666.942.093,00 atau 1,35%, yang dipengaruhi oleh perbaikan administrasi dan optimalisasi pemungutan pajak.
- 6) Pajak Reklame mengalami peningkatan sebesar Rp239.703.535,00 atau 8,50%, sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas promosi usaha serta penguatan pengawasan dan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan capaian **Persentase Kenaikan Pajak Asli Daerah (PAD)** Kabupaten Tuban tahun 2025 yang mencapai **8,69%**—jauh melampaui target sebesar **5%**—diperlukan langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ini agar tetap berkelanjutan.

1) Intensifikasi Pajak Berbasis Digitalisasi

Mempertahankan pertumbuhan di atas target memerlukan sistem pemungutan yang transparan dan mudah bagi wajib pajak.

- Integrasi E-Tax: Memperluas penggunaan alat monitoring transaksi elektronik (*tapping box*) pada sektor hotel, restoran, dan hiburan untuk meminimalisir kebocoran pajak secara *real-time*.
- Digitalisasi Pembayaran: Mengoptimalkan kanal pembayaran nontunai (QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses.

2) Ekstensifikasi dan Pemutakhiran Data Objek Pajak

Pencapaian 8,69% menunjukkan potensi pajak yang besar yang perlu terus digali melalui perluasan basis pajak.

- Pendataan Objek Pajak Baru: Melakukan penyisiran dan pendaftaran objek pajak baru, terutama pada sektor-sektor yang tumbuh pesat seiring tingginya Rasio Kewirausahaan (8,24%) di Tuban.
- Pemutakhiran PBB-P2: Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) nilai jual objek pajak (NJOP) secara periodik, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan nilai ekonomi akibat pembangunan infrastruktur dan industry.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	1,433	0,234	16,32	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	-65,16
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	100	103.42	103.42	5.675.731.508,40	4.624.782.488,00	81,48	21,94

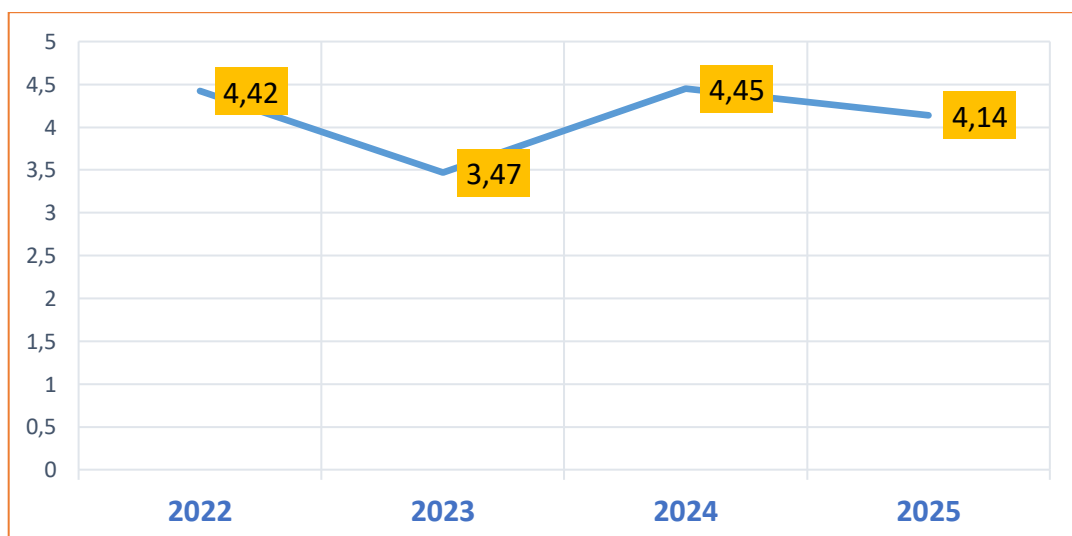
F. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini



mengevaluasi aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi, guna memastikan pelayanan berjalan prima, transparan, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan digitalisasi birokrasi. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Kabupaten Tuban mencatatkan nilai **Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,14**.



Grafik 3.22 Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tuban menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap menjaga standar kualitas yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya melakukan adaptasi terhadap standar penilaian yang semakin ketat untuk memastikan kepuasan masyarakat tetap terjaga. luktiasi yang terjadi merupakan refleksi dari dinamisnya standar pelayanan publik nasional yang menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya berinovasi, tetapi juga menjaga konsistensi mutu di setiap unit layanan.

	SKOR IPP	KATAGORI
 PROV. JAWA TIMUR	4,75	A
 KAB. TUBAN	4,14	A-
 KAB. LAMONGAN	4,32	A
 KAB. BOJONEGORO	4,68	A

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2026

Tabel 3.14 Perbandingan Skor IPP Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar

Kabupaten Tuban saat ini berada pada posisi Sangat Baik (A-), namun tertinggal selangkah dibandingkan tetangga terdekatnya (Bojonegoro dan Lamongan) yang sudah menembus kategori Prima (A). Terdapat selisih sebesar 0,61 poin antara capaian Kabupaten Tuban dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa Tuban masih memiliki ruang akselerasi untuk mencapai predikat "Prima". Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu melakukan studi komparatif dan penguatan inovasi layanan agar dapat kembali ke tren positif seperti pada tahun 2024 dan mengejar ketertinggalan dari kabupaten sekitarnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Pelayanan Publik	1. Pemanfaatan SP4N-LAPOR!: Penanganan keluhan masyarakat yang cepat dan terdokumentasi dengan baik meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen perbaikan layanan. 2. Kepastian Biaya dan Waktu: Publikasi maklumat pelayanan yang jelas mengenai standar biaya (Rp0 untuk layanan administratif tertentu) dan jangka waktu penyelesaian memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 3. Budaya Kerja BerAKHLAK: Internalisasi nilai-nilai inti aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan, yang secara langsung berdampak pada kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. 4. Standarisasi Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan bagi petugas lini depan (<i>frontliner</i>) dalam hal etika pelayanan dan penguasaan sistem informasi.	1. Optimalisasi MPP Digital: Pengintegrasian berbagai jenis layanan (perizinan, kependudukan, perpajakan) ke dalam satu atap fisik dan digital memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa birokrasi yang berbelit. 2. Penerapan SPBE: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semakin matang mempercepat durasi penyelesaian dokumen pelayanan. 3. Sinergi Layanan Kesehatan: Keberhasilan program seperti <i>Pasti Eling</i> (layanan kesehatan jemput bola) berkontribusi pada persepsi positif masyarakat terhadap kehadiran pemerintah di sektor dasar. 4. Kemudahan Perizinan Usaha: Peningkatan Rasio Kewirausahaan hingga 8,24% dipicu oleh kemudahan pengurusan izin usaha (OSS) yang menjadi salah satu variabel penilaian IPP.

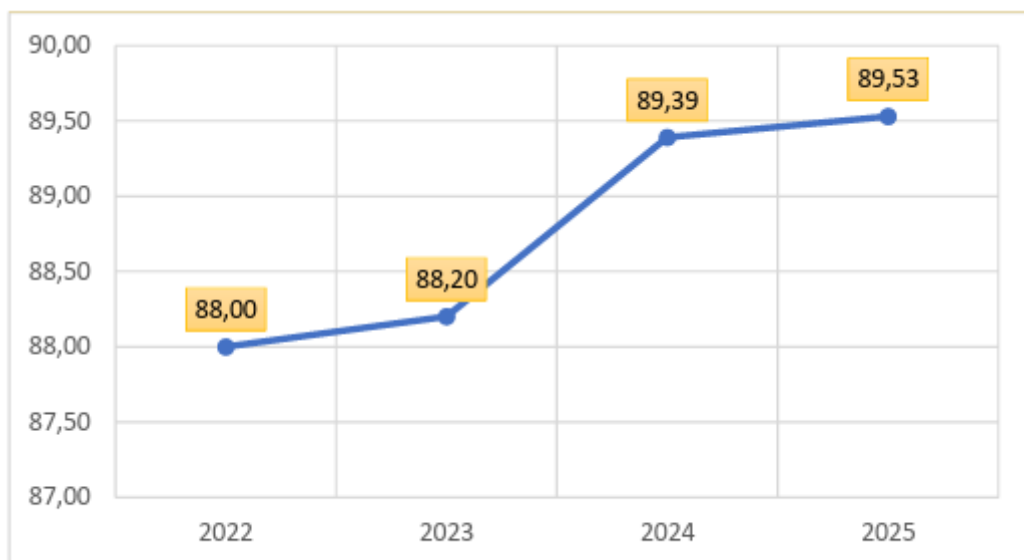
Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,14	92,61	50111281186	47677636242	95,14	-2,53
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan secara digital	48,39	50	103,32	5.796.611.234	5.689.094.885	98,15	5,17
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,70	98,54	98,84	1.312.046.007,00	1.091.627.279,00	83,2	15,64
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60	52,43	87,38				
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	100	97,31	97,31	151.003.498,00	137.732.206,00	91,21	8,79
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	100	100				
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	100	100	1.241.665.383	1.128.589.250	91,89	8,11
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Aspirasi/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80	83,02	103,78	41.609.955.064	39.630.592.622	95,24	108,96

G. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat. IKM membandingkan harapan dengan kenyataan pelayanan publik, berfungsi sebagai "rapor" kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan pada tahun lalu oleh 15 (lima belas) Dinas, 2 (dua) RSUD, 33 (tiga puluh tiga)

Puskesmas dan 20 (dua puluh) Kecamatan penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Tuban pada tahun lalu didapatkan hasil sebesar 88,20 dengan nilai mutu "B" (Baik) dan nilai kinerja seluruh pelayanan berada pada kategori "Baik". Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban mencatatkan nilai realisasi IKM sebesar 89,52, meskipun angka ini menunjukkan tingkat kepuasan yang berada pada kategori "Sangat Baik", capaian tersebut sedikit berada di bawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 89,82. Meskipun terdapat selisih 0,30 dari target 89,82, hal ini tidak mencederai predikat pelayanan prima yang telah diraih.



Grafik 3.23 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tuban dari tahun 2022 hingga 2025

Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tuban selama empat tahun terakhir (2022–2025) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan positif. Grafik memperlihatkan garis linear yang terus menanjak, menandakan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan pemerintah daerah dirasakan secara nyata dan bertahap oleh masyarakat. Tahun 2024 menjadi titik balik (*turning point*) yang paling krusial. Terjadi lonjakan kinerja yang sangat signifikan sebesar 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan tajam ini berhasil membawa Kabupaten Tuban "naik kelas" dari kategori Mutu B (Baik) menjadi Mutu A (Sangat Baik/Pelayanan Prima) karena telah melewati ambang batas nilai 88,31. Hal ini mengindikasikan keberhasilan inovasi besar atau digitalisasi layanan yang diterapkan pada tahun tersebut. Tren positif berlanjut dengan capaian nilai 89,53. Kenaikan sebesar 0,14 poin dari tahun 2024 menunjukkan fase *pemantapan* (stabilisasi). Pada tahap ini, tantangannya bukan lagi sekadar mengejar kenaikan angka drastis, melainkan konsistensi mempertahankan predikat "Pelayanan Prima" di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternatif Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 89,53. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025. 2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan,	1. Memperkuat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital agar seluruh alur perizinan dan non-perizinan dapat diakses dalam satu aplikasi terpadu untuk memangkas waktu pelayanan. 2. Mengurangi persyaratan fotokopi dokumen fisik dengan memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi, yang secara langsung akan meningkatkan skor pada unsur "Persyaratan" dan "Biaya".

Indikator Sasaran	Penyebab keberhasilan/ kegagalan	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut
	sebanyak 71 OPP telah menyampaikan laporannya. 3. Dari seluruh OPP yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.	3. Menetapkan standar waktu respons maksimal (misal: 1x24 jam) untuk setiap keluhan yang masuk agar masyarakat merasa aspirasinya didengar dan ditindaklanjuti secara nyata. 4. Menjadikan data pengaduan sebagai dasar perbaikan kebijakan pada unit layanan yang memiliki skor IKM rendah. 5. Memastikan seluruh gedung layanan publik di Tuban memiliki aksesibilitas yang memadai bagi disabilitas, lansia, dan ibu menyusui untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan. 6. Mengalihkan survei manual menjadi survei digital melalui QR Code di setiap loket layanan, sehingga fluktuasi kepuasan masyarakat dapat dipantau setiap hari tanpa harus menunggu survei tahunan.

Program menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	89,52	99,66	50111281186	47677636242	95,14	4,51%
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan secara digital	48,39	50	103,32	5.796.611.234	5.689.094.885	98,15	5,17%
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,70	98,54	98,84	1.312.046.007,00	1.091.627.279,00	83,2	15,64%
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60	52,43	87,38				
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	100	97,31	97,31	151.003.498,00	137.732.206,00	91,21	8,79%
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	100	100				
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	100	100	1.241.665.383	1.128.589.250	91,89	8,11%
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Aspirasi/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80	83,02	103,78	41.609.955.064	39.630.592.622	95,24	108,96%

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tuban telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 13 (tiga belas) sasaran yang mencakup 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran rata-rata capaian kinerjanya 102,67% atau kategori capaian memuaskan (diatas ekspektasi).

Adapun uraian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 (dua puluh tujuh) indikator, 13 (tiga belas) sasaran dan 4 (empat) tujuan dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran dengan nilai > lebih dari 100 sebanyak 15 (lima belas) indikator sasaran, indikator sasaran dengan nilai >75 – 100 sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran, indikator sasaran dengan nilai >55 – 75 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, sedangkan indikator dengan nilai dibawah 2 (dua), serta 7 (indikator) indikator sasaran belum dirilis. Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastuktur Berkualitas dengan 1 indikator yaitu Indek Kualitas Layanan Infrastruktur dengan capaian kinerja sebesar 100,99% atau kategori memuaskan.
2. Pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan 2 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 99,29% dan Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan capaian 108,71% atau katagori memuaskan.
3. Pencapaian sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Stabil dan berkelanjutan dengan 3 indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi belum dirilis seangakan indikator Rasio Gini yaitu sebesar 106,58% dengan katagori memuaskan.
4. Pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah dengan 2 indikator yaitu Persentase Desa Mandiri dengan capaian 172,58% dan Indeks Ketahanan Pangan 84,74%.

5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha terdapat 3 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) realisasi kinerja 119,43%, Rasio Kewirausahaan realiasi kinerja 110,30% dan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan realiasi capaian kinerja 102,17% dari semua indikator capaian melebihi 100% atau melebihi ekspektasi.
6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian ralisasi kinerja sebesar 99,82%.
7. Pencapaian sasaran 7 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan 4 (empat) indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun dengan capaian realisasi kinerja 88,81%, Harapan Lama Sekolah dengan realisasi kinerja 101,02%, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 95,81% dan Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi dengan realisasi capain 90,4%.
8. Pencapaian sasaran 8 Terwujudnya Kesehatan Berkualitas yang merata dengan 1 (satu) indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) capaian sebesar 100,71% atau kategori memuaskan.
9. Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum rilis nilainya.
10. Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Harmoni Indonesia dengan capaian sebesar 100% atau kategori Sangat Memuaskan.
11. Pencapaian sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator yaitu Indeks Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 98,95%, Opini BPK dengan memperoleh WTP sedangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan capaian kinerja 104,25%.
12. Pencapaian sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dengan capaian sangat buruk yaitu 16,32% dan Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian sangat memuaskan yaitu 173,8%.
13. Pencapaian sasaran 13 terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital dengan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 92,61%,

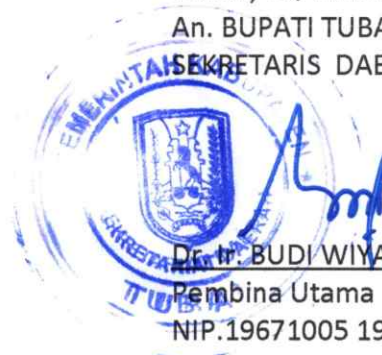
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 99,66% dan Indeks SPBE/Indeks Pemdi belum rilis.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 13 (tiga belas) sasaran yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 , dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya “Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan “.

Tuban, 26 Maret 2026

An. BUPATI TUBAN

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. BUDI WIYANA, MSI

Pembina Utama Madya

NIP.19671005 199202 1 004